



BAKAUHENI HARBOUR CITY



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**



**RAKYAT LAMPUNG
BERJAYA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini setiap Perangkat Daerah dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Provinsi Lampung dalam menjalankan visi dan misi Kepala Daerah mengacu pada dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Secara umum pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikatornya masing-masing menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024.





Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut: Rentang Capaian lebih dari 90% (sangat memuaskan), 80%-90% (memuaskan), 70%-80% (sangat baik), 60%-70% (baik), 50%-60% (cukup), < 50% (kurang). Sedangkan Hasil pengukuran kinerja Provinsi Lampung pada setiap misi adalah sebagai berikut:

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2021		Kinerja 2022		%	Ket.
					Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,1	73,1	73,3	72,44	73,5	72,44*	98,56%	
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	72,56	72,79	73	80,18	74	80,18*	108,35%	
3	Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka	-	55,38	54,8	53,19	55,30	53,19*	96,18%	
Misi 2: Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik										
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B	CC	B	CC	B	CC	98,18	
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas										
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,51	70,65	70,8	70,73	70,95	70,99	100,06 %	
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,65	12,66	12,73	12,67	12,74	100,55%	
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,05	8,1	8,08	8,20	8,18	99,76%	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,03	4,67	4 – 4,5	4,69	4,3-4,4	4,52	97,27%	
9	Indeks Perlindungan Anak	Angka		65,07	67,66	65,07	69,57	65,07*	93,53%	
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69,23	69,06	69,1	67,96	69,14	67,96*	98,29%	
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah										
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	6,01	76,045	74	75,386	76	76,850	101,12%	
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	88,8	90,21	91,2	91,22	92,31	96,5	104,54%	
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	95,76	96,5	96	99,94	97	99,99	103,08%	
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan										
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27	-1,67	2,5 – 3,5	2,79	3-4	4,28	142,67%	
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	103,2	94,73	101 – 102	101,23	102-103	104,30	102,25%	
16	Laju Inflasi	Persen	3,44	2	3 ± 1	2,19	3±1	5,51	62,25%	
17	Angka Kemiskinan	Persen	12,3	12,76	12,76 – 12,4	11,67	12,4-11,9	11,44	107,74%	
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama										
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	66,95	68,23	68,56	68,66	69,10	100,64%	
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,28	6,86	6,74	6,74	6,915	12,84	185,68%	
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,78	146,78	142,9	145,42	141	145,42*	96,87%	

Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Februari 2023.

Tabel di atas memberikan informasi ringkas bahwa 19 (sembilan belas) IKU Provinsi Lampung berkinerja sangat memuaskan dan 1 (satu) IKU berkinerja baik.





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas Rahmat sehingga penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk laporan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja yang bertujuan untuk menyampaikan perkembangan atas capaian tujuan, sasaran Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung selama kurung waktu satu tahun dengan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu meningkatnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Berkenaan dengan itu, kami berharap melalui penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 ini menjadi media untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan agar dapat berkinerja lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Telukbetung, Maret 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI





PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
INSPEKTORAT

Jln.Dr.Susilo 42 Telepon (0721) 252332, 253729,252960 (FAX) 254895
BANDAR LAMPUNG 35132

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu Atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bandar Lampung, 29 Maret 2023

INSPEKTUR,

Ir. FREDY SM, MM, CGCAE
Pembina Utama Madya
NIP.19650202 199010 1 001

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM PROVINSI LAMPUNG	3
1.3 ISU STRATEGIS	9
1.4 LANDASAN HUKUM	19
1.5 INOVASI PROVINSI LAMPUNG	21
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN	24
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 25
PERUBAHAN RPJMD 2019-2024	25
1. VISI DAN MISI	26
2. TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR	28
3. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	39
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 41
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	42
3.2 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	46
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	156
3.4 EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS	157
3.5 TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2022	160
3.6 PRESTASI PROVINSI LAMPUNG	161
 BAB IV PENUTUP	 164
 LAMPIRAN	 167



DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 1.1 Komponen SAKIP	1
Gambar 1.2 Piramid Sasaran Pembangunan	2
Gambar 1.3 Skema RPJMD dan Renstra	2
Gambar 1.4 Program Prioritas Nasional dan Provinsi Lampung Tahun 2022.....	3
Gambar 1.5 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung.....	4
Gambar 1.6 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.....	5
Gambar 1.7 Pola Hubungan Kerja satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung	8
Gambar 2.1 Visi dan Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024	27
Tabel 2.1 Matrik Tujuan , Sasaran dan Indikator RPJMD 2019-2024	28
Tabel 2.2 Perubahan IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024	31
Tabel 2.3 Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2022	40
Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja	42
Tabel 3.1.2 Indikator Kinerja Makro	43
Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1 (2019-2022)	46
Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 1 (2024-Nasional)	46
Tabel 3.2.3 Faktor Pendukung dan Penghambat IKUB.....	48
Tabel 3.2.4 Faktor Pendukung dan Penghambat IKUB.....	49
Tabel 3.2.5 Faktor Pendukung dan Penghambat IKUB.....	50
Tabel 3.2.6 Pencapaian Sasaran 2 (2019-2022)	51
Tabel 3.2.7 Aspek Perhitungan IDI Tahun 2019-2020	52
Tabel 3.2.8 Aspek Perhitungan IDI Tahun 2021	53
Tabel 3.2.9 Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional).....	53
Tabel 3.2.10 Perbandingan IDI se-Sumatera	53
Tabel 3.2.11 Perbandingan IDI se-Indonesia	54
Tabel 3.2.12 Faktor Pendukung dan Penghambat IDI	55
Tabel 3.2.13 Pencapaian Sasaran 3 (2019-2022)	56
Tabel 3.2.14 Pencapaian Sasaran 3 (2024-Nasional)	56
Tabel 3.2.15 IPK Provinsi Lampung 2018-2021	58
Tabel 3.2.16 Faktor Pendukung dan Penghambat IPK	60
Tabel 3.2.17 Pencapaian Sasaran 4 (2019-2022)	61
Tabel 3.2.18 Pencapaian Sasaran 4 (2024-Nasional)	61
Tabel 3.2.19 Kategori Nilai RB Provinsi Lampung	62
Tabel 3.2.20 Faktor Pendukung dan Penghambat Nilai RB	66
Tabel 3.2.21 Pencapaian Sasaran 5 (2019-2022)	67
Tabel 3.2.22 Pencapaian Sasaran 5 (2024-Nasional)	67
Tabel 3.2.23 Faktor Pendukung dan Penghambat AHH	72
Tabel 3.2.24 Pencapaian Sasaran 6 (2019-2022)	73



Tabel 3.2.25 Pencapaian Sasaran 6 (2024-Nasional)	73
Tabel 3.2.26 Pencapaian Sasaran 7 (2019-2022)	73
Tabel 3.2.27 Pencapaian Sasaran 7 (2024-Nasional)	74
Tabel 3.2.28 Faktor Pendukung dan Penghambat HLS	77
Tabel 3.2.29 Faktor Pendukung dan Penghambat RLS	79
Tabel 3.2.30 Pencapaian Sasaran 7 (2019-2022)	79
Tabel 3.2.31 Pencapaian Sasaran 7 (2024-Nasional)	80
Tabel 3.2.32 Faktor Pendukung dan Penghambat TPT	83
Tabel 3.2.33 Jumlah Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi	88
Tabel 3.2.34 Pencapaian Sasaran 8 (2019-2022)	90
Tabel 3.2.35 Pencapaian Sasaran 8 (2024-Nasional)	90
Tabel 3.2.36 Faktor Pendukung dan Penghambat IPA	93
Tabel 3.2.37 Pencapaian Sasaran 9 (2019-2022)	94
Tabel 3.2.38 Pencapaian Sasaran 9 (2024-Nasional)	94
Tabel 3.2.39 Faktor Pendukung dan Penghambat IDG	97
Tabel 3.2.40 IDG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021	99
Tabel 3.2.41 Pencapaian Sasaran 10 (2019-2022)	99
Tabel 3.2.42 Pencapaian Sasaran 10 (2024-Nasional)	100
Tabel 3.2.43 Faktor Pendukung dan Penghambat KKJ	103
Tabel 3.2.44 Pencapaian Sasaran 10 (2019-2022)	104
Tabel 3.2.45 Pencapaian Sasaran 10 (2024-Nasional)	104
Tabel 3.2.46 Faktor Pendukung dan Penghambat TIDW	108
Tabel 3.2.47 Capaian Akses Sanitasi Tahun 2021	110
Tabel 3.2.48 Target Capaian Penanganan Kumuh Provinsi Lampung	112
Tabel 3.2.49 Capaian Akses Air Minum	114
Tabel 3.2.50 Pencapaian Sasaran 12 (2019-2022)	116
Tabel 3.2.51 Pencapaian Sasaran 12 (2024-Nasional)	116
Tabel 3.2.52 Faktor Pendukung dan Penghambat Rasio Elektrifikasi	119
Tabel 3.2.53 Pencapaian Sasaran 13 (2019-2022)	120
Tabel 3.2.54 Pencapaian Sasaran 13 (2024-Nasional)	120
Tabel 3.2.55 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota	124
Tabel 3.2.56 Pencapaian Sasaran 14 (2019-2022)	125
Tabel 3.2.57 Pencapaian Sasaran 14 (2024-Nasional)	125
Tabel 3.2.58 Pencapaian Sasaran 15 (2019-2022)	131
Tabel 3.2.59 Pencapaian Sasaran 15 (2024-Nasional)	131
Tabel 3.2.60 Faktor Pendukung dan Penghambat	133
Tabel 3.2.61 Pencapaian Sasaran 16 (2019-2022)	134
Tabel 3.2.62 Pencapaian Sasaran 16 (2024-Nasional)	134
Tabel 3.2.63 Faktor Pendukung dan Penghambat	136
Tabel 3.2.64 Pencapaian Sasaran 17 (2019-2022)	137
Tabel 3.2.65 Pencapaian Sasaran 17 (2024-Nasional)	137
Tabel 3.2.66 IKLH Provinsi Lampung 2019-2021	140
Tabel 3.2.67 Faktor Pendukung dan Penghambat	141



Tabel 3.2.68 Pencapaian Sasaran 18 (2019-2022)	142
Tabel 3.2.69 Pencapaian Sasaran 18 (2024-Nasional)	142
Tabel 3.2.70 Penurunan Emisi GRK	145
Tabel 3.2.71 Faktor Pendukung dan Penghambat	153
Tabel 3.2.72 Pencapaian Sasaran 19 (2019-2022)	154
Tabel 3.2.73 Pencapaian Sasaran 19 (2024-Nasional)	154
Tabel 3.2.74 Faktor Pendukung dan Penghambat	155
Tabel 3.3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran 2022	156
Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022	157





BAB I PENDAHULUAN

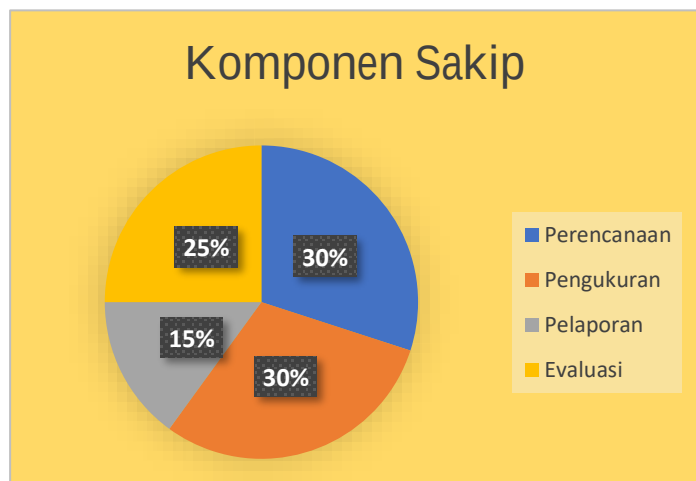
1.1 Latar Belakang

Sistem tata kelola pemerintahan berdayaguna, berhasil guna, bersih, transparan dan akuntabel merupakan unsur penting dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Petunjuk teknis lebih lanjut didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi Gubernur didukung tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Berdasarkan Permenpan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal yang tertera pada gambar 1.1.

Gambar 1.1 : Komponen SAKIP



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Februari 2023





Dalam pencapaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung selaku unsur pembantu pimpinan dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas dan Badan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan daerah Lampung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintah Kabupaten, Kota, Provinsi dan Nasional.

Gambar 1.2 Sasaran Pembangunan Provinsi Lampung



Sumber: Olahan data Biro Organisasi,
Februari 2023

Gambar 1.3 Skema RPJMD dan RENSTRA Provinsi



Sumber: Olahan data Biro Organisasi, Februari 2023





Gambar 1.4 Program Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun



Sumber : olahan data Biro Organisasi, Februari 2023

Sejalan dengan pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik serta dukungan beberapa peraturan berlaku seperti Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, serta Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Provinsi Lampung wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan ditahun 2022.

1.2 Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan di Pulau Sumatera, Indonesia, beribukota di Bandar Lampung. Provinsi Lampung memiliki Pelabuhan utama bernama Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni serta pelabuhan nelayan seperti Pasar Ikan (Telukbetung), Tarahan, dan





Kalianda di Teluk Lampung. Bandar Udara utama adalah " Radin Inten II ", yaitu nama baru dari "Branti", 28 Km dari Ibukota melalui jalan negara menuju Kotabumi, dan tiga Bandar Udara perintis yaitu: Bandar Udara Mohammad Taufik Kiemas di Krui, Pesisir Barat, Bandar Udara Gatot Soebroto di Kabupaten Way Kanan dan Lapangan terbang AURI terdapat di Menggala yang bernama Astra Ksetra. Provinsi Lampung terletak pada kedudukan : Timur – Barat berada antara: $103^{\circ} 40'$ – $105^{\circ} 50'$ Bujur Timur Utara – Selatan berada antara : $6^{\circ} 45'$ – $3^{\circ} 45'$ Lintang Selatan, Sedangkan di Teluk Semaka adalah Kota Agung (Kabupaten Tanggamus), dan di Laut Jawa terdapat pula pelabuhan nelayan seperti Labuhan Maringgai dan Ketapang. Di samping itu, Kota Menggala juga dapat dikunjungi kapal-kapal nelayandengan menyusuri sungai Way Tulang Bawang, adapun di Samudra Indonesia terdapat Pelabuhan Krui.

Gambar 1.5 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Lampung



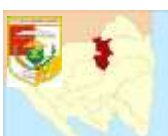
Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023

Karesidenan Lampung ditingkatkan menjadi Provinsi Lampung setelah tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 1964 menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 dengan Ibukota Tanjungkarang-Teluk Betung. Provinsi Lampung memiliki 2 Kota dan 13 Kabupaten, yaitu sebagai berikut:





Gambar 1.6 Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota Provinsi Lampung

	Kabupaten Lampung Selatan Perpu No.3/64 (UU No.14 / 64) Ibukota : Kalianda Luas : 700,32 Km ² Kec/Des/Kel : 17/4/256		Kabupaten Pesawaran UU No.33/2007, 10 Agustus 2007 Ibu Kota : Gedong Tataan Luas : 2.243,51 Km ² Kec/Kel : 11/144
	Kabupaten Lampung Tengah Perpu No.3/64 (UU No.14 / 64) Ibukota : Gunung Sugih Luas : 3.802,68Km ² Kec/Kel. : 28/314		Kabupaten Pringsewu UU No.48 / 2008, 6 November 2008 Ibu Kota : Pringsewu Luas : 625,00 Km ² Kec/Des/Kel : 9/5/126
	Kabupaten Lampung Utara Perpu No.3/64 (UU No.14 / 64) Ibukota : Kotabumi Luas : 2.725.87Km ² Kec/Kel : 23/247		Kabupaten Mesuji UU No.49 / 2008, 6 November 2008 Ibu Kota : Mesuji Luas : 2.184,00 Km ² Kec/Kel : 7/105
	Kota Bandar Lampung UU No.14/64 (PP No.24/83, 17 Juni 83) Ibukota : Bandar Lampung Luas : 296 Km ² Kec/Kel : 20/126		Kabupaten Tulang Bawang Barat UU No.50 / 2008, 6 November 2008 Ibu Kota : Panaragan Luas : 1.201,00 Km ² Kec/Des/Kel : 9/3/93
	Kabupaten Lampung Barat UU No.6 / 1991, 16 Agustus 1991 Ibukota : Liwa Luas : 4.950,40 Km ² Kec/Des/Kel : 15/5/131		Kabupaten Pesisir Barat UU No.22 / 2012, 25 Oktober 2012 Ibu Kota : Krui Luas : 2.907,23,00 Km ² Kec/Des/Kel : 11/2/116
	Kabupaten Tulang Bawang UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997 Ibu Kota : Menggala Luas : 3.466,32Km ² Kec/Des/Kel : 15/4/147	Sumber: BPS Lampung Dalam Angka (LDA) 2020	
	Kabupaten Tanggamus UU No.2 / 1997, 3 Januari 1997 Ibu Kota : Kota Agung Luas : 3020,64 Km ² Kec/Des/Kel : 20/3/299		
	Kabupaten Lampung Timur UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999 Ibu Kota : Sukadana Luas : 5.325,03 Km ² Kec/Kel : 24/264		
	Kabupaten Way Kanan UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999 Ibu Kota : Blambangan Umpu Luas : 3.921,63Km ² Kec/Des/Kel : 14/6/221		
	Kota Metro UU No.12 / 1999, 5 Mei 1999 Ibu Kota : Metro Luas : 61,79 Km ² Kec/Kel : 5/22		





Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memiliki Tugas, Kewenangan dan Kewajiban sebagai berikut:

KEPALA DAERAH (KDH)

Tugas :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang Perubahan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPd;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;

5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang :

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.





TUGAS WAKIL KEPALA DAERAH :

1. Membantu kepala daerah dalam :
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

KEWAJIBAN Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
6. Melaksanakan program strategis nasional; dan
7. Menjalinkan hubungan kerja dengan seluruh Instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

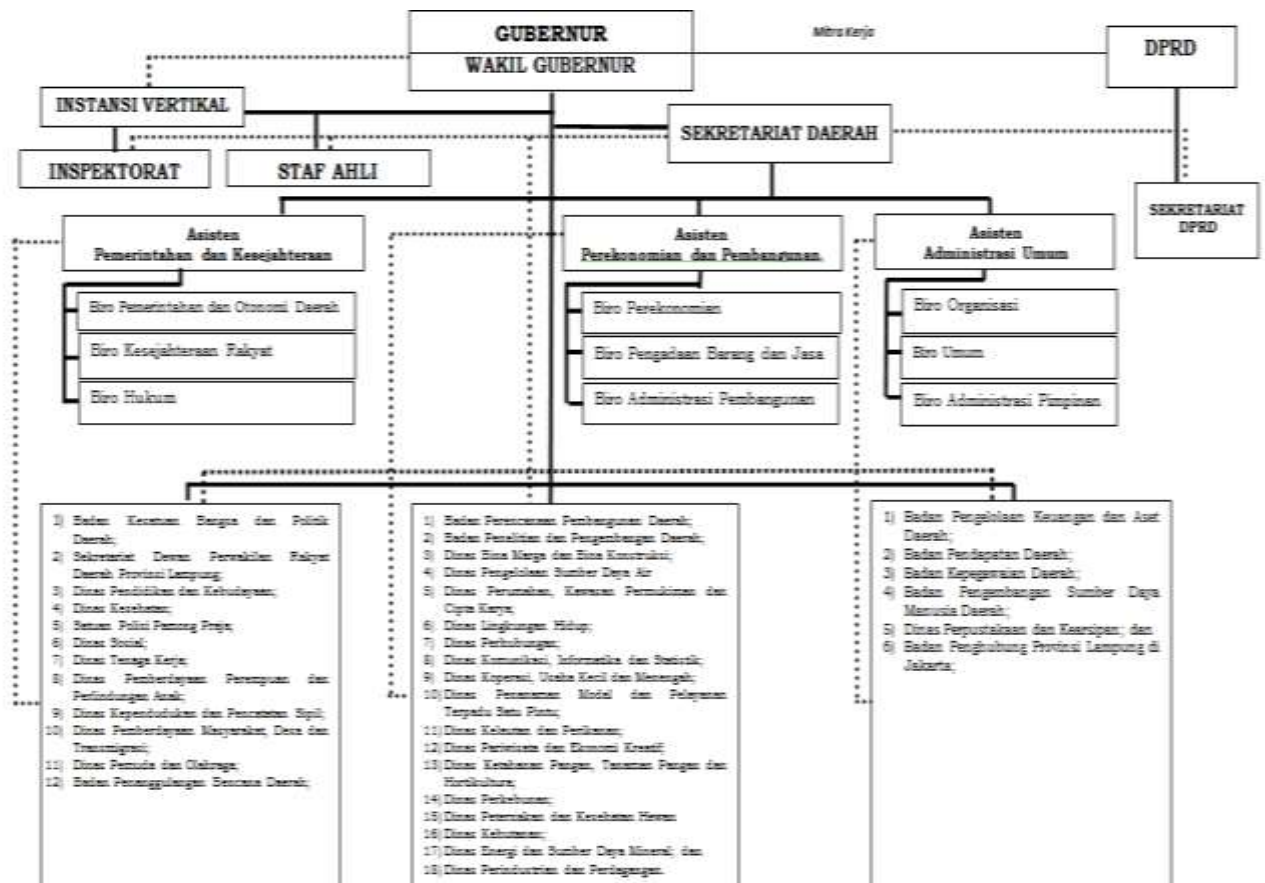




Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban dan mencakup laporan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk periode 2019-2024, Gubernur Terpilih **ARINAL DJUNAIDI** dan Wakil Gubernur **CHUSNUNIA CHALIM** dibantu oleh pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas dalam struktur organisasi dan pola hubungan kerja satuan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 yang merupakan penjabaran Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 dan mulai diimplementasikan tahun 2020, sebagaimana tertuang pada halaman berikut :

Gambar 1.7 Pola Hubungan Kerja Satuan Kerja Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Februari 2023.





1.3 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dimasa datang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai permasalahan pembangunan yang ada dan telaah terhadap kondisi aktual, diantaranya :

1. Permasalahan pembangunan di Provinsi Lampung;
2. Situasi lokal, regional, nasional dan global yang mempengaruhi pembangunan di Provinsi Lampung;
3. Kebijakan pembangunan daerah di sekitar Provinsi Lampung;
4. Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Provinsi Lampung yang tertuang pada dokumen RPJPD, RTRW, KLHS dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Lampung.

Berdasarkan pencermatan dan pendalaman terhadap hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan perumusan isu strategis pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Terjadinya pandemi Covid-19 yang telah berdampak pada perlambatan perekonomian lokal, nasional dan global sangat mempengaruhi kinerja hampir semua aspek pembangunan di daerah. Pandemi Covid-19 juga telah mengubah semua prioritas pembangunan dimana saat ini pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis berupa realokasi dan *refocussing* anggaran, serta memfokuskan kegiatan pada penanganan dampak kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak. Seiring dengan semakin membaiknya berbagai indikator laju penularan Covid-19, maka Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempertimbangkan berbagai skenario pemulihan pasca-pandemi terutama terkait pelonggaran aktivitas masyarakat yang terbatas selama pemberlakuan PPKM. Pelonggaran aktivitas ini dilakukan agar kondisi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat semakin pulih. Disisi lain, penguatan terhadap indikator kapasitas respon seperti 3 T dan 5 M serta percepatan program vaksinasi terus diperkuat oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai elemen seperti TNI/Polri,





organisasi masyarakat dan berbagai komunitas. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru juga diterapkan pada berbagai sendi kehidupan masyarakat, seperti aktivitas kemasyarakatan, ekonomi, Pendidikan, transportasi, pariwisata dan lain- lain. Sehingga diharapkan pemulihan ekonomi paska-pandemi secara perlahan dapat terwujud;

2. Pada sidang umum PBB ke-70 pada tanggal 25-27 September 2015, telah disepakati kerangka pembangunan global yang baru yakni *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang disepakati oleh 192 negara termasuk Indonesia yang kemudian diadopsi sebagai *platform* pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut. Hal tersebut menjadikan sebuah tantangan dimana pada tahun pada Tahun 2030 cita-cita dari *SDGs* yang tertuang dalam 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator harus dicapai. Upaya percepatan pencapaian Target *SDGs* menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan ditingkat Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Provinsi Lampung telah menindaklanjutinya melalui Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pemenuhan target-target dalam *SDGs* penting karena bersinergi dengan target peningkatan kualitas sumber daya manusia di Provinsi Lampung;
3. Dengan terbentuknya kawasan ekonomi terintegrasi di wilayah Asia Tenggara yang dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau *ASEAN Economic Community* (AEC), memberikan peluang dan ancaman bagi Indonesia. Mengingat Indonesia memiliki jumlah penduduk yang terbesar di Asia Tenggara. Total jumlah penduduk Indonesia hampir 40% dari total keseluruhan penduduk ASEAN. Fakta ini bisa dijadikan acuan untuk menguasai pasar ASEAN namun harus didukung dengan pembangunan disektor pendukung investasi dan pembangunan sumber daya manusia. Terlebih saat ini Indonesia mendapatkan bonus demografi, termasuk di Provinsi Lampung. Untuk itu Provinsi Lampung mulai mempersiapkan berbagai program yang ditujukan untuk meningkatkan





kualitas sumber daya manusia terutama melalui pemenuhan aspek pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial dan infrastruktur dasar;

4. Posisi strategis Provinsi Lampung yang berada pada alur laut kepulauan Indonesia dan menjadi pintu gerbang Sumatera, menyebabkan Provinsi Lampung memiliki keuntungan dan tantangan tersendiri yang harus dimanfaatkan secara maksimal demi tercapainya pembangunan daerah yang optimal, melalui pembangunan sektor infrastruktur, sektor perhubungan dan sektor Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
5. Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 terdapat isu strategis yang telah diidentifikasi dengan memastikan bahwa prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dimuat sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Selain itu, hal tersebut juga dilakukan sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui rekomendasi yang diintegrasikan kedalam Program Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dalam pelaksanaan pembuatan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung, dilakukan metode analisis dimana Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diuji silang terhadap 6 muatan Lingkungan, Gap antara capaian TPB Provinsi Lampung di tahun 2019 terhadap target TPB Nasional di tahun 2024 serta uji silang terhadap isu yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Provinsi Lampung.





Dari analisis tersebut menghasilkan 5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Prioritas yaitu :

a. TPB 1 tanpa kemiskinan

Pada *goals prioritas pertama* mengenai tanpa kemiskinan, persentase tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung pada tahun 2019 sebesar 12,3% mengalami peningkatan menjadi 12,76%. Dalam hal ini jika pemerintah Provinsi Lampung tidak melakukan intervensi, Provinsi Lampung akan menghadapi permasalahan kemiskinan sebesar 10,03% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sepadan dengan *goals* TPB Nasional yakni sebesar 4%.

b. TPB 2 tanpa kelaparan

Pada *goals prioritas kedua* mengenai tanpa kelaparan, prevelensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan di Provinsi Lampung jika tidak dilakukan intervensi akan mencapai 30,33% di tahun 2019 dan akan menurun hingga 26,5% di tahun 2030. Kondisi ini tidak sesuai dengan target TPB yang mana di tahun 2030, Indonesia perlu menekan indikator ini menjadi 4,7%.

c. TPB 9 industri, inovasi dan infrastruktur

Pada *goals prioritas ketiga* mengenai industri, inovasi, dan infrastruktur, pemerintah Provinsi Lampung perlu memperhatikan kondisi jalan yang mana terdapat 354.74 km jalan yang berstatus rusak berat. Pada tahun 2020, 75,94% jalan dinyatakan mantap dan akan terus tumbuh mencapai 100% di tahun 2030 tanpa intervensi. Namun untuk menjamin kondisi yang terus membaik di setiap tahunnya, perlu adanya intervensi dengan meningkatkan 2,41% tingkat kemantapan jalan di setiap tahunnya.

d. TPB 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan

Pada *goals prioritas keempat* mengenai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, di tahun 2019 realisasi sebesar 1,03% dan akan berakhir di 2030 dengan proyeksi realisasi di 2030 sebesar 9,49%. Perlu adanya intervensi peningkatan sebesar 4,65% setiap tahunnya dalam bentuk peningkatan akses





hunian yang layak dan terjangkau, peningkatan jumlah desa tangguh bencana, dan penanganan sampah perkotaan.

e. TPB 10 berkurangnya kesenjangan

Pada *goals* **prioritas kelima** yakni berkurangnya kesenjangan, pemerintah provinsi lampung perlu memperhatikan persentase penduduk miskin provinsi yang mana pada 2020 telah mencapai 12,34% dengan target Nasional sebesar 6,25%. hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Lampung sedang mengalami kesenjangan yang begitu jauh dari target Nasional. Pemerintah Provinsi Lampung perlu melakukan penurunan sebesar 1,23% setiap tahunnya dengan memberikan peningkatan jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial.

6. Terdapat ketimpangan wilayah Timur – Barat, Utara – Selatan dan Darat–Laut/Pesisir di Provinsi Lampung. Wilayah Timur dan Selatan Lampung berkembang cukup pesat dibanding wilayah Barat dan Utara Lampung. Wilayah Barat memiliki kondisi topografi yang cukup berat dan sebagian besar wilayahnya diperuntukkan untuk kawasan konservasi sedangkan wilayah utara lebih kepada masalah aksesibilitas yang kurang mendukung. Daerah pesisir dan pedesaan termasuk daerah produksi hasil pertanian maupun perikanan ternyata justru menjadi kantong-kantong kemiskinan yang harus menjadi prioritas untuk ditangani. Kedepannya, perlu dilakukan pemerataan melalui pembangunan infrastruktur dasar dan kewilayahan agar kesenjangan pembangunan yang terjadi dapat semakin dikurangi;
7. Berdasarkan Perda Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang RTRW Provinsi Lampung 2009-2029, Provinsi Lampung memiliki satu Pusat Kegiatan Nasional, yaitu Kota Bandar Lampung, enam Pusat Kegiatan Wilayah yaitu Metro, Kotabumi, Kalianda, Liwa, Menggala, Kota Agung dan 22 Pusat Kegiatan Lokal. Arah pengembangan wilayah berupa Pola dan Struktur Ruang akan berpedoman kepada pengembangan pusat-pusat kegiatan tersebut;





8. Provinsi Lampung memiliki 2 kawasan strategis dilihat dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu: Metropolitan Bandar Lampung dan sekitarnya dan Kawasan Pariwisata pantai barat, pengembangan sub kawasan pendukung antara lain :
1. Kawasan Pelabuhan Terpadu Panjang di Kota Bandar Lampung;
 2. Kawasan pusat pemerintahan kota baru di Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Kawasan Aeropolitan Natar di Kabupaten Lampung Selatan;
 4. Kawasan Teluk Lampung di Kabupaten Lampung Selatan;
 5. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran;
 6. Kawasan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Teluk Ratai di Kabupaten Pesawaran;
 7. Kawasan pendidikan Universitas Lampung – ITERA– UIN Raden Intan di Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Selatan; dan
 8. Kawasan pendidikan terpadu di Kota Metro.

Dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ada 2 kawasan strategis, yaitu: Taman Hutan Raya (Tahura) Wan Abdul Rachman di Kota Bandar Lampung dan Pesawaran; dan Kawasan Resapan Air Bendungan Batutegi di Tanggamus. Penetapan Kawasan Strategis Provinsi tersebut menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi dinamika pengembangan wilayah akibat pertumbuhan dan penyebaran penduduk terutama di Kota Bandar Lampung yang sudah meningkat sangat pesat;

9. Selain kawasan strategis provinsi, pengembangan kawasan industri di Provinsi Lampung juga belum optimal. Terdapat 9 (sembilan) kawasan Industri yang akan dikembangkan, antara lain :
- a. Pembangunan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus;
 - b. Pembangunan Kawasan Industri Way Pisang di Lampung Selatan;
 - c. Pengembangan Kawasan Industri Mesuji;
 - d. Pengembangan Kawasan Industri Sulusuban di Lampung Tengah;
 - e. Pengembangan Kawasan Industri Way Kanan;





- f. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang Barat;
 - g. Pengembangan Kawasan Industri Tulang Bawang;
 - h. Pengembangan Kawasan Industri Lampung (KAIL II) di Lampung Selatan;
 - i. Pengembangan Kawasan Industri Ketibung di Lampung Selatan;
10. Alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian cukup tinggi sehingga mengancam Provinsi Lampung dalam mempertahankan ketahanan pangan daerah dan lumbung pangan nasional. Masih banyaknya lahan- lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum termanfaatkan secara optimal akan didorong agar lebih produktif dengan tetap memperhatikan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
11. Panjang garis pantai Provinsi Lampung lebih kurang 1.105 km, yang membentuk 4 (empat) wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat (210 km), Teluk Semangka (200 km), Teluk Lampung dan Selat Sunda (160 km), dan Pantai Timur (270 km), memiliki potensi perekonomian baik dari sektor perikanan, pariwisata maupun perhubungan yang perlu dikelola dengan bagi peningkatan perkonomian masyarakat khususnya masyarakat pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Potensi perikanan tangkap dan budidaya di Provinsi Lampung juga menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung;
12. Sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu dilakukan integrasi RZWP-3-K ke dalam RTRW Provinsi Lampung. Integrasi ini berupa penyusunan Materi Teknis Pengaturan Ruang Darat dan Penyusunan Materi Teknis Pengaturan Perairan Pesisir;
13. Isu strategis dan penanganan pada daerah rawan bencana adalah melakukan mitigasi bencana sesuai dengan potensi bencana yang ada pada masing-masing wilayah. Secara umum, di semua kabupaten/kota memiliki potensi





bencana, maka penanganan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar pada saat bencana baik Pra-Bencana, Tanggap Darurat, hingga penanganan pasca bencana mutlak menjadi prioritas;

14. Penduduk Provinsi Lampung yang berdasarkan data BPS Tahun 2020 berjumlah 9.007.848 jiwa, sebanyak 12,76% masih berada dalam kriteria miskin. Angka kemiskinan tersebut masih berada di atas rata-rata persentase penduduk miskin secara nasional. Hal tersebut harus segera diatasi melalui program-program pengentasan kemiskinan yang lebih efektif dan terukur. Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam menurunkan angka kemiskinan bukan hanya menurunkan jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga akar penyebab kemiskinan seperti permasalahan sosial. Sehingga dengan mengatasi akar penyebab kemiskinan secara lebih efektif diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan secara signifikan dan berkelanjutan;
15. Provinsi Lampung merupakan provinsi berpenduduk kedua terbesar di Pulau Sumatera dimana 15 orang dari 100 orang penduduk Pulau Sumatera bertempat tinggal di Provinsi Lampung. Saat ini Provinsi Lampung mengalami bonus demografi yang salah satu keuntungannya adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai sumber daya penopang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Namun keuntungan tersebut harus dapat disikapi melalui program dan kegiatan pendukung peningkatan kapasitas SDM dan penyediaan lapangan pekerjaan: agar bonus demografi tersebut tidak menjadi bencana berupa ledakan pengangguran usia produktif. Sehingga bonus demografi dapat dimaksimalkan untuk memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung;
16. Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang dimulai pada tahun 2015 memberikan dampak pada menurunnya biaya logistik dan juga berdampak pada kenaikan volume perdagangan dan investasi yang akan mendorong penyerapan tenaga kerja dan kenaikan pendapatan masyarakat. Pembangunan





jalan tol ini telah menjadi salah satu solusi dalam pengembangan wilayah melalui konektivitas darat yang semakin mudah terjangkau. Selain itu, dengan adanya jalan tol semakin menambah volume kedatangan wisatawan domestik khususnya dari luar Provinsi Lampung. Sehingga dampaknya adalah semakin menggeliatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Lampung;

17. Perekonomian global meningkat secara gradual, peluang ekspor Lampung untuk dapat meningkat namun hingga saat ini komoditi ekspor Lampung hanya terpaku pada komoditi batubara, CPO, Karet dan kopi, hal ini menyebabkan ekspor Lampung rentang terhadap fluktuasi. Secara umum perlu dirumuskan kembali penajaman dan fokus pengembangan komoditi unggulan Provinsi Lampung terutama komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan yang selama ini memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB Provinsi Lampung. Salah satu tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana pengembangan komoditi unggulan dapat menembus pasar internasional. Untuk itu perlu diatasi melalui diversifikasi baik komoditi maupun negara tujuan ekspor;
18. Semakin maraknya penggunaan teknologi digital, meningkatkan *e-commerce* pada dunia perdagangan yang dapat berdampak meningkatnya daya kreatifitas masyarakat dalam membentuk suatu produk baru dengan cara pemasaran yang lebih baik sehingga menumbuhkan industri usaha kecil menengah. Namun maraknya *e-commerce* berdampak juga pada penurunan tenaga kerja dan kompleksitas risiko sektor keuangan. Untuk itu diperlukan upaya untuk mewujudkan ekosistem ekonomi digital yang mampu mendorong meningkatnya kontribusi sektor ini terhadap PDRB Provinsi Lampung;
19. Sejak keluarnya Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah Tertinggal yang terentaskan. Tahun 2015-2019, maka Provinsi Lampung memiliki 1 (satu) daerah tertinggal, yaitu





Kabupaten Pesisir Barat. Prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah penurunan kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan serta adaptasi mitigasi bencana. Pengalokasian Dana Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Dengan adanya pandemi Covid-19, aparat pemerintah desa juga harus merespon hal tersebut dengan cara meningkatkan ketahanan desa dari berbagai aspek pembangunan;

20. Sebagai wujud dukungan terhadap Program Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, Pemerintah Provinsi Lampung akan melakukan penyesuaian agar Program Merdeka Belajar dapat diterapkan khususnya pada jenjang pendidikan menengah atas yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Lampung.





1.4 Landasan Hukum

Lkj ini disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;





10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun 2022;
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2022;
19. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/28/VI.01/HK/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.





1.5 Inovasi Pemprov Lampung

Inovasi/terobosan menjadi kunci dalam reformasi birokrasi, pembangunan daerah serta perbaikan kinerja pelayanan publik. Pada dasarnya perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses untuk melakukan perubahan

menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah/daerah tertentu dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumberdaya yang ada dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap tetapi tetap berpegang pada azas prioritas.

Adapun inovasi Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2022 adalah:



SIBAJA

(IP Address: 36.91.132.50)

APLIKASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

By. Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Sekretariat daerah Provinsi Lampung

Manfaat:

1. Monitoring dan Evaluasi pengadaan Barang/jasa;
2. Mempermudah pelaporan pengadaan Barang/Jasa.





Dampak:

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja dalam mencari jumlah pekerjaan Non Tender dengan mengakses Aplikasi LPSE sehingga meningkatkan akuntabilitas pada bidang pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

e-SAKIP Terintegrasi

<https://esakip.lampungprov.go.id/>

by. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

e-SAKIP merupakan Sistem Informasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Lampung yang terintegrasi.



Aplikasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, realisasi kinerja dan realisasi anggaran sehingga dapat memudahkan Perangkat Daerah sebagai penghasil data untuk menginformasikan kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, juga sebagai bentuk transparansi kinerja pemerintah kepada masyarakat.

Dampak:

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Provinsi Lampung dengan menyediakan data dan informasi *real time* terkait capaian kinerja dan realisasi anggaran PD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

e-KPB

<https://e-kpb.lampungprov.go.id>

Merupakan aplikasi terintegrasi yang memberikan informasi serta menghubungkan kepentingan pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan dengan tujuan mencapai kesejahteraan petani.



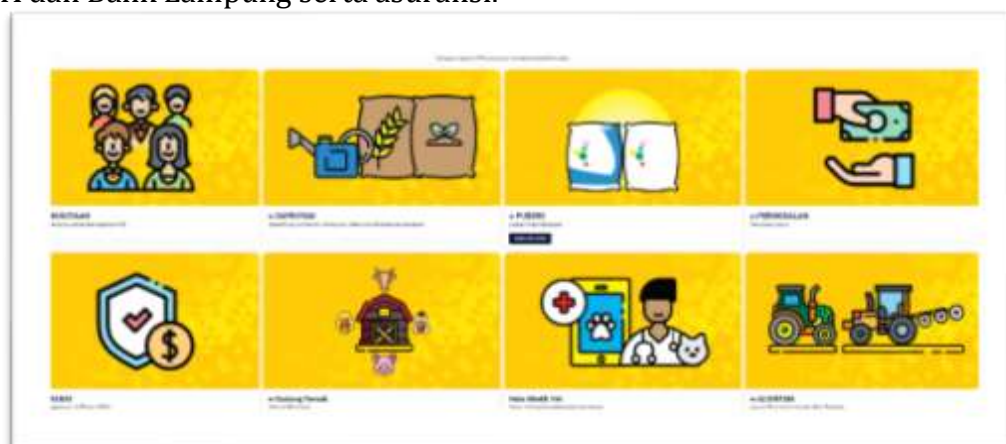


Dampak: meningkatkan nilai tukar petani serta kesejahteraan petani, menghubungkan kegiatan perekonomian antara petani dan pelaku usaha pertanian/peternakan serta meningkatkan pemanfaatan teknologi.

e-Halo Medik Vet: merupakan layanan aplikasi konsultasi antara peternak/masyarakat dengan dokter hewan terkait masalah kesehatan hewan ternak/peliharaan. Didalamnya terdapat fitur konsultasi berbentuk pesan singkat dan fitur pengambilan nomor antrian online bagi pasien UPTD Balai Pelayanan Keswan, Kesmavet dan Laboratorium Pakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung. Aplikasi berbasis smartphone android dan seluruh konsultasi gratis tidak dipungut biaya.

e-Gudang Ternak: merupakan sistem informasi yang memuat data kebutuhan penunjang usaha peternakan (informasi straw mani beku, produsen pakan, pelaku usaha, poultry shop, informasi harga komoditas peternakan). Straw/mani beku merupakan produk dari UPTD BIBD Provinsi Lampung yang telah bersertifikat SNI dan ditampilkan identitas, foto serta produksi dan kontak pemesanan. Sebagai sarana promosi pelaku usaha/UMKM Sektor Peternakan yang telah memproduksi produk potensial sektor peternakan seperti bakso, nugget, madu, telur asin, produk olahan susu, dll yang telah memiliki sertifikat pendukung (NKV, P-IRT, BPOM dll).

e-Permodalan: merupakan layanan online sebagai penghubung akses permodalan (KUR) bagi petani/peternak dengan perbankan. E-Permodalan ditujukan untuk memangkas alur pengajuan KUR dan panduan pengajuan (cara, syarat dan dokumen pendukung) sehingga masyarakat dapat mengakses KUR dari tempat tinggal masing-masing. Bank yang telah bersinergi diantaranya BRI, BNI, Mandiri, Bank RAYA dan Bank Lampung serta asuransi.





1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Lampung Tahun 2022 memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung, Dasar Hukum, Inovasi Daerah dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perubahan RPJMD 2019-2024, IKU Perubahan RPJMD, Perubahan Perjanjian Kinerja 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja, Faktor Pendukung dan Penghambat, Efisiensi dan Efektivitas sesuai dengan Periode Renstra Provinsi Lampung serta Akuntabilitas Keuangan tahun 2022.

BAB IV PENUTUP

Meliputi Simpulan dari Perencanaan Strategis dan Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan Periode Rencana Strategis.





BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun merupakan hasil dari proses penyusunan mulai dari rancangan teknokratik, rancangan awal, integrasi dengan visi misi Gubernur terpilih, Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung dan konsultasi publik, hingga menjadi rancangan akhir. PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung Tahun menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perda Provinsi Lampung tentang PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung yang berisikan

Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran; Strategi dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum dan Program Pembangunan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup, serta Lampiran-Lampiran. PERUBAHAN RPJMD Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung merupakan rangkaian yang berkesinambungan, mulai dari tahap persiapan setelah **Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih dilantik pada tanggal 12 Juni 2019**. Memasuki tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, telah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD untuk mengukur dan mengetahui apakah ada

kebijakan/regulasi pemerintah khususnya berkaitan dengan perencanaan pembangunan yang belum terakomodasi dalam dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung. Pada kesimpulannya, evaluasi tersebut memberikan rekomendasi untuk melakukan perubahan pada dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Memperhatikan perkembangan kondisi nasional dan Provinsi Lampung akibat pandemi COVID-19





yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran Indikator Kinerja Utama pemerintah daerah (IKU pemda), serta Indikator Kinerja

Kunci (IKK) tingkat dampak (*impact*) dan tingkat hasil (*outcome*). Selain itu, perlu juga diperhatikan kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.



1. Visi dan Misi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan *das sollen*, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh *stake holders* dan terkristalisasi sebagai jati diri. Visi umumnya dibangun untuk mendorong semangat seluruh *stake holders* untuk berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai

inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan *stake holders* untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.





Dengan mendasarkan kepada modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi 20 tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025; maka Visi Provinsi Lampung 2005-2025 yaitu:

“RAKYAT LAMPUNG BERJAYA” **(Aman, Berbudaya, maju dan Berdayasaing, Sejahtera)**

Dalam upaya mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2005- 2025, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut:

Gambar 2.1 Visi-Misi Provinsi Lampung Tahun 2019-2024





2. Tujuan, Sasaran dan Indikator PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 dijelaskan bahwa terdapat 8 (delapan) tujuan dengan 15 (lima belas) Indikator Tujuan; 19 (Sembilan belas) Sasaran dengan 20 (dua puluh) Indikator Sasaran/IKU Pemerintah Provinsi Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/28/VI.01/HK/2022 tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/770/B.09/HK/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Penjabaran dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Matrik Tujuan, Sasaran dan Indikator Perubahan RPJMD 2019-2024

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR		
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024			
VISI: Rakyat Lampung Berjaya																				
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai																				
1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	1.1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	74	1.1.1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68	73,1	69	73,1	70	71	72	73	73,3	73,5	73,7	74	74
		1.2	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	76	1.2.1	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	68,67	68,67	72	72,56	73	74	75	76	73	74	75	76	76
		1.3	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	56,3	1.3.1	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	-	-	-	54,3	-	-	-	-	54,8	55,3	55,8	56,3	56,3
Misi 2 : Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik																				
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi	BB	2.1.1	Meningkatnyan kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	CC	CC (60,05)	B	CC(52,03)	B	BB	BB	A	B	B	B	BB	BB
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas																				
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	3.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,6-70,9	3.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	70,18	70,51	72,1	70,65	72,19	72,29	72,39	72,48	70,8	70,95	71,20	71,50	71,50
					3.1.2	meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan Menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,61	12,63	12,64	12,65	12,71	12,78	12,85	12,92	12,66	12,67	12,68	12,69	12,69
						Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)		7,82	7,92	7,8	8,05	7,9	8	8,1	8,2	8,10	8,20	8,30	8,40	8,40





NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
		3.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3,8-4	3.2.1 Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,05	4,03	3,85	4,67	3,26	3,66	3,57	3,48	4-4,5	4,3-4,4	4,0-4,3	3,8-4	3,8-4
4	Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak	4.1 Indeks Perlindungan Anak (IPA)	71,47	4.1.1 Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)			-	65,07	-	-	-	-	67,66	69,57	71,37	73,10	73,10
5	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	5.1 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,41	5.1.1 Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	63,82	69,23	64,24	69,06	64,45	64,66	64,87	65,08	69,10	69,14	69,18	69,23	69,23
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah																		
6	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah pelayanan dasar dan energi	6.1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	78	6.1.1 Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	-	6,01	-	76,045	-	-	-	-	74	76	77	78	78
		6.2 Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	94,19	6.1.2 Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)		88,8	-	90,21	-	-	-	-	91,20	92,31	93,01	94,19	94,19
		6.3 Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	98	6.1.3 Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	92,13	95,76	94	96.5	95	96	97	98	96	97	98	99	99
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan																		
7	Meningkatnya Perekonomian Daerah	7.1 Pertumbuhan Ekonomi	4,5-5,5	7.1.1 Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,25	5,27	-	-1,67	-	-	-	-	2,5-3,5	3-4	3,5-4,5	4,5-5,5	4,5-5,5
				7.1.2 Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	105,83	103,2	106,98	94,73	107,48	107,98	108,48	108,98	101-102	102-103	104-105	105-106	105-106
				7.1.3 Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2,73	3,44	3,0 - 3,5	2	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3,0 - 3,5	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
				7.1.4 Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,01	12,3	11,1	12,76	10,62	10,14	9,66	9,18	12,76-12,4	12,4-11,9	11,9-11,4	11,4-10,9	11,4-10,9





NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	KONDISI AKHIR	SASARAN	INDIKATOR KINERIA SASARAN	KONDISI AWAL		2020		TARGET SEBELUM PERUBAHAN				TARGET SETELAH PERUBAHAN				KONDISI AKHIR
						2018	2019	Target	Realisasi	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama																		
8	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	8.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,51	8.1.1 Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,62	59,28	59,63	66,95	61,15	61,92	62,57	63,32	68,23	68,66	69,09	69,51	69,51
		8.2 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,29%	8.2.1 Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	6,48%	6,28%	-	6,86%	-	-	-	-	6,74%	6,915%	7,066%	7,29%	7,29%
		8.3 Indeks Resiko Bencana	137,2	8.3.1 Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	145,1	146,78	144,7	146,78	144,3	143,9	143,5	143,1	142,9	141	139,1	137,2	137,2





IKU Perubahan RPJMD 2019-2024 yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Perubahan IKU Pemerintah Provinsi Lampung 2019-2024

RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)							
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL			
				2018	2019	Target	Realisasi								
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai															
Terwujudnya masyarakat yang berbudaya luhur dan kondusif (Lampung Merawat Indonesia)	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama, dan keamanan daerah	Indeks Kerukunan Umat Beragama	68	73,1	69	73,1	Terwujudnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya dan demokratis	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	$n_0 = \left(\frac{Z_u + Z_p}{0,5 \ln[(1+r)(1-r)]} \right)^2 + 3$ Keterangan : Z : nilai Z pada interval kepercayaan r : nilai korelasi pengukuran sesuai teori N : jumlah populasi Sehingga untuk mendapatkan nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama yaitu : $n = \frac{n_0}{1 + \frac{(n_0 - 1)}{N}}$			
		Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	68,67	68,67	72	72,56					Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	Meningkatnya kualitas demokrasi di daerah	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	$IDI = \sum_{i=1}^3 P_i I(A_i)$ Keterangan : IDI : Indeks Demokrasi Indonesia Pi : nilai penimbang berdasarkan AHP dari aspek ke-i (i=1,2,3) I(Ai) : indeks aspek ke-i (i=1) : aspek kebebasan sipil (i=2) : hak-hak politik (i=3) : lembaga demokrasi
Pelestarian Warisan Budaya	Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan	Meningkatnya pelestarian Budaya	Jumlah warisan budaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian	33	50	60	53	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \times Indeks D_j)$ Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan				





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
												W_j adalah Bobot Dimensi ke-j D_j adalah Dimensi ke-j, dimana untuk mendapatkan nilai D_j melalui persamaan berikut : $\text{Indeks } D_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ij}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : SX_{ij} adalah nilai indikator i pada dimensi ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator dimensi ke-j Indeks D_j Indeks dimensi ke-j
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik												
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)	CC	B	B	B	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya n kualitas Implementasi reformasi birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja	Opini BPK/WTP (Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP					
			Nilai SAKIP	B	B	BB	B					
		Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	CC	B	B	B					
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas												
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Lampung Sehat)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	70,23	70,18	72,10	70,65	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangu nan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir dan AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat.





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
												$e_x = \frac{T_x}{I_x}$
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,48	12,61	12,64	12,65			Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah	Harapan Lama Sekolah (HLS)	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=d}^n \frac{E_i^t}{p_i^t}$ dimana: HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pda umur a di tahun t E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t p_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t i : usia ($a, a+1, \dots, n$) FK : Faktor Koreksi Pesantren
			Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,8	7,82	7,8	8,05				Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$ dimana: RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah $\text{lama sekolah penduduk}$: lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah N : jumlah penduduk ($i=1, 2, 3, \dots, n$)
									Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$TPT = \frac{a}{b} \times 100\%$ Keterangan : a : jumlah pengangguran





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
												b : jumlah angkatan kerja
		Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Angka)	90,57	90,39	91,03	90,33	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya pengarusutamaan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	$IDG = \frac{1}{3} (Ipar + IDM + Lin + Dist)$ Keterangan : Ipar = Indeks keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Lin-Dist = Indeks distribusi pendapatan
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Angka)	63,60	69,23	64,24	69,06					
			Jumlah Kab/Kota Layak Anak	7	7	6	7	Meningkatkan perlindungan anak dan disabilitas anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	$IPA = \sum_{j=1}^n (W_j \times Indeks K_j)$ Keterangan : IPA adalah Indeks Perlindungan Anak Wj adalah Bobot Kluster ke-j Kj adalah nilai indeks kluster ke-j dimana untuk mendapatkan nilai Kj melalui persamaan berikut : $Indeks K_j = \left(\frac{\sum_{i=1}^n SX_{ji}}{n_j} \right) \times 100$ Keterangan : SX_{ji} adalah nilai indikator i pada Kluster ke-j yang sudah dinormalisasi n_j adalah banyaknya indikator kluster ke-j Indeks K_j Indeks kluster ke-j
			Persentase penyandang disabilitas yang mandiri	1,60	2,58	2,18	7,6					





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATO R TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan dan prestasi di bidang olahraga nasional (Pemuda dan Olahraga Berjaya)	Peringkat pada Event Olahraga Pelajar, Regional (POPWIL) dan Nasional (POPNAS)	6 pop nas	12	4 pop wil	Tidak terlaks ana					
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,06	4,03	3,85	4,67	Pindah ke tujuan Meningkatkan sumber days manusia				
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah												
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Dasar Wilayah (Infrastruktur Lampung Berjaya)	Capaian rata rata peningkatan kondisi Infrastruktur (indeks konektivitas, rasio elektrifikasi rumah tangga dan persentase luas areal sawah terairi)	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	Indeks Konektivitas	6,01	6,01	6,2	-	Meningkatnya Infrastruktur untuk konektivitas wilayah, pelayanan dasar dan energi	Kondisi Kemantapa n Jalan Provinsi	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	$Kj = \frac{\text{Panjang (jalan baik + sedang)}}{\text{total panjang jaringan jalan}} \times 100\%$
		Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi menuju Lampung Terang	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga (%)	92,13	95,76	94	96,5		Tingkat Infrastrukt ur Dasar Wilayah (%)	Penguatan Sarana dan Prasarana dasar wilayah	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah (%)	$I = (0,50)X + (0,50)Y$ $x = 1 \times g$ $Y = 0,12a + 0,2b + 0,06c + 0,04d + 0,03e + 0,55f$ Keterangan : I : Tingkat Pelayanan Infrastruktur Dasar Wilayah X : Capaian infrastruktur dasar
		Meningkatnya kapasitas jaringan Sumberdaya Air	Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi dengan IP > 2	30	29	37	13,75					





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
	Capaian rata-rata peningkatan akses masyarakat terhadap permukiman yang layak sehat (%)	Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap perumahan dan kawasan permukiman yang Layak, Sehat dan Aman	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses Air Minum layak dan aman	71,19	73,3	72,9	79,26					pengelolaan Sumber Daya Air Y : Capaian infrastruktur dasar Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya a : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses terhadap air minum layak" b : Capaian kinerja indikator "penduduk yang memiliki akses aman terhadap sanitasi layak" c : Capaian kinerja indikator "jumlah kawasan kumuh" d : Capaian kinerja indikator "rumah tidak layak huni" f : Capaian kinerja indikator "kesesuaian perencanaan dan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang" g : Capaian kinerja indikator "luas areal sawah daerah irigasi dengan IP>2"
			Persentase rumah tangga yang dapat mengakses sanitasi	64,63	52,48	69,31	73,26					
			Persentase Penurunan Luasan Kawasan Kumuh	0,55	0,53	0,49	0,48					
			Persentase Rumah tidak Layak huni	5,02	4,67	3,98	3,63					
									Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	$\text{Rasio Elektrifikasi} = \frac{Y_{a+b}}{c} \times 100\%$ a = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari PLN b = jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik dari non PLN c = jumlah rumah tangga total
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan												
Meningkatnya Perekonomian Daerah Berbasis pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan Sektor Pertanian	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian	1,01	1,34	1,63	0,66	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$ Keterangan : PE : Pertumbuhan Ekonomi PDB : Produk Domestik Bruto T : Periode tertentu T-1 : Periode sebelumnya
		Meningkatnya pertumbuhan sektor industri dan perdagangan	Pertumbuhan PDRB Sektor industri pengolahan	9,08	8,26	6,23	-5,25					





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Targe t	Realis asi					
			Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	9,08	7,23	7,26	-6,64			Meningkatkan kesejahteraan petani	Nilai Tukar Petani	$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100\%$ Keterangan : I_t : Indeks Harga yang diterima petani I_b : Indeks harga yang dibayar petani NTP : Nilai Tukar Petani
	Laju Inflasi	Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	2,73	3,44	3,0-3,5	2			Menjaga stabilitas harga	Laju Inflasi	$I_n = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}}{\sum_{i=1}^n P_{0i} Q_{0i}} \times 100\%$ Keterangan : I_n : Indeks periode ke-n P_{ni} : Harga barang ke-i pada periode ke-n P_{(n-1)i} : Harga jenis barang ke-i periode ke (n-1) P_{ni}Q_i : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke-n P_{(n-1)i}Q_i : Nilai konsumsi jenis barang ke-i periode ke (n-1) K : Jumlah jenis barang paket komoditi
	Angka Kemiskinan	Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	13,01	12,3	11,1	12,76			Menurunnya Kemiskinan	Angka Kemiskinan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Dimana : a = 0 z = Garis kemiskinan y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i=1, 2, 3, ..., q), y_i < z q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = Jumlah penduduk
	Indeks Williamson	Mengurangi Ketimpangan Antar Wilayah	Indeks Williamson	0,21	0,28	0,21	0,26					
	Indeks Gini	Menurunnya ketimpangan pendapatan dalam masyarakat	PDRB perkapita (juta)	39,86	42,69	45,54	41,62					





RPJMD AWAL (SEBELUM)								PERUBAHAN RPJMD (SESUDAH)				
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	Kondisi Awal		2020		TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL
				2018	2019	Target	Realisasi					
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama												
Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,62	59,28	59,63	66,95	Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH Provinsi $= (30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ Keterangan : IKLH Provinsi : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat Provinsi IKA : Indeks kualitas air IKU : Indeks kualitas udara IKTL : Indeks kualitas tutupan lahan
									Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Menurunnya tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	E = A x EF Keterangan : E = jumlah emisi A = data aktivitas (jumlah bahan-bahan penghasil emisi) EF = faktor emisi
		Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	145,1	146,78	144,7	146,78		Indeks Resiko Bencana	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Resiko Bencana	Risk = Hazard x Vulnerability/Capacity Keterangan : Risiko (risk) : potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, jumlah orang mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan infrastruktur, dan gangguan kegiatan masyarakat secara sosial dan ekonom. Bahaya/Ancaman (hazard) : suatu situasi atau kejadian atau peristiwa yang mempunyai potensi dapat menimbulkan kerusakan, kehilangan jiwa manusia, atau kerusakan lingkungan. Kerentanan (vulnerability) : suatu kondisi yang ditentukan oleh faktor-faktor atau proses-proses fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kemampuan dalam menghadapi bahaya (hazards).





3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Perubahan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dan prioritas yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran;
3. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2022.

Sesuai pernyataan peraturan tersebut di atas, dan sehubungan telah terjadi ketiga kondisi dimaksud yaitu terjadi pergantian pejabat dalam hal ini gubernur maka tentunya merubah arah dan strategi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Lampung. Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 diarahkan pada terwujudnya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang disepakati bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah, termasuk di dalamnya adalah perwujudan janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih pada saat masa kampanye lalu. Hal ini tentu saja merevisi Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur.





Perubahan Perjanjian Kinerja Gubernur Lampung Tahun 2022 yang telah ditandatangani oleh Gubernur Lampung berikut:

Tabel 2.3 Perubahan PK Provinsi Lampung Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Misi 1 : Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai			
1	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	1. Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,5
2	Meningkatkan kualitas demokrasi di daerah	2. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) (Angka)	74
3	Meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya	3. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55,3
Misi 2 : Mewujudkan "Good Governance" Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik			
4	Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi	4. Nilai Reformasi Birokrasi	B
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas			
5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5. Angka harapan hidup (AHH)	70,95
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah	6. Harapan lama sekolah	12,67
		7. Rata-rata lama sekolah (HLS)	8,20
7	Meningkatnya Penyerapan tenaga kerja	8. Tingkat pengangguran terbuka	4,3-4,4
8	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	9. Indeks perlindungan anak	69,57
9	Meningkatnya pengarusutamaan gender	10. Indeks pemberdayaan gender	69,14
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
10	Meningkatnya kondisi pemantapan jalan provinsi	11. Kondisi kemantapan jalan provinsi	76
11	Penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah	12. Tingkat infrastruktur dasar wilayah	92,31
12	Terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi	13. Elektro elektrifikasi rumah tangga	97
Misi 5 : Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan			
13	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	14. Laju pertumbuhan ekonomi	3-4
14	meningkatkan kesejahteraan petani	15. Nilai tukar petani	102-103
15	Menjaga stabilitas harga	16. Laju Inflasi	3±1
16	Menurunnya kemiskinan	17. Angka kemiskinan	12,4-11,9
Misi 6 : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama			
17	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	18. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,66
18	Menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca	19. Penurunan emisi gas rumah kaca	6,915
19	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	20. Indeks resiko Bencana	141





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas pada dasarnya memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor publik dan mendorong pada munculnya tekanan untuk pelaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik yang baik. Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya. Prinsip akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan itu.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan/pemberi amanah. Provinsi Lampung selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Provinsi Lampung yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kinerja masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.





3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program untuk mendukung tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian kinerja sasaran strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja (IKU) sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, Provinsi Lampung menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80 % sampai dengan 90 %	Memuaskan
3	Diatas 70 % sampai dengan 80 %	Sangat Baik
4	Diatas 60 % sampai dengan 70 %	Baik
5	Diatas 50 % sampai dengan 60 %	Cukup
6	Kurang dari 50 %	Kurang



**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO**

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2022 diukur melalui 11 Indikator Kinerja Makro yang terdapat pada table di bawah ini.

Tabel 3.1.2 Indikator Kinerja Makro

INDIKATOR KINERJA MAKRO	REALISASI			TARGET PADA PERUBAHAN RKPD 2022	REALISASI TAHUN 2022	KETERANGAN
	2019	2020	2021			
PERTUMBUHAN EKONOMI (%)	5,26	-1,66	2,77	3,5 - 4	4,28	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Desember Y to Y 2022
INFLASI (%)	3,44	2	2,19	3,0 +- 1	5,51	Capaian Inflasi sampai dengan Desember 2022 Y to Y
PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rupiah)	42,17	39,34	40,95	42 - 43	45,10	Capaian Per Kapita Tahun 2022 45,10 Juta
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,03	4,67	4,69	4,3 - 4,4	4,52	Capaian Agustus 2022 BPS
Tingkat Kemiskinan (%)	12,3	12,76	11,67	11,9 - 12,4	11,44	Capaian September 2022 BPS
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,6	69,7	69,9	70 - 70,3	70,45	Capaian 2022
Indeks Gini	0,331	0,320	0,314	0,308 - 0,324	0,313	Capaian September 2022 BPS
Nilai Tukar Petani (NTP)	96,96	94,73	101,23	102 - 103	104,3	Capaian NTP Tahunan 2022 BPS
Pertumbuhan PAD	5,37	-5,82	14,33	5	13,64	Olahan data Bapenda 2022
Kemantapan Jalan Provinsi (%)	6,01	76,045	75,39	76	76,602	Capaian 2022
Penurunan Presentase Emisi Gas Rumah Kaca	6,28	6,86	6,74	6.915	8,88	Hasil Perhitungan PEP Bappenas 2022

Sumber : Olahan data Bappeda, Maret 2023

Berdasarkan tabel diatas, dari 11 (sebelas) indikator makro pembangunan daerah Provinsi Lampung tersebut menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung, kecuali Presentase PDRB Per Kapita ADHB, Indeks Pembangunan manusia (IPM), Indeks Gini dan peningkatan PAD. Capaian kinerja 4 (empat) Indikator tersebut adalah sebagai berikut;

- 1) Indikator Presentase PDRB Per Kapita ADHB dengan realisasi kinerja pada tahun 2019 adalah 42,17, sedangkan tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 39,34 (2020) dan 40,95 (2021) hal tersebut disebabkan adanya *covid-19*, pada tahun 2022 realisasi sebesar 45,10 melebihi target 42-43. Kontributor terbesar PDRB dari sisi Lapangan Usaha secara kumulatif pada tahun 2022 yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 27,90%. Sedangkan Kontributor terbesar PDRB dari sisi Pengeluaran secara kumulatif pada tahun 2022 yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 61,28%;
- 2) Indikator Indeks Pembangunan manusia (IPM) realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2022 semakin meningkat yaitu dari 69,6(2019), 69,7(2020), 69,9(2021)





dan 70,45(2022) melebihi target di tahun 2022. Pada tahun 2022, IPM Provinsi Lampung mencapai 70,45. Sehingga IPM tahun 2022 meningkat 0,79 persen dibandingkan tahun 2021. Meningkatnya IPM Provinsi Lampung disebabkan oleh peningkatan pada semua aspek IPM, baik kualitas kesehatan (UHH), Pendidikan (HLS/RLS), maupun pengeluaran per kapita yang disesuaikan;

- 3) Indikator Indeks Gini realisasi kinerja dari tahun 2019 sampai tahun 2022 semakin menurun dari 0,3331 (2019), 0,320 (2020), 0,314 (2021) dan 0,313 (2022) melebihi target minimum. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio maka menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Pada tahun 2019 Gini Ratio di Provinsi Lampung sebesar 0,3331 dan terus berfluktuasi hingga mencapai 0,313 pada September 2022. Angka ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2022 yang tercatat sebesar 0,314, sehingga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung tergolong rendah;
- 4) Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2020 mengalami koreksi/ penurunan sebesar -5,82% dibandingkan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 sebesar 5,37%, hal ini disebabkan karena pengaruh wabah Pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya tingkat daya beli masyarakat dan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilakukan pemerintah. Pada Tahun 2021 Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan sebesar 14,33% dibandingkan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2019, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, Program Relaksasi PPNBM yang diberikan oleh pemerintah, pelaksanaan Program keringanan pajak/ pemutihan, serta meningkatnya penerimaan retribusi dari sektor kesehatan. Sedangkan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 13,64% dibandingkan Realisasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021, hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain proses pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi di Provinsi Lampung, kebijakan pemerintah terkait Bahan Bakar Minyak (BBM) Penugasan Khusus dan kenaikan BBM yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), kebijakan pemerintah Pusat pada sektor energi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ikut memberi andil dalam mendorong meningkatnya penerimaan daerah dan penerimaan dari sektor pajak rokok. Realisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2022 apabila dibandingkan





terhadap target maka diperoleh capaian Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 682%.

CAPAIAN IKU PERUBAHAN RPJMD 2019-2024

Berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) tujuan dengan 15 (lima belas) indikator tujuan dan 19 (sembilan belas) sasaran dengan 20 (dua puluh) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut:

Perbandingan hasil pengukuran atas capaian IKU Provinsi Lampung tahun 2019-2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1.3 Capaian IKU Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 s/d 2022

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Realisasi 2019	Realisasi 2020	Kinerja 2021		Kinerja 2022		%	Ket.
					Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai										
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,1	73,1	73,3	72,44		73,5	72,44*	98,56%
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	72,56	72,79	73	80,18		74	80,18*	108,35%
3	Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka	-	55,38	54,8	53,19		55,30	53,19*	96,18%
Misi 2: Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Pelayanan Publik										
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B	CC	B	CC		B	CC	98,18
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas										
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,51	70,65	70,8	70,73		70,95	70,99	100,06 %
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,63	12,65	12,66	12,73		12,67	12,74	100,55%
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,92	8,05	8,1	8,08		8,20	8,18	99,76%
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,03	4,67	4 – 4,5	4,69		4,3-4,4	4,52	97,27%
9	Indeks Perlindungan Anak	Angka		65,07	67,66	65,07		69,57	65,07*	93,53%
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69,23	69,06	69,1	67,96		69,14	67,96*	98,29%
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah										
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	6,01	76,045	74	75,386		76	76,850	101,12%
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	88,8	90,21	91,2	91,22		92,31	96,5	104,54%
13	Rasio Elektrifikasi RumahTangga	Persen	95,76	96,5	96	99,94		97	99,99	103,08%
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan										
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,27	-1,67	2,5 – 3,5	2,79		3-4	4,28	142,67%
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	103,2	94,73	101 – 102	101,23		102-103	104,30	102,25%
16	Laju Inflasi	Persen	3,44	2	3 ± 1	2,19		3±1	5,51	62,25%
17	Angka Kemiskinan	Persen	12,3	12,76	12,76 – 12,4	11,67		12,4-11,9	11,44	107,74%
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama										
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	59,28	66,95	68,23	68,56		68,66	69,10	100,64%
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,28	6,86	6,74	6,74		6,915	12,84	185,68%
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	146,78	146,78	142,9	145,42		141	145,42*	96,87%

Sumber: Olahan Data Biro Organisasi, Februari 2023.

Untuk mengukur progres ketercapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2022, dimana ketercapaian rata-rata kinerja sebesar 104,9% dari keseluruhan indikator. Ketercapaian kinerja lebih dari 100% terjadi pada 12





(dua belas) indikator, 7 (tujuh) indikator capaian kinerjanya antara 90%-100%, dan 1 (satu) indikator capaian kinerjanya kurang dari 90%.

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Analisis pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama Provinsi Lampung tahun 2022 berdasarkan Perubahan RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1 Pencapaian Sasaran 1 (2019-2022)

Sasaran 1											
Sasaran 1		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama									
IKU _(1/20)		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)									
Satuan		Angka									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
68,5	73,1	106,7	69	73,1	105,94	73,3	72,44	98,82	73,5	72,44 (2021)	98,56

Sumber: Kemenag Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya kerukunan antar umat beragama memiliki 1 indikator yaitu **Indeks kerukunan umat beragama** dengan capaian sebesar 72,44 dari target sebesar 73,5 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022**. Angka tersebut merupakan angka realisasi tahun 2021 karena capaian kinerja IKUB tahun 2022 belum dirilis sampai dengan saat ini. Berdasarkan target tersebut persentase capaian kinerjanya adalah 98,56%. Dinamisasi nilai Indeks Kerukunan Umat beragama pada rentan waktu tahun 2019 **(106,7%)**, 2020 **(105,94%)**, sampai dengan tahun 2021 **(98,82%)** sangat tinggi dalam skala rukun. Hal ini karena kondisi kerukunan memang dinamis.

Tabel 3.2.2 Pencapaian Sasaran 1 (2024 – Nasional)

Sasaran 1		
Sasaran 1		Meningkatnya kerukunan antar umat beragama
IKU _(1/20)		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
Satuan		Angka
2024		Nasional
Target	Capaian	72,39
74	97,89%	

Sumber: Kemenag Provinsi Lampung, Februari 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai **97,89%** dan realisasi nasional pada tahun 2021





yaitu 72,39 (realisasi pada tahun 2022 belum dirilis sampai dengan saat ini) sehingga realisasi IKUB Provinsi Lampung lebih tinggi 0,05 poin dari realisasi nasional. Nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) tahun 2019 masuk dalam kategori baik dengan angka Rata rata Nasional 73,83 dan nilai Provinsi Lampung sebesar 73,1 sementara pada tahun 2020 karena masih dalam masa Pandemi Covid 19, maka survey Indeks Kerukunan hanya didapatkan angka rata-rata nasional yaitu 67,46 masih dalam rentan tinggi. Tahun 2021 nilainya berada pada rata-rata nasional 72,39 atau naik 4,93 poin dari tahun sebelumnya.

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah cara untuk menunjukkan wajah toleransi melalui potret kerukunan di Indonesia. Maka, indeks KUB diharapkan dapat menunjukkan wajah terbaiknya.

Indeks kerukunan dimaksud dibentuk dari tiga indikator besar, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Indikator toleransi merepresentasikan dimensi saling menerima menghormati/ menghargai. Berdasarkan data yang bersumber dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung maka diketahui bahwa Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) rata-rata nasional adalah **72,39**.

Rilis indeks KUB ini bernilai strategis sebagai bagian dari solusi. Maka dari itu, konsep moderasi beragama dan memperkuat kondisi kerukunan umat beragama menjadi pilihan tepat.





Sedangkan indeks KUB Provinsi Lampung adalah **72,44** atau berada di atas rata-rata nasional (0,05). Provinsi Lampung menduduki posisi ke-10 menempati posisi ke-10 di Sumatera setelah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Tabel 3.2.3 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan IKUB

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
1. Pemahaman keagamaan tentang kerukunan sebagian masyarakat masih rendah. 2. Terbatasnya supporting anggaran yang bersumber dari APBD	1. Tersedianya para tokoh lintas agama, majelis keagamaan dan ormas keagamaan yang selalu siap mensupport tugas-tugas FKUB. 2. Tersedianya stake holders yang siap bersinergi dengan FKUB untuk mengedukasi dan mengajak umat untuk hidup berdampingan dengan tertib, rukun dan toleran.	1. Mengedukasi masyarakat / umat beragama melalui khutbah dan ceramah keagamaan serta keteladanan para tokoh lintas agama 2. Bersinergi dengan stake holders yang memiliki anggaran memadai dalam pembinaan kerukunan masyarakat seperti Kesbangpol, Kanwil Kemenag, Polda, Kejati, Bawaslu dan lain sebagainya	1. Memanfaatkan media cetak dan media elektronik serta media sosial (koran, media online, radio) untuk mengedukasi masyarakat akan arti pentingnya kerukunan umat beragama. 2. Melakukan rapat rutin Pengurus FKUB setiap bulan untuk mengetahui denyut kerukunan umat beragama. 3. Melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan kerukunan ke 4 kabupaten (Pringsewu, Tanggamus, Lampung Barat dan Pesisir Barat) 4. Bersama Kejati, dalam wadah BAKORPAKEM (Badan Koordinasi Oengawasan Aliran Agama dan Kepercayaan Masyarakat) melakukan rapat secara periodik guna mendeteksi adanya potensi gangguan kamtibmas dari aliran-aliran keagamaan yang menyimpang. 5. Melakukan pemotongan hewan kurban dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat tanpa melihat perbedaan agamanya untuk mengedukasi bahwa kepedulian dan solidaritas sosial itu tidak boleh melihat latarbelakang agama. 6. Menggaungkan semangat moderasi dan toleransi umat beragama melalui giat Liga Mini Soccer Lintas Agama Piala Kapolda yang diikuti oleh utusan dari 15 Kabupaten / Kota (Bersinergi dengan Polda Lampung, Korem 043 Gatam, MUI dan Kanwil Kemenag) 7. Menyelenggarakan Pentas Musik dan Seni Pemuda Lintas Agama untuk menyosialisasikan moderasi dan toleransi beragama khususnya di kalangan generasi muda. 8. Menyapa jemaat misa natal dan menghadiri seremoni Natal Oikumene umat Kristiani Provinsi Lampung.





Tabel 3.2.4 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan IKUB

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
BIDANG PEMBERDAYAAN FKUB			
- SDM Pengurus FKUB yang sebagian sudah senior / sepuh dan sebagian lagi sibuk dengan tugas-tugas kedinasan sehingga tidak aktif. - Minimnya wawasan manajerial dan organisasi sebagian Pengurus FKUB - Belum adanya persamaan persepsi Pengurus dan Oemda tentang tata kelola FKUB yang sesuai dengan regulasi yang ada	- Semangat juang dan kerelawanan/ volunterisme sebagian besar pengurus FKUB dan para pegiat kerukunan - Adanya Iktikad baik untuk meningkatkan wawasan menejerial para pengurus dan semangat pengabdian yang tinggi. - FKUB Lampung telah memiliki PBM Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Pergub No. 20 tahun 2013 tentang FKUB dan AD / ART tentang FKUB Provinsi Lampung	- Menstimulasi para Pengurus untuk terus semangat mengabdikan mewujudkan kerukunan umat sebagai tugas suci dari Tuhan YME - Melakukan sosialisasi tentang tata kelola kelembagaan FKUB berdasarkan PBM, Pergub dan AD /ART FKUB - Melakukan sosialisasi tentang memiliki PBM Nomor 9 dan nomor 8 tahun 2006, Pergub No. 20 tahun 2013 tentang FKUB dan AD / ART tentang FKUB Provinsi Lampung	- Menyusun AD / ART FKUB sebagai panduan acuan dalam mengelola dan melaksanakan tugas-tugas organisasi. - Membekali seluruh Pengurus dengan Buku Saku PBM Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006 beserta Tanya Jawabnya. - Membekali seluruh Pengurus dengan Buku Kompilasi tentang Peraturan Perundang-undangan tentang Kerukunan Umat Beragama. - Mengikutsertakan fungsionaris FKUB mengikuti rakortahunan dengan Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Agama. - Mengadakan rakor dengan pengurus FKUB se Provinsi Lampung - Mengikutsertakan Pengurus FKUB untuk mengikuti pelatihan dan workshop tentang Moderasi Beragama dan memperoleh Sertifikat sebagai Pemateri Moderasi Beragama





Tabel 3.2.5 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Kegiatan yang Telah Dilaksanakan IKUB

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	SOLUSI	KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN
BIDANG PENDIRIAN RUMAH IBADAH			
1. Masih minimnya pengetahuan tentang regulasi yang mengatur pendirian rumah ibadah, baik Pengurus / Panitia Pendirian rumah ibadah, calon pengguna, masyarakat maupun aparatur Pemerintahan 2. Adanya rasa saling curiga di antara warga masyarakat tentang pendirian rumah ibadah yang dikaitkan dengan penyebaran agama tertentu. 3. Adanya fanatisme buta dan pemahaman agama yang sempit tentang eksistensi dan fungsi rumah ibadah. 4. Belum adanya Standard Operasional Prosedure (SOP) Pendirian rumah ibadah.	1. Sudah ada regulasi yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah, baik dalam bentuk Peraturan Bersama Menteri No, 9 dan No, 8 Tahun 2006 maupun dalam Peraturan Gubernur Lampung No, 20 Tahun 2013. 2. Adanya modal sosial berupa masyarakat yang religius dan cinta damai serta nilai-nilai adat istiadat Lampung (Piil Pesenggiri) yang sangat ramah dengan seluruh warga masyarakat Lampung tanpa melihat suku dan agamanya.	1. Mengedukasi kepada masyarakat melalui berbagai media yang tersedia 2. Melakukan dialog tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat 3. Mempersiapkan penyusunan SOP pendirian rumah ibadah	1. Melakukan sosialisasi regulasi tentang pendirian rumah ibadah, baik yang terdapat dalam PBM maupun Pergub. 2. Melakukan monitoring ke FKUB Kabupaten Kota dalam rangka mendeteksi problem pendirian rumah ibadah serta mengantisipasi adanya potensi konflik antar umat beragama. 3. Melakukan kampanye toleransi dan kerukunan umat beragama, termasuk tentang toleran terhadap 4. Melakukan mediasi antar kelompok penganut agama yang berbeda tentang konflik pendirian rumah ibadah (seperti Kasus Tulangbawang)

Sumber : Badan Kesbangpol, Februari 2023

Kanwil Kemenag Provinsi Lampung memberikan rekomendasi/implikasi kebijakan dalam rangka meningkatkan skor indeks KUB adalah sebagai berikut:

1. Memaksimalkan usaha pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik mulai dari tingkat keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat.
2. Memberikan pelatihan tentang cara menahan diri dari tindakan di luar hukum, dan memberikan advokasi hukum bagaimana menggunakan jalur yang tidak melanggar hukum dalam menangani potensi konflik yang dapat meningkat menjadi manifest.





3. Membantu usaha yang dilakukan Pemerintah dan Pemda dalam pemeliharaan kerukunan dan pengantisipasi konflik.
4. Sebagai bangsa majemuk, tak dipungkiri ada banyak potensi integrasi dan potensi konflik di dalam masyarakat Indonesia. Beberapa potensi konflik/ketidarkukunan telah memanifestasi di beberapa daerah, namun secara nasional kondisi kerukunan berjalan baik (rukun).
5. Ada beberapa faktor keagamaan yang dapat memengaruhi kerukunan, namun faktor non-keagamaan lebih berdampak (seperti kesenjangan ekonomi dan dinamika politik).
6. Pemerintah telah dan terus melakukan upaya penanganan konflik keagamaan, mengembangkan budaya damai dan toleransi, serta memperkuat kerangka regulasi bagi kerukunan.
7. Masyarakat (termasuk elemen LSM, media, dan mahasiswa) perlu memperkuat sinergi dalam memelihara kerukunan/keharmonisan masyarakat sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing.

Tabel 3.2.6 Pencapaian Sasaran 2 (2019-2022)

Sasaran 2											
Sasaran 2		Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat									
IKU_(2/20)		Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)									
Satuan		Indeks									
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
70	72,56	103,66	72	72,79	101,09	73	80,18	109,83	74	80,18 (2021)	108,35

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)** dengan capaian sebesar 80,18 dari target sebesar 74 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **108,35%**. Indeks ini merupakan indeks tahun 2021 karena indeks untuk tahun 2022 akan rilis pada bulan Mei 2023. Sedangkan pada tahun 2019 capaian kinerja IDI yaitu 103,66 % dan pada tahun 2020 adalah 101,9%.





Capaian tersebut diperoleh dari tiga aspek sebagai berikut:

Tabel 3.2.7 Aspek Perhitungan IDI Tahun 2019-2020

Provinsi	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi					
	Aspek Lembaga Demokrasi		Aspek Hak-Hak Politik		Aspek Kebebasan Sipil	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
LAMPUNG	79.95	79.22	71.64	63.70	68.55	78.64

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Februari 2023

Sedangkan pada tahun 2021 aspek penilaian IDI adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.8 Aspek Perhitungan IDI Tahun 2021

Provinsi	[Metode Baru] IDI menurut Provinsi	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi		
		Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kesetaraan	Kebebasan
		2021	2021	2021
Lampung	80.18	81.96	81.62	76.64

Sumber: BPS Provinsi Lampung, Februari 2023

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia dengan perhitungan secara tertimbang menggunakan skala 0-100. Semakin tinggi nilai indeks menunjukkan suatu wilayah semakin demokratis dan sebaliknya. IDI tahun 2021 terdiri dari aspek kebebasan, kesetaraan dan kapasitas Lembaga demokrasi.

Hasil pengukuran IDI di Lampung pada tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan aspek pengukuran dari tahun 2020 ke tahun 2021. Metode perhitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. Bobot pada aspek, variable, dan indicator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, LSM, serta pers.

Tabel 1. Nilai Variabel IDI Lampung Tahun 2020

ASPEK	VARIABEL	2019	2020	SELISIH (2020-2019)
KEBEBASAN SIPIL	I. Kebebasan Berhimpun dan Berorganisasi	94,58	100,00	5,42
	II. Kebebasan Berpendapat	32,06	3,47	-28,59
	III. Kebebasan Berkegiatan	71,58	77,04	5,46
	IV. Kebebasan dari Diskriminasi	100,00	62,06	-37,94
HAK-HAK POLITIK	V. Hak Memilih dan Dipilih	86,75	86,50	-0,25
	VI. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	46,67	62,79	16,12
	VII. Pemilu yang Bebas dan Adil	94,19	94,19	0,00
LEMBAGA DEMOKRASI	VIII. Peran DPRD	55,14	76,46	21,32
	IX. Peran Partai Politik	100,00	100,00	0,00
	X. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	47,82	43,04	-4,78
	XI. Peran Peradilan yang Independen	100,00	90,65	-9,35





Tabel 3.2.9 Pencapaian Sasaran 2 (2024-Nasional)

Sasaran 2		
Sasaran 2	Meningkatkan kualitas demokrasi masyarakat	
IKU _(2/20)	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian	78,12
76	105,5	

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Capaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 105,5% dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka Provinsi Lampung unggul 2,06 poin.

Kedudukan Provinsi Lampung apabila dibandingkan dengan IDI Provinsi lain adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.10 Perbandingan IDI se-Sumatera

Provinsi	[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi		
		Kapasitas Lembaga Demokrasi	Kesetaraan	Kebebasan
		2021	2021	2021
Aceh	80.92	75.82	81.41	85.50
Sumatera Utara	77.60	69.63	75.27	88.51
Sumatera Barat	78.51	79.98	79.19	76.19
Riau	75.66	62.83	75.88	88.40
Jambi	72.91	75.91	75.67	66.50
Sumatera Selatan	78.63	72.41	78.51	85.08
Bengkulu	72.73	67.74	71.89	78.81
Lampung	80.18	81.96	81.62	76.64
Kep. Bangka Belitung	74.11	74.93	77.80	68.80
Kep. Riau	79.53	68.21	79.61	90.91

Provinsi Lampung menduduki peringkat tertinggi ke-2 setelah Provinsi Aceh di Pulau Sumatera.





Tabel 3.2.11 Perbandingan IDI se-Indonesia

Provinsi	[Metode Baru] Aspek Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Provinsi			[Metode Baru] Indeks Demokrasi Indonesia menurut Provinsi
	Aspek Kapasitas 2021	Aspek Kesetaraan 2021	Aspek Kebebasan 2021	2021
Aceh	75.82	81.41	85.50	80.92
Sumatera Utara	69.63	75.27	88.51	77.60
Sumatera Barat	79.98	79.19	76.19	78.51
Riau	62.83	75.88	88.40	75.66
Jambi	75.91	75.67	66.50	72.91
Sumatera Selatan	72.41	78.51	85.08	78.63
Bengkulu	67.74	71.89	78.81	72.73
Lampung	81.96	81.62	76.64	80.18
Kep. Bangka Belitung	74.93	77.80	68.80	74.11
Kep. Riau	68.21	79.61	90.91	79.53
DKI Jakarta	70.69	85.67	89.27	82.08
Jawa Barat	77.93	72.99	89.71	79.72
Jawa Tengah	78.63	77.68	87.90	81.15
DI Yogyakarta	80.74	87.29	74.31	81.21
Jawa Timur	74.81	81.14	88.11	81.31
Banten	66.65	78.48	82.26	75.93
Bali	63.92	77.25	84.62	75.35
Nusa Tenggara Barat	59.10	80.15	77.41	72.69
Nusa Tenggara Timur	58.17	74.16	87.99	73.42
Kalimantan Barat	68.46	72.83	81.15	74.03
Kalimantan Tengah	68.02	75.07	76.09	73.17
Kalimantan Selatan	76.32	79.00	70.13	75.41
Kalimantan Timur	77.90	76.67	89.46	81.02
Kalimantan Utara	75.11	80.14	82.78	79.38
Sulawesi Utara	78.67	79.80	82.92	80.41
Sulawesi Tengah	72.38	70.39	92.76	77.95
Sulawesi Selatan	63.85	73.06	88.18	74.85
Sulawesi Tenggara	69.33	84.09	79.28	77.96
Gorontalo	67.18	81.46	81.57	77.01
Sulawesi Barat	62.80	81.75	67.24	71.30
Maluku	58.74	79.57	59.36	66.76
Maluku Utara	58.08	68.08	80.61	68.82
Papua Barat	56.10	67.84	82.47	68.68
Papua	62.15	62.30	75.64	66.39

Sumber : BPS Provinsi Lampung, Februari 2023

Sedangkan jika dibandingkan dengan capaian IDI se-Indonesia, Provinsi Lampung menduduki peringkat ke-8.





Beberapa faktor pendukung, penghambat dan solusi dalam pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.12 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi dalam IDI

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1) Berita-Berita dari Koran maupun dari Media Sosial; 2) Berita yang bersumber dari BPS 3) Laporan-Laporan yang masuk dalam Aspek Indikator IDI.	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah dan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul, berserikat, kebebasan berpendapat dan menjalankan ibadah dengan alasan gender, etnis dan kelompok; 2. Hak memilih atau dipilih terhambat (Ketiadaan/kurangnya fasilitas sehingga penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak pilih) 3. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu terhadap kecurangan dalam penghitungan suara 4. Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif 1 5. Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif 1 6. Keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	Dalam mengatasi hambatan, solusi yang dapat dilaksanakan dilaksanakan Membentuk Tim Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang didalamnya terdiri dari beberapa unsur/lembaga terkait yang masuk dalam Aspek Indikator IDI, serta melakukan Rapat Tim Pokja IDI dan sosialisasi ataupun FGD IDI terkait bagaimana caranya menaikan nilai IDI setiap Tahunnya terkhusus untuk Provinsi Lampung setiap Tahunnya.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung)	1. Rapat Tim Pokja Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung 2. FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung





Tabel 3.2.13 Pencapaian Sasaran 3 (2019-2022)

Sasaran 3											
Sasaran 3	Meningkatkan Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya										
IKU _(3/20)	Indeks Pembangunan Kebudayaan										
Satuan	Angka										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	55,38	-	54,8	53,19	97,06	55,3	53,19 (2021)	96,18

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya pelestarian dan pemanfaatan budaya memiliki 1 indikator **Indeks Pembangunan Kebudayaan** dengan capaian sebesar 53,19 dari target sebesar 55,3 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **96,18%**. Indeks ini merupakan indeks tahun 2021. Pada tahun 2020 realisasi indeks pembangunan kebudayaan sebesar 55,38, meskipun realisasi menurun namun capaian kinerja dari tahun 2020 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami penurunan karena realisasi tahun 2022 belum dirilis.

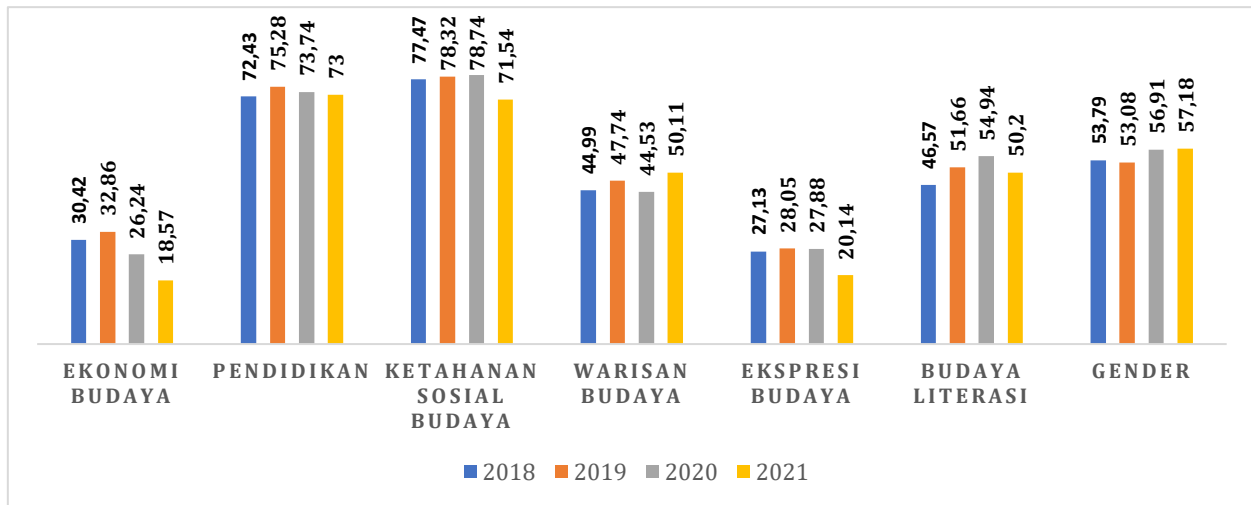
Tabel 3.2.14 Pencapaian Sasaran 3 (2024-Nasional)

Sasaran 3		
Sasaran 3	Meningkatkan Pelestarian dan Pemanfaatan Budaya	
IKU _(3/20)	Indeks Pembangunan Kebudayaan	
Satuan	Angka	
2024		Nasional
Target	Capaian	51,9
56,3	94,47	

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Realisasi Provinsi Lampung lebih unggul 1,29 poin jika dibandingkan dengan realisasi nasional dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerja sebesar 94,47%.





Sumber : Olahan data Bappeda, Februari 2023

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan bukan hanya mampu berperan terhadap peningkatan taraf perekonomian dan kesejahteraan semata, akan tetapi mampu memberikan investasi tersendiri terhadap peradaban bangsa. Menyadari hal tersebut, pembangunan kebudayaan mulai menjadi perhatian tersendiri guna mendorong terwujudnya pembangunan nasional, salah satunya melalui IPK. Sebagai salah satu instrumen yang mampu mengukur sejauh mana keberhasilan pembangunan kebudayaan secara komprehensif, IPK merupakan wujud nyata perhatian pemerintah bersama para pemerhati budaya dalam menjaga sinergitas kontribusi unsur kebudayaan pada pembangunan nasional.

IPK disusun dari beberapa Dimensi diantaranya Dimensi Ekonomi Budaya, Pendidikan, Ketahanan Sosial Budaya, Warisan Budaya, Ekspresi Budaya, Budaya Literasi, dan Gender. Untuk dapat meningkatkan nilai IPK, pemerintah setempat perlu untuk melaksanakan program-program terkait dimensi tersebut. Dengan kerja keras pemerintah dan dukungan dari masyarakat setempat diharapkan dapat mencapai hasil yang optimal.





Tabel 3.2.15 IPK Provinsi Lampung 2018-2021

Dimensi	Nilai			
	2018	2019	2020	2021
Ekonomi Budaya	30,42	32,86	26,24	18,57
Pendidikan	72,43	75,28	73,74	68,71
Ketahanan Sosial Budaya	77,47	78,32	78,74	66,83
Warisan Budaya	44,99	47,74	44,53	46,63
Ekspresi Budaya	27,14	28,05	27,88	27,13
Budaya Literasi	46,57	51,66	54,94	54,29
Gender	53,79	53,08	56,91	58,55
Total	54,33	56,57	55,38	53,19

Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional. IPK merupakan instrumen disusun Kemendikbud bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Indeks ini diperlukan untuk mengukur pencapaian pembangunan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Penyusunan IPK mengacu pada kerangka pengukuran kebudayaan yang disusun UNESCO yaitu Culture Development Indicators (CDIs) serta menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah. IPK terdiri dari 31 indikator dalam tujuh dimensi pengukuran, yaitu ekonomi budaya, Pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Metodologi dan sumber data ini dikembangkan secara nasional dari 34 provinsi di Indonesia.

Upaya Pemerintah Provinsi Lampung dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. **Dimensi Ekonomi Budaya**

Pemerintah Provinsi Lampung memberikan dukungan kepada Dewan Kesenian Lampung, salah satunya dengan pemberian bantuan dana kepada Dewan Kesenian Lampung untuk pelaksanaan kegiatan dan operasional 1 Sekretariat





Dewan Kesenian Lampung dan 7 Komite DKL yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2021.

2. **Dimensi Ekspresi Budaya**

Pemerintah Provinsi Lampung juga mengadakan kegiatan Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) yang dipresentasikan dalam bentuk pameran/pementasan dengan melibatkan publik (guru, tenaga pendidik, komite sekolah, masyarakat di sekitarnya) untuk diapresiasi, selain itu kegiatan Temu Karya Taman Budaya yang pada Tahun 2021 Provinsi Lampung sebagai tuan rumah penyelenggaraan kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia XX.



Pembukaan kegiatan Temu Karya Taman Budaya Se-Indonesia XX

3. **Dimensi Ketahanan Sosial Budaya**

Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan pembinaan dan pelatihan aliran kepercayaan yang diikuti oleh anggota aliran kepercayaan di Provinsi Lampung.

4. **Dimensi Warisan Budaya**

Pemerintah Provinsi Lampung setiap tahun melaksanakan pengusulan warisan budaya benda tak benda untuk dapat ditetapkan secara nasional. Sampai Tahun 2021 Warisan Budaya Benda Tak Benda yang teregistrasi Nasional sebanyak 54 warisan budaya benda dan tak benda.



Tabuhan Kelintang Talo Balak





Tabel 3.2.16 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1. Penentuan program kegiatan prioritas; 2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara optimal; 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan instansi yang terkait.	1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; 2. Keterbatasan anggaran bidang kebudayaan untuk mendukung peningkatan pembangunan kebudayaan yang lebih optimal.	1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten (buruh); 2) Mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas bidang Kebudayaan; 3) Optimalisasi penerapan SPM Bidang Pendidikan 4) Penetapan warisan budaya di tingkat nasional; 5) Pergelaran <i>event</i> kesenian; 6) Perlindungan dan promosi objek bersejarah; 7) Pemeliharaan sarana dan prasarana museum.	1. Program Pengembangan Kebudayaan 2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional 3. Program Pembinaan Sejarah 4. Program Pengelolaan Permuseuman	1. Perlindungan pengembangan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan; 2. Pembinaan sumber daya manusia, lembaga, dan pranata kebudayaan; 3. Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana taman budaya; 4. Peningkatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesenian tradisional; 5. Pemberdayaan sumber daya manusia dan lembaga sejarah lokal provinsi; 6. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga pelestarian cagar budaya; 7. Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi secara terpadu; 8. Peningkatan pelayanan dan akses masyarakat terhadap museum; Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Museum.





Tabel 3.2.17 Pencapaian Sasaran 4 (2019-2022)

Sasaran 4											
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi										
IKU _(4/20)	Nilai RB										
Satuan	Predikat										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
CC	B	120,08	B	CC	86,70	B	CC	97,28	B	CC	98,18

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi memiliki 1 indikator **Nilai Reformasi Birokrasi** dengan capaian sebesar **CC** dari target sebesar **B** yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **98,18%**. Pada tahun 2019 Provinsi Lampung memperoleh predikat B dengan capaian kinerja 120,08%. Namun di tahun berikutnya indeks RB mengalami penurunan dengan predikat CC (52,03). Sehingga capaian kinerja sebesar 86,70. Kemudian pada tahun 2021 masih mendapatkan predikat yang sama dengan nilai lebih besar 6,35 poin yaitu sebesar 58,38 (97,28%). Sehingga meskipun sejak tahun 2020 sampai dengan 2022 memperoleh predikat yang sama (CC), Provinsi Lampung mengalami peningkatan nilai setiap tahunnya.

Tabel 3.2.18 Pencapaian Sasaran 4 (2024-Nasional)

Sasaran 4		
Sasaran 4	Meningkatnya kualitas implementasi Reformasi Birokrasi	
IKU _(4/20)	Nilai RB	
Satuan	Predikat	
2024		Nasional
Target	Capaian	B (65,63)
BB	84,15	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Jika dibandingkan dengan realisasi nasional, Provinsi Lampung memiliki selisih 6,71 poin. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerjanya mencapai 84,15%.



Tabel 3.2.19 Kategori Nilai RB Provinsi Lampung

NO	KATEGORI	NILAI	INTERPRESTASI
		ANGKA	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Sangat Baik
3	BB	>70-80	Baik
4	B	>60-70	Cukup Baik
5	CC	>50-60	Cukup
6	C	>30-50	Buruk
7	D	>0-30	Sangat Buruk

Sumber : PermenPAN dan RB No. 26 Tahun 2020

Berdasarkan kategori penilaian diatas, nilai RB Provinsi Lampung masih berada pada kategori cukup dengan predikat CC.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung dilakukan pada 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi yang memiliki 3 (tiga) sasaran yaitu: Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel; Birokrasi yang Kapabel; Pelayanan Publik yang Prima. Dalam implementasinya maka tahapan awal adalah dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021 dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/41/B.07/HK/2020 tanggal 22 Januari 2020. Sedangkan Susunan Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/250/B.07/HK/2020 tanggal 22 April 2020.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Lampung pada 8 (delapan) area Perubahan Reformasi Birokrasi dengan 3 (tiga) sasaran sebagai berikut :





1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

Birokrasi yang bersih dan akuntabilitas meliputi 3 (tiga) area perubahan yaitu :

1) Manajemen Perubahan, melalui

Penandatanganan Deklarasi *core values* BerAKHLAK dan Employer Branding

#BanggaMelayaniBangsa.

Berdasarkan hasil survey implementasi core values BerAKHLAK bahwa Pemerintah Provinsi Lampung



Sumber : Dokumentasi Biro Organisasi Setda Prov Lampung, 2022

memperoleh Indeks BerAKHLAK 610 dengan Kategori Cukup dan termasuk dalam provinsi yang konsisten dalam menerapkan core values BerAKHLAK.



2) Penguatan Akuntabilitas melalui penyusunan RKT dan Perjanjian Kinerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD), Reviu Dokumen perencanaan, peningkatan implementasi SAKIP, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3) Penguatan Pengawasan melalui Penguatan Zona Integritas WBK/WBBM, Pembinaan SPIP, Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Pembinaan Integritas Aparatur (LHKPN 100%), Unit





Pengendalian Gratifikasi dan Penerapan Saberpungli.

2. Birokrasi yang Kapabel

Birokrasi yang Kapabel meliputi 4 (empat) area perubahan yaitu :

1) **Penataan Organisasi** melalui pembentukan Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung yang Miskin Struktur Kaya Fungsi,

penyederhanaan Birokrasi melalui perubahan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi dengan Jumlah Jabatan Eksesting eselon 3 dan 4 berjumlah 1.158 dan telah disetarakan berjumlah 857 jabatan.



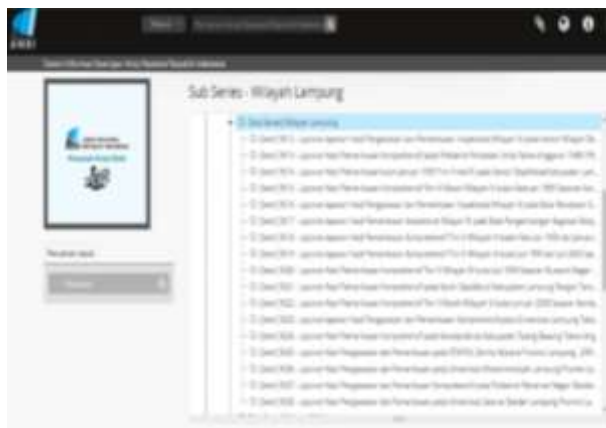
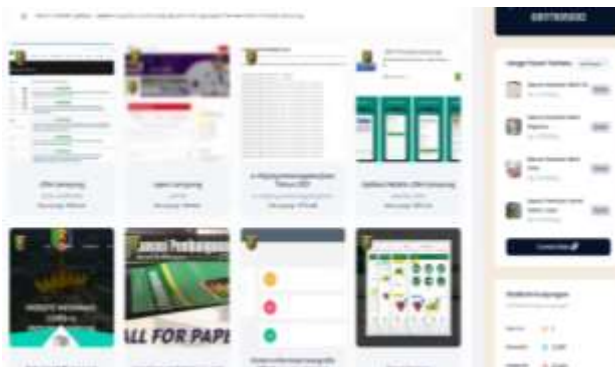
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 100/2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, kepada Menteri Dalam Negeri.

Mendukung Penetapan Jabatan Dalam Rangka Reformasi Birokrasi, khususnya dalam rangka penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

Menetapkan Penetapan Jabatan ke Dalam Jabatan Fungsional sebagai berikut:

Kategori	Jumlah Jabatan	Jumlah Jabatan Fungsional
Eselon III	1.158	857
Eselon IV	1.158	857
Jumlah	2.316	1.714



2) **Penataan Ketatalaksanaan** melalui penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Provinsi Lampung, pengembangan sistem infrastruktur *e-government*/SPBE dengan mengembangkan dan menerapkan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di sebagian besar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Nama dan kode Nomor Standar Operasional Prosedur, Sistem Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik, e-katalog pada Biro pengadaan barang dan jasa, simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

(JIKN) pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) ANRI, absensi yang terintegrasi dengan laporan kegiatan untuk dijadikan dasar penilaian kinerja dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).





- 3) **Penataan Sistem SDM Aparatur:** Aplikasi **SIKAP** (Sistem Informasi Kantor Virtual Pegawai) oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung, mengembangkan aplikasi **Si-Manja** (Sistem Informasi Manajemen Jabatan), Assessment pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama, Penetapan dan Pengukuran kinerja individu ASN di Lingkungan Provinsi Lampung secara online, Sistem Aplikasi Diklat www.siapdiklat.go.id, Proyeksi kebutuhan pegawai Provinsi Lampung 5 Tahun telah diinput ke dalam Sistem E-Formasi KEMENPAN DAN RB, Sistem Informasi kepegawaian terpadu, Aplikasi Sistem Administrasi Pelayanan Kepegawaian Terpadu (SAPKT), e-Pensiun dan e-SLKS.



- 4) **Deregulasi Kebijakan:** Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Raperda, evaluasi kajian dan rewiu peraturan dan produk hukum daerah, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah Provinsi Lampung, Regulasi Penanganan Covid-19.

C. Birokrasi yang memiliki Pelayanan Publik yang Prima

Peningkatan kualitas Pelayanan Publik melalui pemberian layanan informasi Publik yang lebih mudah bagi masyarakat melalui aplikasi PPID Pemerintah Provinsi Lampung, **Anugerah Keterbukaan Informasi Publik**





(KIP) 2021, dengan Predikat **Menuju Informatif dengan Nilai 87.98 dengan kelas B**, Indeks Inovasi Daerah Provinsi Lampung dengan **Predikat Inovatif** dengan **Skor Indeks 50,18**, Sistem Perizinan Online (E-PTSP) DPMPTSP Provinsi Lampung www.simpatik.lampung.com, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dan Petugas Administrator SP4N LAPOR, E-PBBKB, I- Samsat, Mobile-EIS, Aplikasi Samsat Online Nasional (SANMOLNAS), informasi perijinan DPMPTSP www.investasi.lampungprov.go.id, Reservasi Online RSUDAM, Quick Respon Siap RSUDAM, Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Kafe Pelayanan Publik, Penghargaan **IGA Award 2020**.

Tabel 3.2.20 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1) Survei Pengukuran Budaya Kerja ASN Ber-AKHLAK 2) Pelaksanaan RB melalui penilaian mandiri RB (PMPRB) diseluruh Perangkat Daerah 3) Role Model dan Agent of Change di Perangkat Daerah 4) Seluruh Perangkat Daerah menyusun Peta Proses Bisnis dan Pengukuran Kinerja secara bulanan	1. Agen perubahan belum menunjukan hasil nyata dalam mewujudkan perubahan di lingkungan kerja serta penerapan manajemen SDM yang belum berorientasi pada pemetaan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal secara menyeluruh. 2. Sistem aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan belum sesuai dengan performance cascade; 3. <i>Roadmap</i> RB belum dijabarkan ke dalam rencana kerja dan dijabarkan dengan baik.	1. Kebijakan untuk mengoptimalisasikan peran agen perubahan dan meningkatkan kualitas penerapan system manajemen SDM dalam menciptakan budaya kinerja yang cepat, adaptif dan dinamis sesuai dengan karakter layanan utama masing-masing PD; 2. Melaksanakan reviu atas proses bisnis dan evaluasi struktur organisasi yang mengukur jenjang organisasi dengan memperhatikan kinerja organisasi yang akan diwujudkan sesuai mandat dan tujuan organisasi; 3. Menerapkan mekanisme pemberian kompensasi kepada penerima layanan jika kualitas layanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan serta belum adanya reward dan punishment bagi pegawai pelaksana pelayanan; 4. Mereviu <i>roadmap</i> Reformasi Birokrasi.	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah; 3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; 4. Program Penataan Organisasi; 5. Program Kepegawaian Daerah.





Tabel 3.2.21 Pencapaian Sasaran 5 (2019-2022)

Sasaran 5											
Sasaran 5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat										
IKU _(5/20)	Angka Harapan Hidup										
Satuan	Tahun										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
72	70,51	97,93	72,1	70,65	97,99	70,8	70,73	99,90	70,95	70,99	100,05

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat memiliki 1 indikator **Angka harapan hidup** dengan capaian sebesar **70,99** tahun dari target sebesar **70,95** tahun yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah **100,05%**. Realisasi angka harapan hidup pada tahun 2019 (**70,51**), 2020 (**70,65**), 2021 (**70,73**) dan 2022 (**70,99**) mengalami peningkatan. Bila dibandingkan tahun **2021 (99,90%)** maka capaian kinerja meningkat 0,15%.

Tabel 3.2.22 Pencapaian Sasaran 5 (2024-Nasional)

Sasaran 5			
Sasaran 5	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
IKU _(5/20)	Angka Harapan Hidup		
Satuan	Tahun		
2024		Nasional	
Target	Capaian	71,85	
71,50	99,29		

Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Prov Lampung

Posisi indikator ini lebih rendah 0,86 dari realisasi nasional (71,85). Dan apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD capaiannya sebesar 99,29%.

Meningkatnya status kesehatan masyarakat selain ditunjukkan oleh menurunnya angka kesakitan dan kematian, juga ditunjukkan oleh meningkatnya angka harapan hidup. Angka harapan hidup merupakan salah satu indikator mempengaruhi pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM). Umur harapan hidup sendiri didefinisikan sebagai berapa lama rata-rata seorang bayi baru lahir diharapkan hidup bila angka kematian saat ini tidak berubah. Bila angka kematian turun, umur jangka panjang dapat lebih tinggi dari umur harapan hidup. Meningkatnya umur harapan hidup disertai dengan sejumlah faktor mencakup standar kehidupan yang





meningkat, pendidikan yang lebih baik, perbaikan gaya hidup serta akses terhadap pelayanan kesehatan.

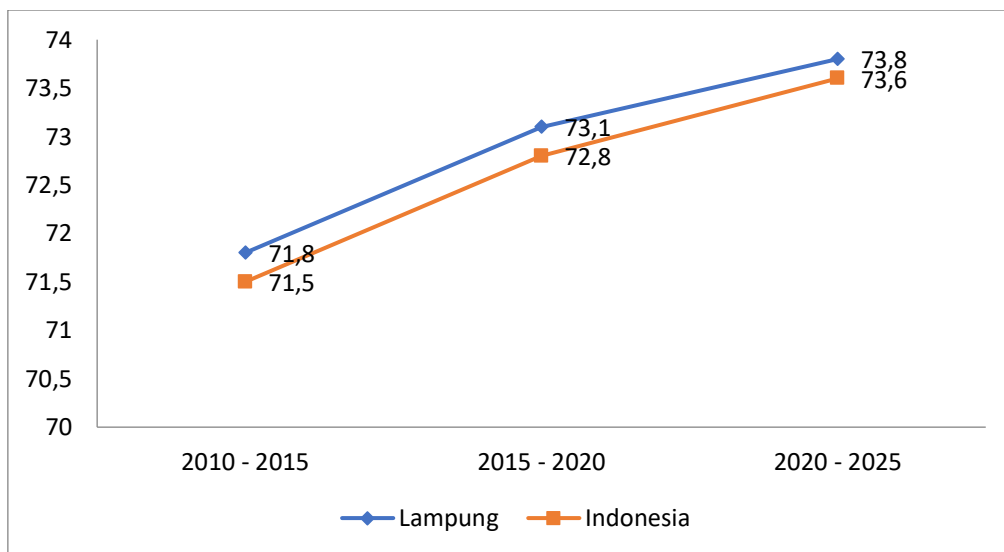
Angka harapan hidup sendiri didefinisikan sebagai berapa lama rata-rata seorang bayi baru lahir diharapkan hidup bila angka kematian saat ini tidak berubah. Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai derajat kesehatan penduduk atas keberhasilan program pemerintah di bidang kesehatan. Meningkatnya Umur Harapan Hidup dipengaruhi terutama oleh faktor seperti akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang lebih baik, perilaku hidup sehat di masyarakat, sanitasi yang baik, perumahan yang sehat, pendidikan yang lebih baik dan penurunan angka kemiskinan. Oleh karena perhitungan Angka Harapan Hidup sangat bergantung kepada jumlah kasus kematian pada kelompok umur tertentu maka angka ini sering dijadikan indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan karena pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai standar seharusnya dapat menurunkan terjadinya kasus kematian seperti kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi Stunting dan meningkatkan Angka Keberhasilan Pengobatan TB Paru.

Berdasarkan estimasi Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung dan Indonesia pada tahun 2000 – 2025 diperkirakan akan meningkat menjadi 73,6 tahun, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :





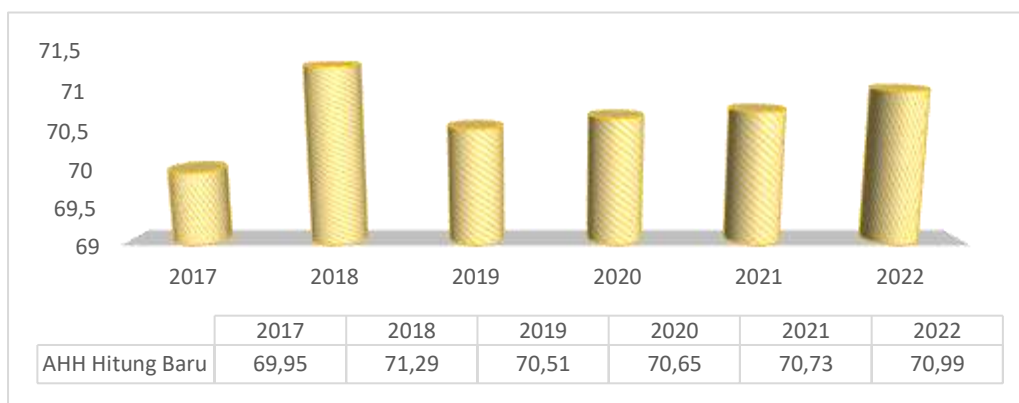
Estimasi Angka Harapan Hidup Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2010-2025



Sumber : Profil Kesehatan Dinkes Prov Lampung

Trend Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung selama tahun 2017 – 2022 setiap tahunnya mengalami peningkatan, seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Angka Harapan Hidup di Provinsi Lampung Tahun 2017 – 2022



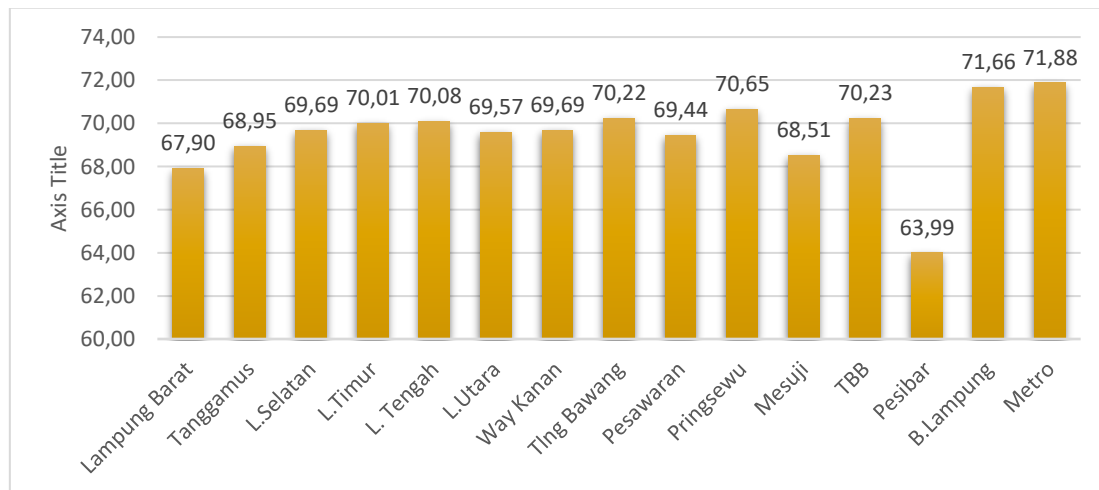
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Th.2022

Bila dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, maka Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Lampung terlihat pada grafik di bawah ini :





Angka Harapan Hidup di Kab/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber : BPS Provinsi Lampung

Grafik di atas menunjukkan bahwa AHH tertinggi ada di Kota Metro dan terendah ada di Kabupaten Pesisir Barat. Pada beberapa kabupaten kesenjangannya tidak begitu signifikan kecuali untuk kabupaten Pesisir Barat yang sangat terlihat kesenjangannya dibandingkan dengan kabupaten lain sehingga diperlukan kajian penyebab rendahnya Angka Harapan Hidup di kabupaten ini. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, perbaikan infrastruktur yang mendukung, perkembangan ekonomi di masyarakat yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat memberikan kontribusi yang signifikan pada beberapa kabupaten dalam peningkatan AHH di kabupaten tersebut. Oleh karena itu pemerintah daerah pada kabupaten dengan AHH yang rendah harus memfokuskan pembangunan kesehatan pada upaya-upaya tersebut yang merupakan faktor yang dianggap paling dominan dalam menentukan AHH di suatu wilayah.





Tabel 3.2.23 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Solusi	Program	Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan
1. Keterbatasan tenaga kesehatan yang kompeten di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK); 2. Keterbatasan anggaran kesehatan terutama di Kabupaten Kota untuk mendukung ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar; 3. Belum adanya sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah pusat dengan Kabupaten/Kota sehingga menghambat pelaksanaan program Pemerintah.	1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar (puskesmas) dan rujukan (rumah sakit) yang terjangkau; 2. Peningkatan kesehatan ibu, anak dan keluarga berencana 3. Pengendalian penyakit 4. Percepatan penurunan <i>stunting</i> dan masalah gizi lainnya 5. Penguatan gerakan masyarakat hidup sehat	Dalam mengatasi hambatan diatas, solusi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan diseluruh fasilitas kesehatan dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang kompeten dan menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai standar termasuk menyediakan obat-obatan yang diperlukan dalam memberikan pelayanan yang sesuai standar serta koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor terkait di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung pelayanan yang komprehensif.	1) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 2) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; 4) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.	Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan harapan hidup adalah Kegiatan validasi pengukuran pada balita <i>stunting</i>; peninjauan sanitasi rumah balita <i>stunting</i>; validasi pengukuran pada balita <i>stunting</i>; rembuk <i>stunting</i> desa; vaksin <i>Covid 19</i> pada ibu hamil; kelas ibu hamil dan P4k; MoU dengan kua kegiatan kespro catin; MoU dengan kua kegiatan kespro catin; Sosialisasi PMBA; Penerimaan bantuan telur dari GPMT; penyusunan rencana aksi daerah dan pemberian bantuan susu dan PMT kepada balita <i>stunting</i> dan balita gizi kurang; deklarasi <i>stunting</i> dan pemberian bantuan PMT untuk bumil; kampanye program <i>stunting</i> bersama lintas program dan lintas sektor; pembinaan kader KPM; rembuk <i>stunting</i> tingkat kabupaten pesawaran; penyusunan regulasi <i>stunting</i>.





Tabel 3.2.24 Pencapaian Sasaran 6 (2019-2022)

Sasaran 6											
Sasaran 6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah										
IKU_(6/20)	Harapan Lama Sekolah										
Satuan	Tahun										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12,55	12,63	100,64	12,64	12,65	100,08	12,66	12,73	100,55	12,67	12,74	100,55

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah memiliki 2 indikator. Indikator pertama adalah **harapan lama sekolah** dengan capaian sebesar 12,74 tahun dari target sebesar 12,67 tahun yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,55%. Realisasi harapan lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 12,63 tahun, pada tahun 2020 sebesar 12,65 tahun, pada tahun 2021 sebesar 12,73 tahun dan pada tahun 2022 sebesar 12,74 tahun sehingga realisasi harapan lama sekolah setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 3.2.25 Pencapaian Sasaran 6 (2024-Nasional)

Sasaran 6		
Sasaran 6	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah	
IKU _(6/20)	Harapan Lama Sekolah	
Satuan	Tahun	
2024		Nasional
Target	Capaian	13,1
12,69	100,39	

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2023

Capaian tahun Harapan Lama Sekolah jika dibandingkan dengan realisasi nasional selisih 0,36 poin dan bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung capaian kinerja mencapai 100,39%.

Tabel 3.2.26 Pencapaian Sasaran 7 (2019-2022)

Sasaran 7											
Sasaran 7	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah										
IKU_(7/20)	Rata-rata Lama Sekolah										
Satuan	Tahun										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7,8	7,92	101,54	7,8	8,05	103,21	8,1	8,08	99,75	8,20	8,18	99,76

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, 2023

Indikator kedua dari sasaran meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan menengah yaitu **Rata-rata lama sekolah** dengan capaian sebesar 8,18 tahun dari





target sebesar 8,20 tahun yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99,76%. Realisasi rata-rata lama sekolah pada tahun 2019 sebesar 7,92 tahun, pada tahun 2020 sebesar 8,05 tahun, pada tahun 2021 sebesar 8,08 tahun dan pada tahun 2022 sebesar 8,18 tahun. Sehingga realisasi rata-rata lama sekolah juga setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Tabel 3.2.27 Pencapaian Sasaran 7 (2024-Nasional)

Sasaran 7			
Sasaran 7	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Pendidikan menengah		
IKU _(7/20)	Rata-rata Lama Sekolah		
Satuan	Tahun		
2024		Nasional	
Target	Capaian	8,69	
8,40	97,38		

Sumber:

Capaian tahun Rata-rata Lama Sekolah jika dibandingkan dengan realisasi nasional selisih 0,51 poin dan bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung capaian kinerja mencapai 97,38%.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Asumsi harapan lama sekolah yaitu kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah untuk umur yang sama saat ini, tujuan harapan lama sekolah adalah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang di harapkan dapat dicapai setiap anak. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu. HLS Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 12,74 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,74 tahun atau setara dengan Diploma I.

Sesuai dengan misi ke 3 yaitu meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas





harapan lama sekolah Provinsi Lampung naik dari tahun 2019 realisasi HLS sebesar 12,63 %, tahun 2020 realisasi HLS sebesar 12,65 %, tahun 2021 realisasi HLS sebesar 12,73 % dan tahun 2022 realisasi HLS sebesar 12,74%.

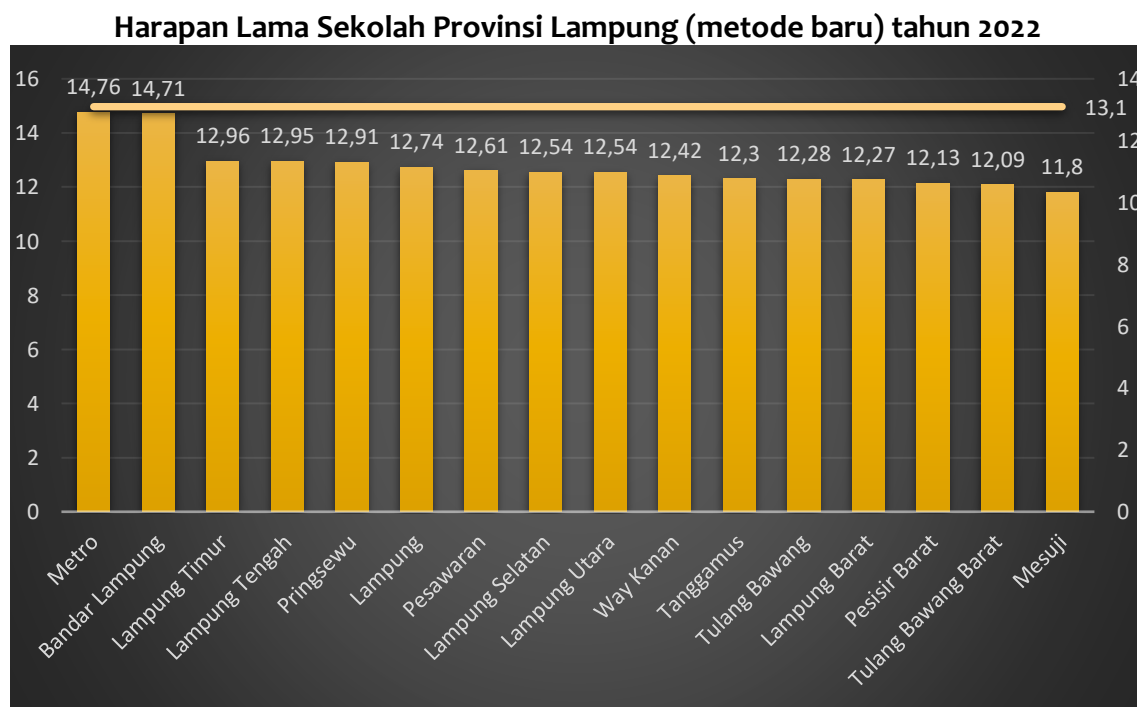
Perbandingan HLS Lampung dan Indonesia



Grafik di samping menunjukkan bahwa meskipun harapan lama sekolah Provinsi Lampung terdapat selisih 0,36 poin, namun harapan lama sekolah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Sumber : Olahan data Bappeda, Februari 2023

Berikut ini tabel harapan lama sekolah di Provinsi Lampung berdasarkan hasil survey BPS Provinsi Lampung tahun 2022.



Sumber: BPS Provinsi Lampung, Februari 2022





Grafik diatas menunjukkan tahun harapan lama sekolah di Provinsi Lampung tertinggi di Kota Metro dengan realisasi 14,76 dan terendah di Kabupaten Mesuji dengan capaian 11,8 yang artinya belum mencapai 12 tahun atau setara menyelesaikan Pendidikan hingga kelas XI. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Mesuji masih rendah tentang Pendidikan. Selain itu sulitnya akses ke sekolah dan infrastruktur yang kurang menunjang menyebabkan rendahnya minat masyarakat terhadap Pendidikan. Pemkab Mesuji diharapkan dapat memprioritaskan Pendidikan masyarakatnya.





Tabel 3.2.28 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Solusi dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1. Penentuan program kegiatan prioritas; 2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara optimal; 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan instansi yang terkait.	1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; 2) Keterbatasan anggaran bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan lebih optimal.	Dalam mengatasi hambatan tersebut, solusi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas bidang Pendidikan.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sedangkan **Rata-rata lama sekolah (RLS)** didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Indikator ini diukur oleh (BPS) melalui metode survey. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Selain itu RLS juga dapat digunakan untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Provinsi Lampung pada tahun 2022 sebesar 8,18 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,18 tahun atau menamatkan kelas VIII.



Aksesibilitas dan mutu pendidikan di Lampung meningkat, rata rata lama sekolah di provinsi lampung tahun 2019 realisasi sebesar 7,92% , tahun 2020 realisasi rata rata lama sekolah mencapai 8,05 %, tahun 2021 realisasi mencapai 8,08% dan tahun 2022 mencapai 8,18%.



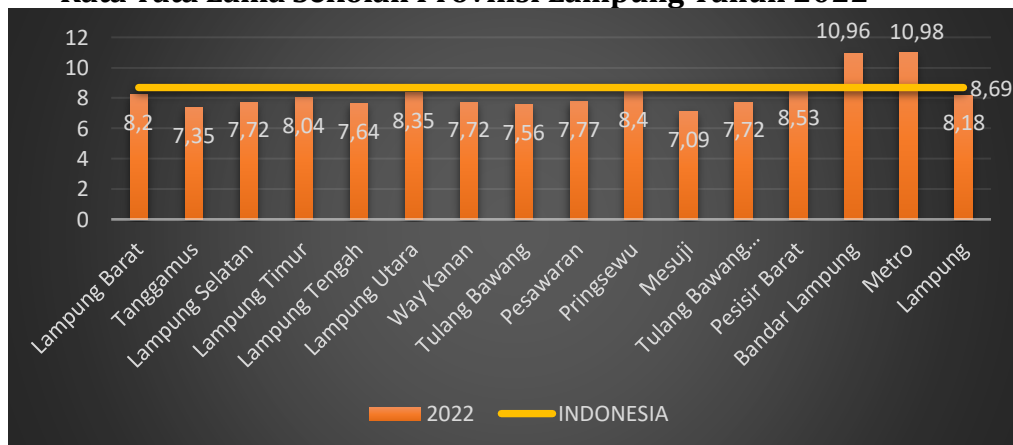


Perbandingan RLS Lampung dan Indonesia



Grafik di samping menunjukkan bahwa meskipun rata-rata lama sekolah Provinsi Lampung terdapat selisih 0,51 poin, namun rata-rata lama sekolah di Provinsi Lampung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Lampung Tahun 2022



Sumber: olahan data Bappeda, Februari 2023

Grafik di atas menunjukkan tahun rata-rata lama sekolah tertinggi di Provinsi Lampung berada di Kota Metro dengan capaian 10,98 dan terendah berada di Kabupaten Mesuji dengan capaian 7,09.





Tabel 3.2.29 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Solusi dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1. Penentuan program kegiatan prioritas; 2. Perencanaan kegiatan yang dilakukan secara optimal; 3. Koordinasi yang baik dengan stakeholder dan instansi yang terkait.	1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana; 2) Keterbatasan anggaran bidang pendidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan lebih optimal.	Dalam mengatasi hambatan tersebut, solusi yang dapat dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai dengan kebutuhan prioritas bidang Pendidikan.	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Tabel 3.2.30 Pencapaian Sasaran 7 (2019-2022)

Sasaran 7											
Sasaran 7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja										
IKU(8/20)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4,17	4,03	103,47	3,85	4,67	82,44	4-4,5	4,69	95,95	4,3-4,4	4,52	97,27

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya penyerapan tenaga kerja memiliki 1 (satu) indikator **tingkat pengangguran terbuka** dengan capaian 4,52% dari target 4,3-4,4% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 97,27%. Pada tahun 2019 persentase realisasi TPT sebesar 4,03%, pada tahun 2020 sebesar 4,67%, pada tahun 2021 sebesar 4,69%. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami peningkatan disebabkan karena adanya pandemi *covid-19*. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.





Tabel 3.2.31 Pencapaian Sasaran 7 (2024-Nasional)

Sasaran 7		
Sasaran 7	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	
IKU ^(8/20)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	5,86
3,8-4	87	

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 87%. Realisasi TPT pada tahun 2022 jauh lebih baik dari realisasi nasional (5,86).

Salah satu masalah pokok yang dihadapi Pemerintah Provinsi Lampung adalah masalah pengangguran dimana pada tahun 2022 TPT Provinsi Lampung mencapai 4,52 persen atau mengalami penurunan 0,17 point dari tahun 2021 sebesar 4.69 persen. Penurunan Pengangguran yang tinggi berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial politik yang juga semakin meningkat. Dengan jumlah angkatan kerja yang cukup besar, arus migrasi yang terus mengalir, serta dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini, membuat permasalahan tenaga kerja menjadi sangat besar dan kompleks. Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih kecil dari jumlah pencari kerja. Selain itu kompetensi pencari kerja juga tidak sesuai dengan pasar kerja dan kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja. Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yang disebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisis ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatan dalam proses ekspor impor, dan lain-lain.

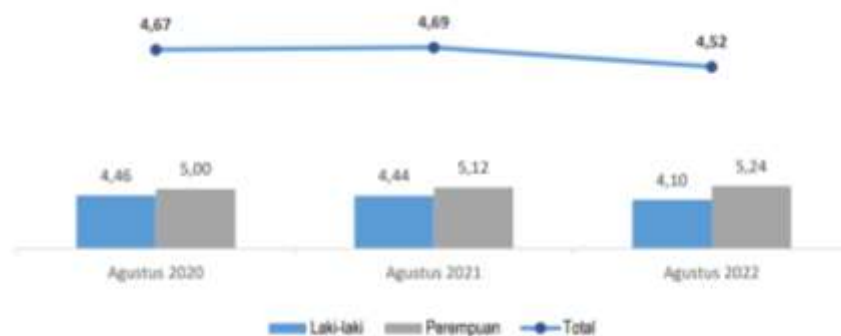
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Pada umumnya TPT didapatkan berdasarkan pada perhitungan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang merupakan survei khusus untuk mengumpulkan data ketenagakerjaan.





Pengumpulan data ketenagakerjaan melalui SAKERNAS mempunyai tiga tujuan utama. Ketiga tujuan tersebut adalah untuk mengetahui : Kesempatan kerja, dan kaitannya dengan pendidikan, jumlah jam kerja, jenis pekerjaan, lapangan pekerjaan dan status pekerjaan; Pengangguran dan setengah pengangguran; Penduduk yang tercakup dalam kategori bukan angkatan kerja yaitu, mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan melakukan kegiatan lainnya. Berdasarkan hasil Sakernas TPT pada Agustus 2022 sebesar 4,52 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2022, TPT mengalami penurunan sebesar 0,17 poin dibandingkan dengan Agustus 2021. Sehingga capaian kinerja tahun 2022 meningkat sebesar 1,32% dari tahun 2021.

TPT Provinsi Lampung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2022



TPT menurut Jenis Kelamin Pada Agustus 2022, TPT laki-laki sebesar 4,10 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 5,24 persen. Jika dibandingkan Agustus 2021, TPT laki-laki turun sebesar 0,34 persen poin dan TPT perempuan turun sebesar 0,12 persen poin.

TPT menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Pada Agustus 2022, TPT dari tamatan SMA Umum merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,93 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan Sekolah Dasar (SD) ke bawah yaitu sebesar 2,74

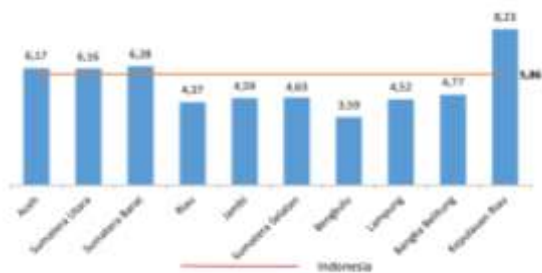
TPT Provinsi Lampung Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022





persen. Dibandingkan Agustus 2021 kenaikan TPT dialami pada jenjang pendidikan SD ke bawah (0,21 persen poin), SMA Umum (1,29 persen poin) dan Universitas (0,95 persen poin), sedangkan untuk jenjang pendidikan lainnya mengalami penurunan.

TPT Provinsi Lampung Menurut Sumatera Tahun 2022



Tingkat pengangguran terbuka menurut provinsi di Sumatera relatif bervariasi. TPT tertinggi dialami Provinsi Kepulauan Riau yakni 8,23 persen. Sedangkan TPT yang paling rendah sekitar 3,59 persen terjadi di Provinsi Bengkulu. TPT Lampung merupakan TPT terendah ketiga di Pulau Sumatera.





Tabel 3.2.32 Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Masalah	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Terbukanya pasar tenaga kerja global 2. Regulasi investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1. Kurangnya Daya Saing Tenaga Kerja 2. Kurangnya informasi dan akses pencari kerja untuk mencari informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja 3. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan. 4. Masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan softskill	1. Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha sesuai dengan potensi daerah pada berbagai sektor melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait 2. Penempatan kerja melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Antara Kerja Antara Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Lokal (AKAL). 3. Koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah, BP2MI dan Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), CPMI/PMI, Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK-SMK dan Perguruan Tinggi untuk membantu sosialisasi serta mendorong perusahaan dalam penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja 4. Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas 5. Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada Pekerja Migran Indonesia bekerjasama dengan instansi terkait/stakeholder 6. Membangun aplikasi informasi pasar kerja online guna memudahkan akses bertemunya pencari kerja dengan pemberi kerja melalui aplikasi di SiGajah Lampung.
2	Tingkat kompetensi angkatan kerja yang relatif rendah	1. Arah kebijakan Pemerintah Daerah "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya saing 2. Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 3. Magang Mandiri Tenaga Kerja Di Perusahaan dan di	1. Ketidaksesuaian (<i>link and match</i>) antara dunia pendidikan dengan dunia kerja 2. Terbatasnya sarana dan Prasarana serta instruktur BLK 3. Belum terakreditasi semua Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	1. Peningkatan Kompetensi para pencari kerja yang akan masuk pasar kerja melalui Pelatihan peningkatan keterampilan, keahlian, kualitas serta uji kompetensi tenaga Kerja (sertifikasi); 2. Pengembangan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Lampung secara maksimal dan memenuhi kebutuhan instruktur di BLK, meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan pelatihan serta kualitas dan kuantitas tenaga pendidik Balai Latihan Kerja yang bersertifikasi; 3. Melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pelatihan kerja swasta (LPKS) untuk menjamin dan menghasilkan lulusan yang kompeten 4. Melakukan koordinasi dengan PD Terkait, Kemnaker RI terkait Pembangunan dan pengembangan fasilitas sarana dan prasarana atau infrastruktur lembaga pelatihan kerja 5. Program Pemagangan tenaga kerja di perusahaan, bekerjasama dengan Forum Komunikasi Jejaring Pemagangan (FKJP) Provinsi Lampung.

Sumber: Disnaker Provinsi Lampung





Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2022 untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung tahun 2022 diantaranya meningkatkan kompetensi Pencari Kerja melalui pelatihan kompetensi di Balai Latihan Kerja dan pemagangan tenaga kerja di perusahaan, memperluas kesempatan kerja didalam dan luar negeri, memberikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja. Perkembangan teknologi dan informasi telah membuat perusahaan dan industri menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung melaksanakan :

A. Perluasan Kesempatan Kerja melalui Program Penempatan tenaga Kerja

Perluasan Kesempatan Kerja merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah pengangguran, kebijakan penempatan tenaga kerja diarahkan untuk pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri, pengembangan kesempatan kerja serta pengendalian penggunaan tenaga kerja asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu penganggur dan setengah penganggur.

Kebijakan ketenagakerjaan bidang penempatan tenaga kerja diarahkan pada perluasan kesempatan kerja, yakni melalui pengembangan pasar kerja, penempatan tenaga kerja dalam negeri, luar negeri, pengembangan kesempatan kerja dan pengendalian penggunaan tenaga kerja asing serta pemagangan tenaga kerja di perusahaan.

Sosialisasi pelayanan kesempatan kerja melalui Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar daerah (AKAD)





Kebijakan tersebut dilaksanakan dalam rangka untuk mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan yaitu masalah pengangguran dan setengah penganggur. Provinsi Lampung juga melakukan koordinasi dengan berbagai Perangkat Daerah, BP2MI dan Perusahaan Penempatan PMI (P3MI), CPMI/PMI, Bursa Kerja Khusus yang ada di SMK-SMK dan Perguruan Tinggi untuk membantu sosialisasi serta mendorong perusahaan dalam penempatan tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja.

Sosialisasi Tata Cara Prosedur Penempatan PMI ke luar Negeri dan Penempatan Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) di Provinsi Lampung Tahun 2022





Pemerintah Provinsi Lampung berupaya memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini diwujudkan dalam pembentukan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Provinsi Lampung. Pada tanggal 28 November 2021, Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mendampingi perwakilan perusahaan CV. Restu Bunda (Batik Tulis Lampung Shiha Ali) Provinsi Lampung dalam acara Pemberian

Penghargaan Nasional Kepada Perusahaan Yang Mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang diserahkan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia.



Penghargaan terhadap Perusahaan yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2022

B. Peningkatan Kompetensi angkatan Kerja melalui Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Upaya-upaya yang telah dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Tahun 2022 untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Lampung tahun 2022 melalui peningkatan kompetensi Pencari Kerja. Perkembangan teknologi dan informasi telah membuat perusahaan dan industri menyesuaikan kebutuhan sumber daya manusia (SDM). Untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja, melalui Balai Latihan Kerja dikembangkan program sesuai dengan pasar kerja lokal dan mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha





Penghargaan terhadap Perusahaan yang mempekerjakan
Penyandang Disabilitas di Provinsi Lampung Tahun 2022





Tabel 3.2.33
Jumlah Lulusan Pelatihan Berbasis Kompetensi melalui
Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
Tahun 2019-2022

NO	UNIT KERJA	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	UPTD-BLK B. Lampung	1.024	1.024	272	272	336	336	448	448
	APBD	144	144	32	32	96	96	96	96
	APBN	880	880	240	240	240	240	352	352
2	UPTD-BLK Kalianda	560	560	128	128	192	192	356	356
	APBD	64	64	0	0	64	64	96	96
	APBN	496	496	128	128	128	128	208	208
	Kerjasama	0	0	0	0	0	0	52	52
3	UPTD-BLK Metro	656	656	28	128	192	192	368	368
	APBD	64	64	0	0	96	96	112	112
	APBN	592	592	128	128	176	176	256	256
4	UPTD-BLK Way Abung	544	544	128	128	272	272	272	272
	APBD	80	80	0	0	80	80	96	96
	APBN	464	464	128	128	128	128	128	128
	Kerjasama	0	0	0	0	0	0	42	42
	JUMLAH	2.784	2.784	656	656	1.008	1.008	1.444	1.444

Sumber : Disnaker Provinsi Lampung





Kondisi Kartu Pra Kerja di Provinsi Lampung

Selain pelatihan, juga terdapat subsidi untuk pekerja terdampak pandemi dengan diluncurkan Kartu Prakerja yang telah dimodifikasi, awalnya hanya untuk bantuan peningkatan kompetensi tapi kemudian ditambah intensif untuk subsidi pandemi.



Pemerintah Provinsi Lampung juga memberikan penganugrahan Penghargaan Sidhakarya kepada sejumlah perusahaan di Provinsi Lampung yang dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan pemerintah kepada perusahaan yang berhasil mempertahankan bahkan mampu meningkatkan produktivitasnya selama 3 tahun terakhir berturut-turut. Dan merupakan upaya dari pemerintah dalam rangka mendorong





perusahaan kecil, menengah maupun besar untuk berlomba-lomba meningkatkan produktivitasnya dan merupakan salah satu indikator penting dalam aktivitas ekonomi Provinsi Lampung.

Tabel 3.2.34 Pencapaian Sasaran 8 (2019-2022)

Sasaran 8											
Sasaran 8	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak										
IKU_(9/20)	Indeks Perlindungan Anak										
Satuan	Angka										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	-	-	-	65,07	-	67,66	65,07	96,17	69,57	65,07 (2020)	93,53

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak memiliki 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Perlindungan Anak** dengan capaian indeks sebesar 65,07 dari target indeks 69,57 yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,17%. Tahun 2019 indikator ini belum menjadi IKU Provinsi Lampung. Angka tersebut merupakan realisasi pada tahun 2020, karena realisasi tahun 2021 sampai dengan saat ini belum dirilis.

Tabel 3.2.35 Pencapaian Sasaran 8 (2024-Nasional)

Sasaran 7		
Sasaran 8	Meningkatnya pemenuhan hak dan perlindungan anak	
IKU _(9/20)	Indeks Perlindungan Anak	
Satuan	Angka	
2024		Nasional
Target	Capaian	66,87 (2020)
73,10	89,02	

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD maka capaian kinerja mencapai 89,02% dan bila dibandingkan dengan realisasi nasional Provinsi Lampung selisih 1,8 poin.

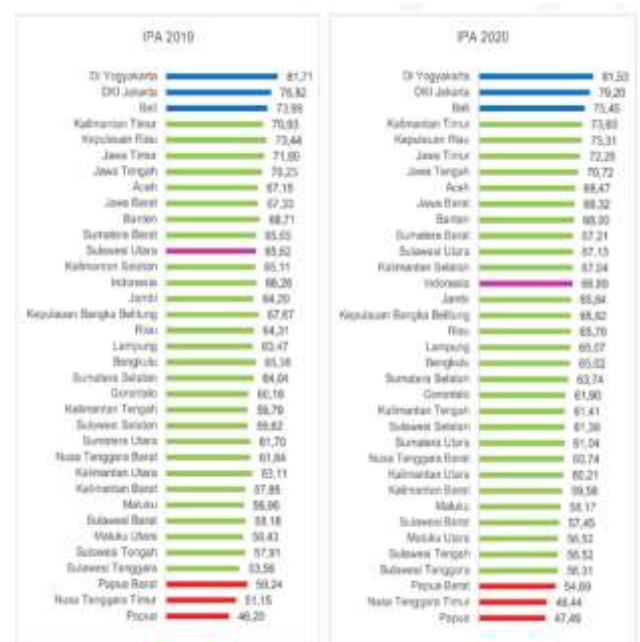




Indeks Perlindungan Anak (IPA) didefinisikan sebagai ukuran baku yang tepat untuk menghitung capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. Sementara ukuran pemenuhan hak anak dapat dilihat melalui Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). Selanjutnya Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar. IPA-IPHA-IPKA menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan perlindungan anak bagi pemerintah pusat maupun daerah. Disusun berdasarkan komitmen Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam membuat program maupun kebijakan yang efektif dan efisien untuk menangani permasalahan, khususnya terkait perlindungan anak.

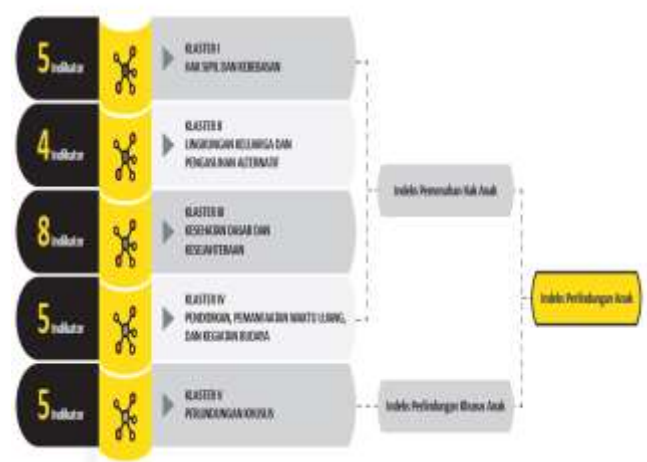
Dalam upaya meningkatkan IPA Provinsi Lampung, stakeholder telah melaksanakan kebijakan di berbagai aspek yaitu:

- Hak Sipil dan Kebebasan** melalui percepatan kepemilikan akta kelahiran (akte kelahiran dan KIA gratis), informasi layak anak pisa baru terbentuk di kota bandar lampung, metro dan kab.tulang bawang, partisipasi anak, partisipasi anak.
- Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif** melalui tidak ada perkawinan anak; semua anak ada yg mengasuh, tidak ada anak terlantar dengan



Indikator dan Kluster Pembentuk IPA, IPHA dan IPKA

Kluster Pembentuk IPA-IPHA-IPKA mengacu pada Konvensi Hak Anak :





meningkatkan puspaga baru terbentuk di 5 kab/kota yakni Pringsewu, Pesawaran, Metro, Pesisir Barat, Bandar Lampung; tersedia infrastruktur harus ramah anak (sarana dan prasana) di ruang publik yang ramah anak, ruang bermain anak (rba) dikab/kota.

- c. **Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan** melalui meningkatkan layanan persalinan di Faskes , menekan jumlah kasus kematian ibu walaupun terjadi peningkatan dikarenakan factor global pandemic covid-19 (jumlah kasus kematian ibu mengalami kenaikan dari 110 kasus menjadi 115 kasus), pemenuhan gizi anak, (prevalensi balita kurus dan sangat kurus di provinsi Lampung mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 4,1%), penekatan dalam cakupan bayi mendapatkan ASI Eksklusif di Provinsi Lampung tahun 2020 (70,1%, dimana angka ini masih di bawah target yang diharapkan yaitu 60%), pelayanan Fasyankes dengan pelayanan ramah anak/Puskesmas ramah anak (± 200 PRA terbentuk di Kab/Kota Anak), meningkatkan layanan air minum dan sanitasi layak, air bersih, perilaku hidup bersih sehat, anitasi total berbasis masyarakat; menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Bebas Iklan Promosi Sponsor (IPS) di ruang publik dan *Smoke Free Home*.
- d. **Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya** melalui penerapan Wajib Belajar 12 Tahun, Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) dan Pusat Kreativitas Anak (Sekolah Ramah Anak Madrasah Ramah Anak)
- e. **Perlindungan Khusus** melalui Koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak, Polres dan Lembaga lainnya sesuai dengan MoU Provinsi Lampung dalam menerapkan program *Save The Children*.





Tabel 3.2.36 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
- Adanya kebijakan daerah terkait dengan percepatan pelaksanaan registrasi kelahiran dan pemberian kutipan akta kelahiran - Adanya sebuah fasilitas yang mencakup beragam sumber informasi layak anak yang terintegrasi - Adanya Kerjasama OPD terkait, Dunia Usaha dan Lembaga lainnya - Adanya Komitmen yang tinggi di setiap kab/kota se provinsi Lampung dalam mencegah adanya perkawinan anak mulai dari pemerintah pusat, daerah sampai masyarakat - Adanya koordinasi PUSPAGA dan Pengadilan Agama dalam upaya pencegahan perkawinan anak - Adanya Komitmen Kepala daerah Perihal KTR dan IPS Rokok melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Perundang-undangan daerah lainnya - Provinsi Lampung memiliki 3 (tiga) orang Fasilitator Nasional (Fasnas) Satuan Pendidikan Ramah Anak (SRA) yang telah di SK Kan oleh KPPPA RI sehingga mampu mendorong peningkatan SRA di Provinsi Lampung.	- Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Akta Kelahiran karena masih ada beberapa kendala status perkawinan. - Minimnya Informasi terkait fungsi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data kelahiran. - Minimnya pendampingan anak dalam mengakses informasi - Masih banyaknya konten yang belum ramah Anak - Forum anak di tingkat kecamatan dan Kelurahan/Desa belum 100% terbentuk - Minimnya Lembaga Masyarakat yang ber peran serta dalam kegiatan anak-anak - Keterbatasan media massa dalam mempublikasikan kegiatan-kegiatan anak-anak. - Minimnya Fasilitas atas informasi layak anak yang disediakan oleh Pemerintah sehingga tidak dapat dijangkau oleh seluruh anak.	- Adanya Pelayanan akte kelahiran gratis - Adanya Pelayanan KIA gratis - Adanya program jemput bola disetiap kab/kota - Adanya Perpustakaan Keliling - Adanya Pojok Baca Digital di OPD - Adanya Rumah Pintar - Adanya Taman Baca - Adanya Perpustakaan Kab/Kota/Desa - Adanya Rumah Inspirasi - Melibatkan FAD dalam proses perencanaan dan pembangunan mulai dari level desa/kelurahan hingga nasional - Memberikan kesempatan berorganisasi (Forum Anak) dan menyuarkan pendapat - Melatih FAD untuk berperan menjadi Pelopor dan Pelapor (2P) - Mengikutsertakan FAD dalam perayaan puncak Hari Anak Nasional (HAN) dan Hari anak Sedunia (HAS)	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	- Monitoring dan Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) di Kab./Kota se Provinsi Lampung - Pelatihan System Evaluasi KLA Tahun 2022 berbasis Web Site bagi Kab./Kota se Provinsi Lampung - Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) KHA, Kelana, dan DEKELA bagi Aparatur Kecamatan Kab/Kota se Provinsi Lampung - Pembahasan Draft MOU SRA dengan Kemenag





Tabel 3.2.37 Pencapaian Sasaran 9 (2019-2022)

Sasaran 9											
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas										
IKU _(10/20)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)										
Satuan	Indeks										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
64,03	69,23	108,12	64,24	69,06	107,50	69,1	67,96	98,35	69,14	67,96 (2021)	98,29

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** dengan capaian indeks sebesar 67,96 dari target indeks 69,14 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 98,29%. Indeks tersebut merupakan indeks tahun 2021. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender mengalami penurunan dari realisasi 69,23 menjadi 69,06. Namun pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi 67,96.

Tabel 3.2.38 Pencapaian Sasaran 9 (2024-Nasional)

Sasaran 9			
Sasaran 9	Meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan kemandirian disabilitas		
IKU _(10/20)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
Satuan	Indeks		
2024		Nasional	
Target	Capaian	76,26 (2021)	
69,23	98,17		

Sumber: Bappeda Provinsi Lampung, Februari 2023





Jika dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,17%. Namun demikian, IDG Lampung berada dibawah rata-rata nasional dengan selisih 8,3 poin.

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan adanya peranan aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik dan digunakan sebagai ukuran untuk menggambarkan kapabilitas dan peranan perempuan dan laki-laki dalam aspek ekonomi. Politik dan pengambilan keputusan. Penghitungan IDG dilakukan pada tiga dimensi yaitu (1) keterwakilan di parlemen dengan indikator proporsi keterwakilan di parlemen laki-laki dan perempuan; (2) pengambilan keputusan dengan indikator proporsi dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional, dan teknisi laki-laki dan perempuan; serta (3) dimensi distribusi pendapatan dengan indikator upah buruh Non pertanian laki-laki dan perempuan. Indikator ini diukur oleh Badan Pusat Statistik dengan metode penentuan target menggunakan metode survey.

Indeks pemberdayaan gender menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG diukur dalam tiga dimensi yaitu keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan. Dimensi keterwakilan perempuan di parlemen diukur dengan indikator proporsi keterwakilan perempuan dan laki-laki di parlemen. Dimensi pengambilan keputusan diukur dengan indikator proporsi perempuan dan laki-laki dari manajer, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi. Dimensi distribusi pendapatan diukur dari upah buruh laki-laki dan perempuan non pertanian.

Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung 2019-2021

Wilayah	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)		
	2019	2020	2021
Lampung Barat	68,21	68,24	69,14
Tanggamus	56,97	56,8	56,39
Lampung Selatan	59,4	59,59	59,27
Lampung Timur	63,42	63,13	63,14
Lampung Tengah	62,22	61,96	61,01
Lampung Utara	64,87	65,21	64,94
Way Kanan	61,46	60,72	61,82
Tulang Bawang	65,94	64,1	64,76
Pesawaran	72,59	72,21	73,7
Pringsewu	67,05	67,32	65,86
Mesuji	69,27	68,89	68,45
Tulang Bawang Barat	51,46	51,25	52,1
Pesisir Barat	56,21	56,02	54,93
Bandar Lampung	71,54	71,88	71,69
Metro	77,02	76,98	74,23
Provinsi Lampung	69,23	69,06	67,96





KETERLIBATAN PEREMPUAN DI PARLEMEN PERLU PERJUANGAN BESAR

Persentase Keterlibatan Perempuan pada Parlemen Nasional sebesar 21,89 persen. Capaian Keterlibatan Perempuan di Parlemen Provinsi Lampung sebesar 18,82 persen.

PEREMPUAN SEMAKIN BERKONTRIBUTSI DALAM PENCIPTAAN PENDAPATAN

Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Nasional sebesar 37,22 persen. Capaian Sumbangan Pendapatan Perempuan di Provinsi Lampung sebesar 29,39 persen.



PROFESIONALISME PEKERJA PEREMPUAN TELAH BANYAK DIPERHITUNGKAN

Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Professional Nasional sebesar 49,99 persen. Capaian Perempuan Sebagai Tenaga Professional di Provinsi Lampung sebesar 53,06 persen.



Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2022 mengalami fluktuasi naik turun disetiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perlu intervensi lebih lanjut terkait peran perempuan dalam pembangunan utamanya dalam bidang politik dan ekonomi yang dipandang masih belum optimal. Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang mendukung Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi dan Kesejahteraan Keluarga, dan Kegiatan yang mendukung adalah Kegiatan Strategi Percepatan PUG dan Evaluasi Program Pemberdayaan Perempuan (APE).





Tabel 3.2.39 Faktor Pendukung, Penghambat dan Solusi

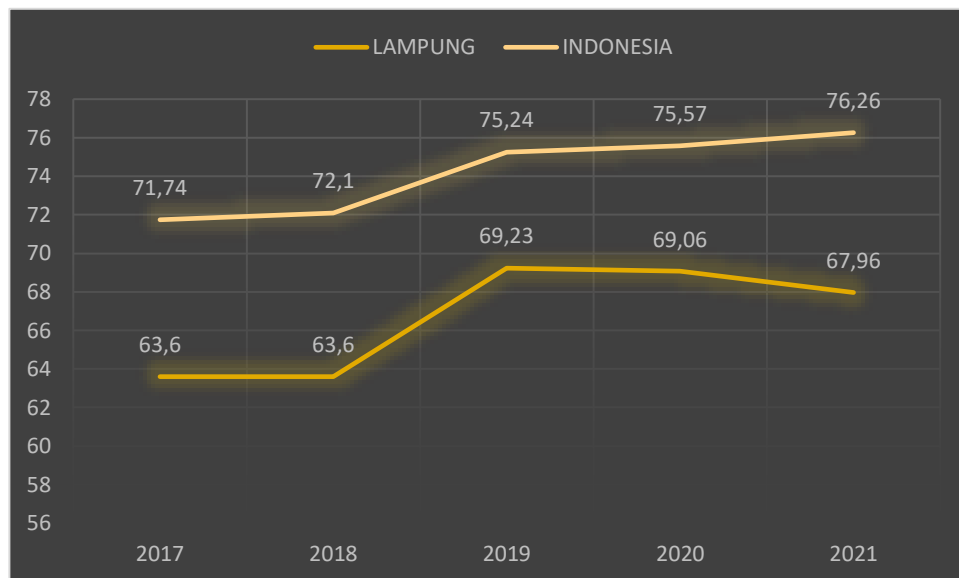
Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
- Adanya komitmen Kepala Daerah untuk mendukung optimalisasi PUG dan PPRG - Kebijakan PUG telah tertuang dalam tujuan dan sasaran RPJMD yang memberikan peluang kesetaraan Gender di daerah - Adanya program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah dan Stakeholder yang telah bersinergi dan bergerak di Bidang Pemberdayaan Perempuan Politik yang dapat dioptimalkan untuk mendukung peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan dalam Pembangunan.	- Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) belum optimal - Terbatasnya Anggaran untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender	- Melakukan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi tim penggerak (driver) PUG Provinsi Lampung dan Kab/Kota - Menyusun Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	- Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Lampung Tahun 2022 - Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Komposit pembentuk IDG adalah (1) keterlibatan perempuan di parlemen, (2) perempuan sebagai tenaga profesional, dan (3) sumbangan pendapatan perempuan. IDG Provinsi Lampung tahun 2021 adalah 67,96, berada di bawah rata-rata IDG Nasional sebesar 76,26. *Trend* IDG Provinsi Lampung tahun 2015-2021 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini.





Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Lampung dan Indonesia Tahun 2015-2021



Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2022

Dilingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, Kabupaten dengan IDG tertinggi adalah Kota Metro sebesar 74,23 diikuti oleh Kabupaten Pesawaran sebesar 73,7 dan Kota Bandar Lampung sebesar 71,69. Sedangkan IDG terendah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 52,1. Capaian IDG menurut Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung tahun 2015-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.





Tabel 3.2.40
IPG Menurut Kab/Kota di Provinsi Lampung Tahun 2017-2021

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Lampung Barat	60.47	63.84	68.21	68.24	69.14
Tanggamus	69.77	69.9	56.97	56.8	56.39
Lampung Selatan	57.66	58.14	59.4	59.59	59.27
Lampung Timur	60.01	60.73	63.42	63.13	63.14
Lampung Tengah	55.75	53.52	62.22	61.96	61.01
Lampung Utara	60.9	61.41	64.87	65.21	64.94
Way Kanan	68.46	65.3	61.46	60.72	61.82
Tulang Bawang	62.78	62.52	65.94	64.1	64.76
Pesawaran	70.51	67.03	72.59	72.21	73.7
Pringsewu	62.95	63.81	67.05	67.32	65.86
Mesuji	61.4	61.71	69.27	68.89	68.45
Tulang Bawang Barat	62.74	59.74	51.46	51.25	52.1
Pesisir Barat	64.34	63.9	56.21	56.02	54.93
Kota Bandar Lampung	62.11	62.39	71.54	71.88	71.69
Kota Metro	78.92	78.75	77.02	76.98	74.23
LAMPUNG	63.6	63.82	69.23	69.06	67.96

Sumber : olahan data Bappeda, Februari 2023

Tabel 3.2.41 Pencapaian Sasaran 10 (2019-2022)

Sasaran 10											
Sasaran 10	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi										
IKU _(11/20)	Kondisi Kemantapan Jalan										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	74,41	-	79	76,045	96,25	74	75,386	101,87	76	76,850	101,12

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran meningkatnya kondisi kemantapan jalan memiliki 1 (satu) indikator yaitu **meningkatnya kondisi kemantapan jalan** dengan capaian 76,850% dari target 76% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 101,12%. Realisasi kinerja meningkat 1,5% dari tahun sebelumnya. Realisasi Kondisi Kemantapan Jalan pada tahun 2019 sebesar 74,41% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan realisasi 76,045%. Namun pada tahun 2021 realisasi indikator ini mengalami penurunan menjadi 75,386%. Pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan dengan persentase realisasi sebesar 76,850%.





Tabel 3.2.42 Pencapaian Sasaran 10 (2024-Nasional)

Sasaran 10		
Sasaran 10	Meningkatnya Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	
IKU _(11/20)	Kondisi Kemantapan Jalan	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	94,82
78	98,53	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023

Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 98,53% dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional Provinsi Lampung masih selisih 17,97 poin.

Meningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan provinsi yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan (IRI), indeks perkerasan jalan (PCI), umur struktur jalan, dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Berdasarkan hasil survey kondisi jalan tahun 2022, tingkat kondisi kemantapan jalan yang merupakan IKU Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dapat melampaui target 76%, yakni mencapai 76,85%. Dengan pencapaian tersebut, maka sepanjang 1.285,9 km ruas jalan provinsi berada dalam kondisi mantap.

Pada tahun 2022, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung melaksanakan pembangunan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan kondisi kemantapan jalan dengan penanganan jalan berupa Rekonstruksi jalan sepanjang 77,274 Km, Pembangunan Jembatan sepanjang 48 M. Serta Rehabilitasi jalan sepanjang 70,092 Km dan Rehabilitasi jembatan sepanjang 152,40 M. Tingkat kondisi kemantapan jalan pada akhir 2022 mencapai 76,850% jalan mantap atau 1.301,280 km. Dinas BMBK Provinsi Lampung pada tahun 2022 target jalan mantap mencapai 76,850%, untuk menjaga kondisi kemantapan jalan melalui Pemeliharaan Rutin Jalan dengan Sistem URC yang dilaksanakan oleh UPTD





Wilayah I s.d. VI, Pemeliharaan Rutin Jalan sepanjang 565,91 Km dan 95.936,53 M², dengan Pemeliharaan rutin jembatan sepanjang 2.687,07 M dan 831,35 M². Dinas BMBK Provinsi Lampung melakukan Pembangunan infrastruktur jalan di ruas-ruas jalan provinsi yang melintas di kawasan wisata unggulan, yaitu : Rehabilitasi Jalan Ruas Padang Cermin-Simpang Teluk Kiluan berupa penanganan flexible pavement, Rekontruksi Jalan Ruas Simpang Kiluan – Simpang Umbar berupa penanganan flexible pavement, Rekonstuksi Jalan Simpang Umbar – Putih Doh berupa penanganan flexible pavement. Beberapa ruas jalan dalam pembangunan dan pemeliharaan tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**1. Pembangunan Drainase Ruas Jalan
Jalan Mayjen H.M. Ryacudu (Bandar
Lampung) sepanjang 1 Km.**



**2. Rekonstruksi Jalan Ruas Tegal
Mukti - Tajab (Way Kanan)
sepanjang 8,72 Km.**





3. Pemeliharaan rutin dengan sistem URC di Ruas Bandar Jaya – Mandala (Lampung Tengah) pada tahun anggaran 2022.



4. Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Sp. Teluk Kiluan -Umbar (Tanggamus) sepanjang 0,42 Km.



5. Pekerjaan Rehabilitasi Ruas Padang Cermin – Sp. Kiluan sepanjang 1 Km pada tahun anggaran 2022.





Tabel 3.2.43 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, Program dan Kegiatan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1. Dukungan Gubernur pada Misi ke-4 tentang infrastruktur; 2. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 17 Tentang Infrastruktur Lampung Berjaya 3. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 18 Tentang Unit Reaksi Cepat (URC) Perbaikan Infrastruktur 4. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor 26 Tentang Lampung Sebagai Salah Satu Tujuan Utama Wisata 5. Tuntutan dan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur jalan yang baik seiring dengan peningkatan aktivitas masyarakat 6. Semakin meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Lampung 7. Meningkatnya alokasi dana yang bersumber dari APBN melalui DAK Infrastruktur.	1. Kendala Anggaran Ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan dukungan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Rendahnya komitmen bersama (<i>stakeholder</i>) dalam upaya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Tingginya angka degradasi jalan	1. Peningkatan insfrastruktur jalan diprioritaskan pada ruas-ruas yang memiliki potensi ekonomi kewilayahan dan dekat dengan akses jalan tol 2. Pencarian solusi pendanaan (pinjaman) dari pihak swasta	Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi





Tabel 3.2.44 Pencapaian Sasaran 10 (2019-2022)

Sasaran 11											
Sasaran 11	Meningkatnya Penguatan Sarana Dan Prasarana Dasar Wilayah										
IKU_(12/20)	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	88,8	-	-	90,21	-	91,20	91,22	100,02	92,31	96,5	104,51

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023.

Sasaran meningkatnya penguatan sarana dan prasarana dasar wilayah memiliki 1 (satu) indikator **Tingkat Infrastruktur Dasar wilayah** dengan capaian 96,5% dari target 92,31% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 104,51%. Realisasi kinerja pada indikator ini sejak tahun 2019 mengalami peningkatan dilihat dari tahun 2019 realisasinya 88,8%, pada tahun 2020 90,21%, tahun 2021 91,22% dan pada tahun 2022 96,5%. Sehingga dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 meningkat sebesar 7,7%.

Tabel 3.2.45 Pencapaian Sasaran 10

Sasaran 11		
Sasaran 11	Meningkatnya Penguatan Sarana Dan Prasarana Dasar Wilayah	
IKU _(12/20)	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	Realisasi 2022
94,19	102,45	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023.

Bila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 102,45%.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintahan Provinsi Lampung memiliki tugas dalam rangka mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah (Gubernur) periode 2019-2024, dimana Visi Provinsi Lampung adalah *Rakyat Lampung Berjaya* (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera). Sedangkan Misi Provinsi Lampung yang diemban oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Misi ke-4 yaitu *Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah*.

Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (bersama dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya) dalam RPJMD 2019-2024 mengampu Indikator Kinerja Utama (IKU) Provinsi Lampung yaitu "*Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah*". Dinas PSDA dan Dinas PKPCK masing-masing memberi kontribusi 50%. Sebagai penunjang IKU Provinsi tersebut, Indikator Kinerja Daerah (IKD) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah *Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2*. Luas areal sawah yang menjadi kewenangan provinsi adalah 21.045 hektar yang terdapat pada 19 Daerah Irigasi (DI).





IKD Dinas PSDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024

Indikator Kinerja Utama	Target Capaian					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2	33%	37%	40%	45%	50%	55%
Luasan (Hektar)	6.945 Ha	7.787 Ha	8.418 Ha	9.470 Ha	10.522 Ha	11.575 Ha

Realisasi IKD Dinas PSDA Provinsi Lampung Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Kinerja 2022		
	Target	Realisas	Capaian
Persentase Luas Areal Sawah Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi dengan IP>2	45%	45%	100%

IKU Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah “Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah” dengan target 92,31%. Pada Tahun 2022 Dinas PSDA berhasil merealisasikan target capaian IKD sebesar 45%, yang artinya secara capaian kinerjanya adalah 100% dari target yang telah ditetapkan.

IKU Provinsi Lampung Tahun 2022

No	IKU Provinsi Lampung	Kinerja 2022	
		Target	Realisasi
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah			
12	Tingkat Infrastruktur Dasar	92,31 %	*50 %

Keterangan : *merupakan bagian kontribusi Dinas PSDA



Indeks Pertanaman (IP) adalah hasil dari perbandingan antara jumlah luas pertanaman dalam pola tanam selama setahun dengan luas lahan yang tersedia untuk ditanami atau bisa juga diartikan sebagai rata-rata masa tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama. Peningkatan indeks pertanaman (IP) merupakan salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung untuk meningkatkan produksi. Potensi peningkatan Indeks Pertanaman di setiap wilayah dapat dilakukan terutama melalui pengelolaan sumber daya air. Peningkatan Indeks Pertanaman dengan mengandalkan pengelolaan air yaitu dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya air yang dititik beratkan untuk menyediakan air irigasi untuk tanaman dengan memanfaatkan potensi sumber daya air yang ada, baik berupa air permukaan (sungai, mata air) maupun air tanah. Sehingga petani dapat meningkatkan frekuensi penanaman dalam setahun sesuai dengan ketersediaan airnya.



Monitoring Bersama tim monitoring dari Dinas PSDA
Prov.Lampung dan UPTD Wil. I Pringsewu survey jaringan irigasi
dan masa panen MT I di Way Tebu Sistem

Indikator Kinerja Utama Dinas PSDA adalah memastikan ketersediaan air untuk peningkatan persentase luas areal sawah daerah Irigasi kewenangan provinsi dengan $IP > 2$. Berdasarkan Indikator tersebut, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air di tahun 2022 mampu mencapai luas areal sawah beririgasi 45% dengan $IP > 2$. Pencapaian tersebut dilakukan dengan upaya membangun atau merehabilitasi jaringan irigasi total sepanjang 16.400 meter, membangun embung di 37 lokasi, membangun sumur air tanah di 2 lokasi, membangun tanggul sungai total sepanjang 1.423 meter, normalisasi sungai sepanjang 300 meter dan merehabilitasi bendung irigasi di 3 lokasi.





Beberapa sub kegiatan yang mendukung pencapaian IKU diantaranya:

1. Bidang Pembangunan dan Rehabilitasi Sumber Daya Air, melaksanakan pekerjaan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi permukaan. Selain itu terdapat juga pekerjaan pembangunan/rehabilitasi bendung, embung, dan sumur air tanah untuk air baku.
2. Pada Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air, melaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan bendung irigasi pada DI kewenangan provinsi agar dapat mempertahankan kondisi jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik.
3. Pada Bidang Penatagunaan Sumber Daya Air melaksanakan koordinasi Komisi Irigasi dan kelembagaan sumber daya air, menyusun dokumen dan sosialisasi pengaturan pola tanam dan pengelolaan sumber daya air.

Selain itu terdapat Kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan darurat terhadap kerusakan jaringan sumber daya air yang mengganggu proses pengairan. Pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat (URC) dan Petugas Piket Banjir di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor : 77.a/KPTS/V.04/2022 tanggal 07 Februari 2022.





Tabel 3.2.46 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, Program dan Kegiatan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1. Pada bidang pembangunan dan rehabilitasi SDA, dengan kegiatan pembangunan/rehabilitasi irigasi dan rawa, pembangunan/rehabilitasi bending, embung dan air baku 2. Pada bidang operasi dan pemeliharaan SDA, dengan kegiatan OP irigasi dan rawa, OP sungai, waduk dan pantai, OP waduk, bending, embung dan bangunan air lainnya 3. Pada bidang penatagunaan SDA, dengan kegiatan penyelenggaraan komisi irigasi dan kelembagaan SDA, penyusunan peraturan/kebijakan bidang SDA, rekomendasi teknis SDA, peningkatan kapasitas SDM bidang Sumber Daya Air	1. Kendala Anggaran Ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan dukungan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2. Rendahnya komitmen bersama (<i>stakeholder</i>) dalam upaya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 3. Tingginya angka degradasi jalan	1. Peningkatan infrastruktur jalan diprioritaskan pada ruas-ruas yang memiliki potensi ekonomi kewilayahan dan dekat dengan akses jalan tol 2. Pencarian solusi pendanaan (pinjaman) dari pihak swasta	Penyelenggaraan Jalan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi





Dalam meningkatkan infrastruktur dasar wilayah, Pemerintah Provinsi Lampung telah melaksanakan kolaborasi kinerja perangkat daerah untuk membangun dan memelihara infrastruktur dasar pada berbagai bidang yang mempengaruhi, diantaranya:

1. Bidang Sanitasi

Sanitasi layak merupakan sarana pengelolaan air buangan yang memenuhi standar teknis dengan kata lain sudah memiliki tangki septic dengan bidang resapan seperti kegiatan MCK yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi, Kab/Kota atau unit kerja Ke PU-an lainnya. Perhitungan capaian akses sanitasi menggunakan indikator jumlah penduduk atau (jiwa). Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi layak sebesar 77,47% atau 6.806.670 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap Sanitasi layak sebesar 77,49%, merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Faktor pendukung IKU dapat tercapai tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur dengan pelaksanaan kegiatan PAMSIMAS, pembangunan-pembangunan Instalasi pengelolaan air dan SPAM.





Berikut ini adalah perhitungan persentase sanitasi layak:

$$\text{Capaian IKD} = \frac{\text{penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = \frac{6.806.670}{9.007.848} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = 77,49\%$$

Deviasi terhadap capaian Sanitasi di Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

$$\text{deviasi cak. Akses Air Minum 2021} = \text{realisasi Cap. Akses Air minum 2021} - \text{Target Cak. Air Minum 2021}$$

$$\text{deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021} = 77,49\% - 77,47\%$$

$$\text{deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021} = 0,02\% \text{ (Deviasi Positif)}$$

Tabel. 3.2.47. CAPAIAN AKSES SANITASI TAHUN 2021

NO	KAB./KOTA	APBD (Jiwa)	APBN""	TOTAL (Jiwa)	PENDUDUK (Jiwa)	PERSEN (%)
1	Lampung Barat		232.979	232.979	302.139	77,11
2	Tanggamus	-	405.486	405.486	640.275	63,33
3	Lampung Selatan	250	1.064.301	1.064.551	1.064.301	100,02
4	Lampung Timur	250	662.540	662.790	1.110.340	59,69
5	Lampung Tengah	-	894.570	894.570	1.460.045	61,27
6	Lampung Utara	500	444.056	444.556	633.099	70,22
7	Way Kanan	250	306.214	306.464	473.575	64,71
8	Tulang Bawang	-	285.792	285.792	430.021	66,46
9	Pesawaran	250	438.316	438.566	477.468	91,85
10	Pringsewu	-	405.446	405.446	405.466	100,00
11	Mesuji	-	178.784	178.784	227.518	78,58
12	Tulang Bawang Barat	-	236.799	236.799	286.162	82,75
13	Pesisir Barat	-	112.570	112.570	162.697	69,19
14	Kota Bandar Lampung	500	979.729	980.229	1.166.066	84,06
15	Kota Metro	-	157.088	157.088	168.676	93,13
JUMLAH		2.000	6.804.670	6.806.670	9.007.848	77,49
Capaian 2021			77,49			
Target Renstra			77,47			

2. Bidang Perumahan

Target pengurangan RTLH Provinsi Lampung pada tahun 2021 sebanyak **7.954 unit** rumah dari sisa RTLH pada tahun 2020 sebanyak 56.800 unit. Dengan posisi akhir penanganan RTLH di tahun 2020 sebesar 96,37%, dan direncanakan untuk memposisikan penangan RTLH di Provinsi Lampung di tahun 2021 meningkat sebesar 96,87% melalui sumber pendanaan APBN, APBD 1 (Provinsi), APBD II (Kabupaten / Kota) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)





Kabupaten Kota Tahun 2021. Pada tahun 2021 melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dan Dana DAK Kabupaten Kota di Provinsi Lampung berhasil mengurangi RTLH sebanyak **3.900 unit** rumah.

3. Bidang Kawasan Permukiman (Kawasan Kumuh)

Target pengurangan Kawasan Kumuh Provinsi Lampung pada tahun 2021 hingga mencapai luas **1428,71** Ha dari sisa Kawasan Kumuh Provinsi Lampung pada tahun 2020 berdasarkan penangananan SK Kumuh Th 2014 se-Provinsi Lampung seluas 2023,51 Ha. Jika dikonversi dalam persentase, target penanganan Kawasan Kumuh Provinsi tahun 2021 sebesar 70,61%. Pada tahun 2020 sisa kawasan kumuh berdasarkan SK Kawasan Kumuh data base SK Kumuh Se Provinsi Lampung Tahun 2014 seluas 1339,56 Ha. Melalui kolaborasi program/kegiatan sejenis dari APBN dan APBD Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan penanganan pengurangan luas kawasan kumuh sebesar 99,37 Ha. Sehingga **realisasi** capaian pengurangan luas kawasan kumuh Provinsi Lampung adalah **sebesar 71,11%**.

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \frac{(\text{Sisa Kumuh Database 2014 berdasarkan tahun 2020} + \text{capaian Penanganan Kumuh 2021})}{\text{Luas Kawasan Kumuh Provinsi Lampung berdasarkan SK Th 2014}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \frac{(1339,56 \text{ Ha} + 99,37 \text{ Ha})}{2023,51 \text{ Ha}} \times 100 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = 71,11\%$$

Sedangkan deviasi penanganan kumuh provinsi lampung berasal dari realisasi penanganan Kawasan Kumuh terhadap target Renstra dalam RPJMD Provinsi Lampung sebesar 0,5% deviasi positif.

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = \text{realisasi penanganan Kumuh 2021} - \text{Target Penanganan kumuh 2021}$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = 71,11 \% - 70,61 \%$$

$$\text{Total Capaian Penanganan Kumuh} = 0,5 \%$$





Faktor pendukung hingga target dapat tercapai tidak lepas dari dukungan APBN melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung yang berkontribusi sangat besar dari capaian IKU Gubernur.

Tabel. 3.2.48. Target Capaian Penanganan Kumuh Provinsi Lampung

No.	Nama kabupaten/kota	Nomor sk	Luas sk 2014 (ha)	Sisa kumuh database 2014 (ha) bds thn akhir 2020	Data capaian penanganan kumuh BPPW (terhadap SK kumuh th 2014) th 2021	Realisasi penanganan th 2021
1	Way Kanan	B.130/III.10-WK/HK/2014	34,36	34,36	1,92	
2	Lampung Barat	B/341/KPTS/II.06/2014	39,30	39,30		
3	Lampung Tengah	364.A/KPTS/D.14/2014	44,13	32,07		
4	Pringsewu	B/280/KPTS/LT.02/2014	46,92	0,00	25,86	
5	Lampung Selatan	B.38.A/LS/HK/2014	55,63	30,47		
6	Tulang Bawang Barat	B/155/II/09/TBB/2014	79,04	53,36	20,17	
7	Metro	467/KPTS/LTD-2/2014	84,94	0,00		
8	Lampung Utara	B/373/25-LU/HK/2014	90,60	19,00	0,00	
9	Lampung Timur	B.190/15/SK/2014	103,68	34,27		
10	Tanggamus	B.319/19/11/2014	167,75	144,29		
11	Tulang Bawang	B/316/III.2/HK/TB/2014	244,66	200,21	3,37	
12	Bandar Lampung	974/IV.32/HK/2014	266,64	0,00	37,47	
13	Pesawaran	251.A/IV.01/HK/2014	765,85	752,23		
14	Mesuji		0,00	0,00	10,58	
15	Pesisir Barat		0,00	0,00		
Total Luas SK 2014			2023,51	1339,56	99,37	1438,93
Persentase Penanganan			71,11%			
Terhadap target RPJMD / Renstra			70,61%			
Selisih			0,50%			





4. Bidang Kawasan Permukiman (Akses Aman Terhadap Air Minum Layak)

Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan persentase penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak sebesar 82,03% atau 7.311.242 jiwa. Realisasi sebaran capaian penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak merupakan perhitungan kumulatif Pemerintah Provinsi dan Balai Prasarana Pemerintah Wilayah Lampung (BPPW) yang datanya dihimpun serta dihitung oleh Pemerintah Provinsi Lampung.

Berikut ini adalah perhitungan persentase akses aman terhadap air minum layak:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{penduduk yang memiliki akses aman terhadap air minum layak}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = \frac{7.311.242}{9.007.848} \times 100\%$$

$$\text{Capaian IKD} = 82,27\%$$





Deviasi terhadap capaian Air Minum di Provinsi Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut :

deviasi cak. Akses Air Minum th 2021 = realisasi Cap. Akses Air minum 2021 – Target Cakupan Air Minum Th 2021

deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 82,27 % – 82,03%

deviasi cakupan Akses Air Minum th 2021 = 0,24% (Deviasi Positif)

Tabel. 3.2.49 CAPAIAN AKSES AIR MINUM TAHUN 2021

NO	KAB./KOTA	APBD (Jiwa)	APBN"	TOTAL (Jiwa)	PENDUDUK (Jiwa)	PERSEN (%)
1	Lampung Barat	750	302.139	302.889	302.139	100,25
2	Tanggamus	1.000	592.126	593.126	640.275	92,64
3	Lampung Selatan	2.250	951.592	953.842	1.064.301	89,62
4	Lampung Timur	500	816.655	817.155	1.110.340	73,60
5	Lampung Tengah	2.000	1.144.821	1.146.821	1.460.045	78,55
6	Lampung Utara	2.000	522.497	524.497	633.099	82,85
7	Way Kanan	750	390.321	391.071	473.575	82,58
8	Tulang Bawang	1.500	331.460	332.960	430.021	77,43
9	Pesawaran	500	410.431	410.931	477.468	86,06
10	Pringsewu	1.000	367.352	368.352	405.466	90,85
11	Mesuji	-	178.101	178.101	227.518	78,28
12	Tulang Bawang Barat	250	222.777	223.027	286.162	77,94
13	Pesisir Barat	1.250	116.328	117.578	162.697	72,27
14	Kota Bandar Lampung	4.500	809.133	813.633	1.166.066	69,78
15	Kota Metro	750	136.509	137.259	168.676	81,37
JUMLAH		19.000	7.292.242	7.311.242	9.007.848	82,27
Realisasi Capaian Akses Air Minum			82,27			
Target Renstra			82,03			

5. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air

Upaya yang telah dilaksanakan adalah dalam meningkatkan infrastruktur dasar wilayah adalah sebagai berikut:

- Pembentukan Kegiatan Unit Reaksi Cepat (URC) yang bertujuan untuk melaksanakan perbaikan darurat terhadap kerusakan jaringan sumber daya air yang mengganggu proses pengairan.
- Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota,
- Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya 1000 Ha – 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota.





- d. melaksanakan pekerjaan rehabilitasi terhadap jaringan irigasi permukaan. Selain itu terdapat juga pekerjaan pembangunan/rehabilitasi bendung, embung, dan sumur air tanah untuk air baku.
- e. melaksanakan pekerjaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan dan bendung irigasi pada DI kewenangan provinsi agar dapat mempertahankan kondisi jaringan irigasi dapat berfungsi dengan baik.
- f. melaksanakan koordinasi Komisi Irigasi dan kelembagaan sumber daya air, menyusun dokumen dan sosialisasi pengaturan pola tanam dan pengelolaan sumber daya air.





Tabel 3.2.50 Pencapaian Sasaran 12 (2019-2022)

Sasaran 12											
Sasaran 12	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi										
IKU _(13/20)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
93	95,76	102,96	94	96,5	102,66	96	99,94	104,10	97	99,99	103,08

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022.

Sasaran terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi memiliki 1 (satu) indikator **rasio elektrifikasi rumah tangga** dengan capaian 99,99% dari target 97% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 103,08%. Pada tahun 2019 realisasi indikator ini sebesar 95,76%, tahun 2020 sebesar 96,5%, tahun 2021 sebesar 99,94% dan tahun 2022 sebesar 99,99%. Sehingga jika dilihat berdasarkan tabel tersebut realisasi kinerja meningkat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sebesar 4,23%.

Tabel 3.2.51 Pencapaian Sasaran 12 (2024-Nasional)

Sasaran 11		
Sasaran 12	Terwujudnya Ketahanan dan Kemandirian Energi	
IKU _(13/20)	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	99,63
99	101%	

Sumber : Kementerian ESDM, 2023

Realisasi kinerja provinsi Lampung bila dibandingkan dengan realisasi nasional lebih tinggi 0,36 poin. Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 101%.

Pertumbuhan listrik di Lampung merupakan yang tertinggi se-Sumatera. Hal ini akan membawa dampak ke desa-desa yang ada di seluruh Provinsi Lampung teraliri dan menikmati listrik, serta untuk mendukung Program Pemerintah Pusat yaitu membangun daerah-daerah Terluar, Terdepan, Terpencil dan Terisolir dan wujud pembangunannya dengan memberikan bantuan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi.



Dalam upaya meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah, serta misinya Lampung Terang Berjaya (Swasembada Listrik) Pemerintah Provinsi Lampung telah melakukan beberapa upaya dalam mensinergiskan dan berinovasi dengan stakeholder terkait.

Upaya yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Lampung bersama PT. PLN terus melakukan Peningkatan Rasio Elektrifikasi Provinsi Lampung dengan program melistriki dusun-dusun yang belum berlistrik dengan target besaran persentasi Rasio Desa Berlistrik (RDB);



2. Melakukan sinergi dalam peningkatan infrastruktur jaringan transmisi listrik untuk pemenuhan potensi pelanggan baru di sektor industri yang telah terencana pada kawasan industri baru, serta untuk mendukung pariwisata terutama yang berada di kepulauan, seperti yang akan direalisasikan Saluran Kabel Laut Tegangan Menengah (SKLTM) 20 Kv ke Pulau Pahawang oleh PT. PLN Unit Distribusi Lampung.
3. Sinergi dalam mewujudkan kemandirian Energi Listrik di provinsi Lampung dengan mendorong penambahan Pembangkit Listrik baru berbasis Energi Terbarukan maupun lainnya, dan pemanfaatan potensi yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Provinsi Lampung yang saat ini masih kurang, dan masih di suplay Daya Listrik dari Sumbagsel sebesar 450 MW.
4. Merencanakan pembangunan PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) 25 Mw dan mendorong percepatan pengembangan potensi Panas Bumi yang ada di Provinsi Lampung untuk dimanfaatkan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);





5. Mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ke Kementerian ESDM RI, dan melaksanakan pembangunan Rooftop pada 20 gedung milik Pemerintah Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2020 sebagai proyek percontohan untuk Rooftop di Provinsi Lampung, serta mendukung Program Pemerintah Nasional Sejuta Surya Atap (GNSSA);
6. Mendistribusikan Listrik Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) yang tersebar di Desa yang belum berlistrik pada 6 Kabupaten, selain itu usulan PJUTS (Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya) bagi Desa yang belum berlistrik ke Kementerian ESDM RI, dan Pemprov Lampung.
7. PLN juga sudah memulai pembangunan pembangkit PLTGU dengan kapasitas 200 MW di Sebalang dan akan segera diikuti dengan pembangunan PLTU Tarahan Ekspansi 300 MW.



Target dan Capaian Rasio Elektrifikasi (RE) Rumah Tangga di Provinsi Lampung					
Indikator	Tahun				
Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	2020	2021	2022	2023	2024
Target (%)	95	96	97	98	99
Realisasi (%)	96,5	99,94			
% Realisasi	100,5	105			





Tabel 3.2.52 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, Program dan Kegiatan

FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG	PROGRAM	SOLUSI
1. Kendala Anggaran, Ketersediaan anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan; 2. Kendala akses menuju Daerah Terpencil dan Perdesaan yang belum berlistrik, diantaranya masih banyak Daerah yang tidak ada infrastruktur jalan untuk akses masuk kendaraan dan akses jalan yang harus melintasi kawasan kehutanan; 3. Status lahan untuk Daerah Terpencil dan Perdesaan yang belum berlistrik, sebagai contoh masih adanya masyarakat yang berdomisili di lahan kehutanan (Register/HL); dan Desa yang statusnya sebagai Desa resmi definitip berdasarkan Kemendagri, namun berada di wilayah kehutanan. Sehingga sulit dalam mendapatkan perizinan untuk pembangunan infrastruktur jaringan listrik.	1. Dukungan Gubernur pada Misi Ke-4 tentang infrastruktur; 2. Agenda Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Program Lampung Terang Berjaya 3. Kebutuhan masyarakat akan listrik saat ini yang setara dengan kebutuhan dasar, yang berfungsi sebagai sumber penerangan, energi alat komunikasi serta pendukung aktifitas usaha; 4. Sinergi dengan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung	Pengelolaan Ketenagalistrikan	1. Mensinergikan perencanaan pembangunan infrastruktur pada PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Lampung dengan Daerah yang belum berlistrik di Provinsi Lampung; 2. Mengusulkan proposal bantuan DAK Fisik dari Kementerian ESDM berupa : PLTS/LTSHE/PJUTS/PLT MH untuk Daerah yang belum berlistrik sesuai dengan potensi yang ada di lokasi; Bantuan Program BPBL (Bantuan Penyambungan Baru Listrik) bagi masyarakat tidak mampu yang berada di daerah yang telah dibangun jaringan listrik.





Tabel 3.2.53 Pencapaian Sasaran 13 (2019-2022)

Sasaran 13											
Sasaran 13	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi										
IKU _(14/20)	Laju Pertumbuhan Ekonomi										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	5,27	-	-	-1,67	-	2,5-3,5	2,79	111,6	3-4	4,28	143

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi memiliki 1 (satu) indikator **Laju Pertumbuhan Ekonomi** dengan capaian 4,28% dari target 3-4% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 143%. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD. Pada tahun 2019 realisasi sebesar 5,27%. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sangat pesat sebesar -1,67% dikarenakan wabah pandemi *covid-19*. Pada tahun 2021 realisasi kembali meningkat meskipun belum signifikan sebesar 2,79% dan di tahun 2022 sebesar 4,28%.

Tabel 3.2.54 Pencapaian Sasaran 13 (2024-Nasional)

Sasaran 13		
Sasaran 13	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi	
IKU _(14/20)	Laju Pertumbuhan Ekonomi	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	5,31
4,5-5,5	95,11	

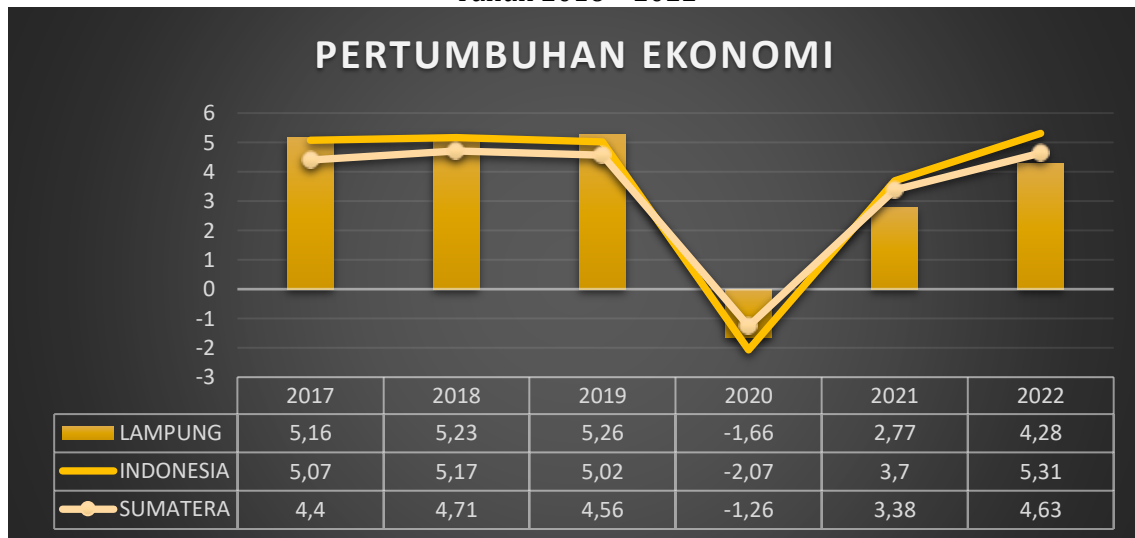
Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 95,11%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi nasional maka Lampung lebih rendah 1,03% dari standar nasional.

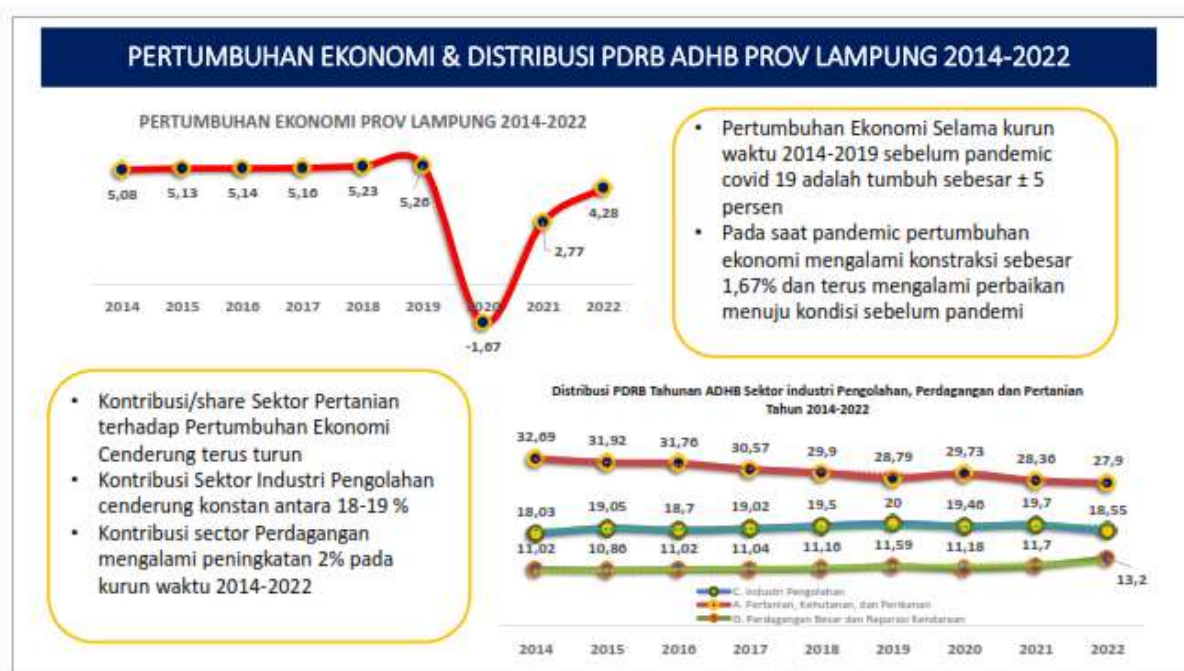




Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Sumatera dan Provinsi Lampung
Tahun 2016 – 2022



Sumber : BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023





Beberapa isu yang berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan sector industry pengolahan :

- 1) Sektor industry di Provinsi Lampung sangat dipengaruhi oleh industry Pertanian seperti Gula (7 pabrik), Nenas (GGPC), CPO, Pakan ternak (jagung) dan Udang.
- 2) Industri Pertanian yang memiliki kontribusi terbesar adalah industry Gula Beserta turunannya (molase/ tetes tebu seperti etanol, penyebab rasa, dll) dengan kontribusi sebesar 30% terhadap sector industry
- 3) Pola produksi pada industry gula adalah 6 bulan (April s.d. Oktober) masa giling atau 6 bulan berikutnya maintenance (turun mesin). Inilah yang menjadikan kenaikan di TW II dan TW III serta penurunan di TW I dan TW IV
- 4) Produksi komoditi lain seperti udang, jagung dan juga nanas mengalami penurunan permintaan dan berpengaruh terhadap sector industry lainnya
- 5) Angka perhitungan PDRB sektor industri pengolahan dihitung berdasarkan Survei Industri dengan pola di asumsikan berdasarkan survei ekonomi tahun 2016.
- 6) Survei Industri dilakukan terhadap 34 sampling (Industri besar dan sedang) yang mewakili 70% PDRB dan dari 34 industri itu tingkat kepatuhannya hanya sebesar 60%, sehingga terdapat 34% perusahaan industry yang tingkat keaptuhannya rendah, meskipun BPS sudah melakukan pendekatan secara personal.

Dari sisi produksi, pertumbuhan kumulatif tertinggi terjadi pada lapangan usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 8,26 persen. Selanjutnya Konstruksi tumbuh sebesar 6,95 persen dan Pengadaan Air tumbuh sebesar 6,94 persen. Selain itu lapangan usaha yang juga tumbuh cukup besar adalah Informasi dan Komunikasi serta Industri Pengolahan yang tumbuh masing-masing sebesar 6,17 persen dan 4,57 persen. Sementara itu, beberapa lapangan usaha mengalami kontraksi pertumbuhan, terutama terjadi pada Pengadaan Listrik dan Gas serta Pertambangan dan Penggalian dengan kontraksi masing-masing sebesar -6,80 persen dan -5,28 persen.

Struktur PDRB Provinsi Lampung tahun 2021 (ADHB), masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan peranan sebesar 28,39 persen; diikuti Industri Pengolahan sebesar 19,65 persen; Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 11,70 persen; serta Konstruksi sebesar 9,89 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Provinsi Lampung mencapai 69,63 persen.





Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan (*source of growth*), Lapangan Usaha Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor menjadi sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 0,97 persen, diikuti Industri Pengolahan sebesar 0,84 persen, dan Konstruksi sebesar 0,68 persen. Sementara itu, sumber pertumbuhan dari lapangan usaha lainnya sebesar 0,29 persen.

Berdasarkan PDRB menurut pengeluaran, perekonomian Lampung tumbuh sebesar 2,79 persen (*c-to-c*). Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 13,78 persen; diikuti Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,94 persen; Komponen Pengeluaran Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 3,63 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,67 persen; dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 0,47 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 11,26 persen.

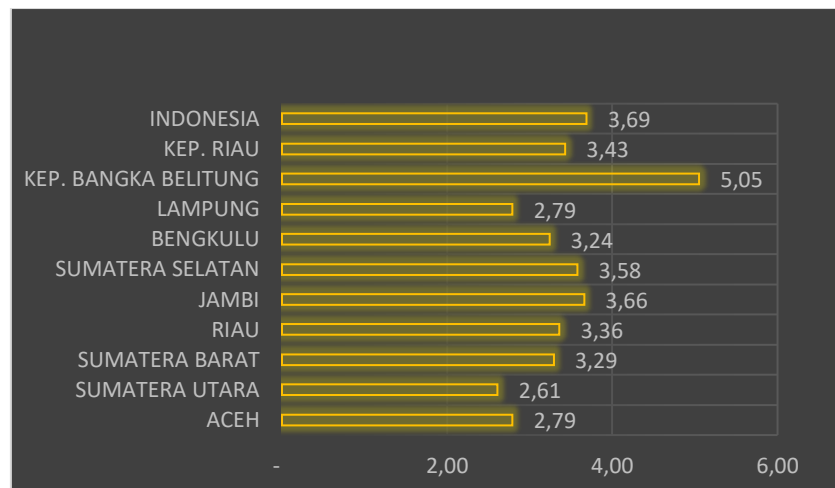
Struktur PDRB Provinsi Lampung menurut pengeluaran (ADHB), masih didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih dari separuh PDRB Provinsi Lampung yaitu sebesar 61,84 persen; diikuti oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 47,00 persen; Komponen PMTB sebesar 33,78 persen; Komponen PK-P sebesar 7,91 persen; Komponen PK-LNPRT sebesar 1,71 persen; dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,22 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 52,47 persen

Jika dibandingkan dengan daerah provinsi setara dalam lingkup regional Sumatera, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung tahun 2021 berada pada posisi terendah kedua Bersama Provinsi Aceh dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,79. Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Lampung dan Sumatera dapat dilihat pada grafik II-3.





Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Se-Sumatera tahun 2020



Pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota se-Provinsi Lampung pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 5 kabupaten/kota yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi di atas angka pertumbuhan ekonomi Provinsi, yaitu Kabupaten Lampung Tengah (-1,02%), Kabupaten Lampung Barat (1,14%), Kabupaten Way Kanan (-1,16), diikuti Kabupaten Pesisir Barat (1,17%) dan Kabupaten Pringsewu (1,21%). Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel II-17.

Tabel. 3.2.55 Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2016 – 2020 (Persen)

Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi				
	2016	2017	2018	2019	2020
Bandar Lampung	6,43	6,28	6,20	6,21	-1,85
Metro	5,90	5,66	5,68	5,58	-1,79
Tulang Bawang	5,42	5,45	5,42	5,41	-1,36
Lampung Tengah	5,61	5,27	5,33	5,35	-1,02
Pesisir Barat	5,30	5,33	5,33	5,37	-1,17
Tulang Bawang Barat	5,27	5,55	5,27	5,36	-1,32
Lampung Utara	5,10	5,21	5,31	5,33	-1,45
Mesuji	5,10	5,20	5,30	5,26	-1,35
Provinsi Lampung	5,14	5,16	5,23	5,26	-1,67
Lampung Barat	5,01	5,03	5,09	5,19	-1,14
Way Kanan	5,12	5,11	5,18	5,17	-1,16
Lampung Selatan	5,22	5,46	5,23	5,13	-1,73
Pringsewu	5,04	5,11	5,01	5,04	-1,21
Tanggamus	5,18	5,19	5,01	5,02	-1,77
Pesawaran	5,07	5,01	5,05	5,00	-1,26
Nasional	5,03	5,07	5,17	5,02	-2,07
Lampung Timur	4,54	4,58	3,71	3,81	-2,29

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022





Tabel 3.2.56 Pencapaian Sasaran 14 (2019-2022)

Sasaran 14											
Sasaran 14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani										
IKU_(15/20)	Nilai Tukar Petani										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	103,2	-	107	94,73	88,54	101-102	101,23	100,22	102-103	104,30	102,25

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023

Sasaran Meningkatkan Kesejahteraan Petani memiliki 1 (satu) indikator **Nilai Tukar Petani** dengan capaian 104,30% dari target 102-103% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 102,25%. Realisasi pada tahun 2019 sebesar 103,2% dan tahun 2020 sebesar 94,73%. Pada tahun 2021 realisasi indikator ini kembali mengalami peningkatan sebesar 101,23% dan tahun 2022 sebesar 104,30%. Sehingga bila dibandingkan dengan capaian tahun 2021 maka kinerja tahun ini meningkat 3,07%.

Tabel 3.2.57 Pencapaian Sasaran 14

Sasaran 14		
Sasaran 14	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	
IKU _(15/20)	Nilai Tukar Petani	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	107,33
105-106	99,33	

Sumber: BPS, BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 99,33%. Sedangkan dibandingkan dengan realisasi nasional maka Lampung lebih rendah 3,03 poin dari standar nasional.

NTP merupakan indikator proxy kesejahteraan petani dengan perhitungan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). nilai NTP diketahui dengan range sebagai berikut:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.





- b. $NTP = 100$, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- c. $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Tujuan dan manfaat dari perhitungan NTP yaitu:

- 1. Dari Indeks Harga Yang Diterima Petani (It), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dihasilkan petani. Indeks ini digunakan juga sebagai data penunjang dalam penghitungan pendapatan sektor pertanian.
- 2. Dari Indeks Harga Yang Dibayar Petani (Ib), dapat dilihat fluktuasi harga barang-barang yang dikonsumsi oleh petani yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat di pedesaan, serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Perkembangan Ib juga dapat menggambarkan perkembangan inflasi di pedesaan.
- 3. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.
- 4. Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain. Atas dasar ini upaya produk spesialisasi dan peningkatan kualitas produk pertanian dapat dilakukan.

Cakupan Komoditas dalam NTP yaitu:

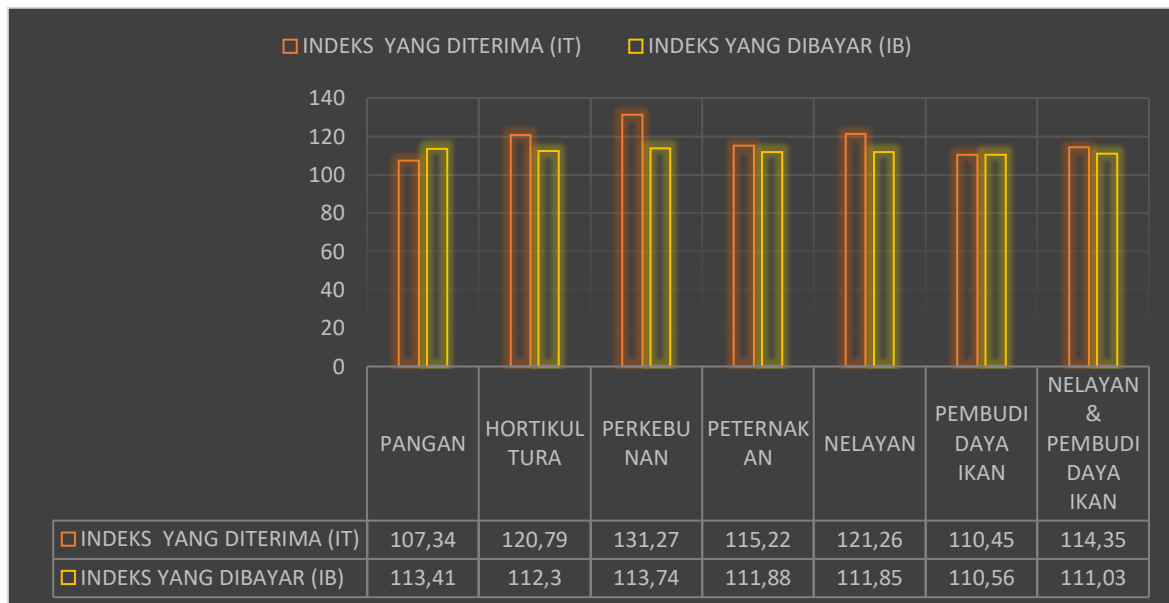
- 1. Sub Sektor Tanaman Pangan seperti: padi, palawija
- 2. Sub Sektor Hortikultura seperti : Sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias & tanaman obat-obatan
- 3. Sub Sektor Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR) seperti: kelapa, kopi robusta, cengkeh, tembakau, dan kapuk odolan. Jumlah komoditas ini juga bervariasi antara daerah





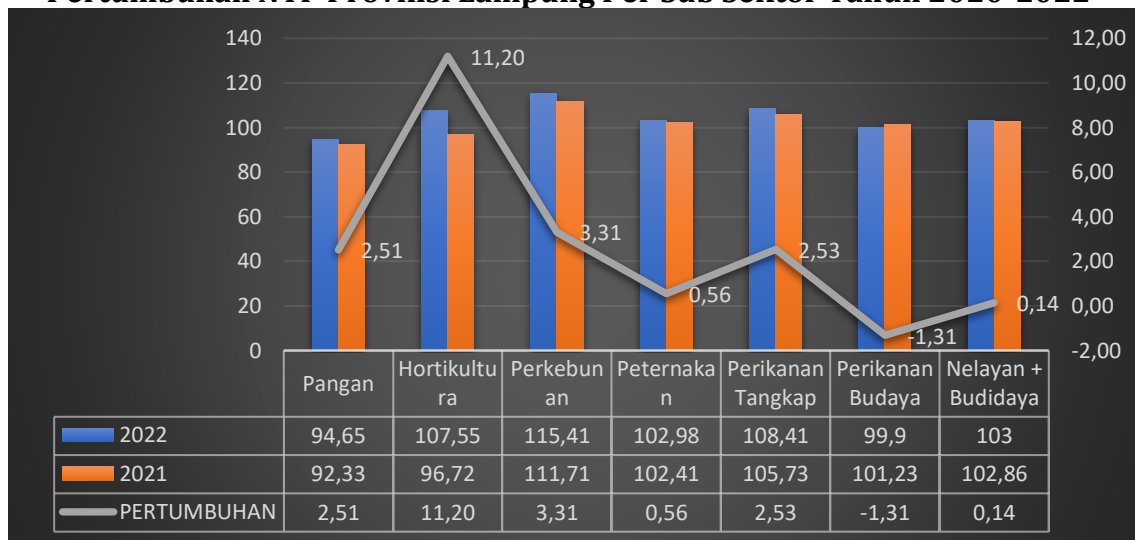
4. Sub Sektor Peternakan seperti : ternak besar (sapi, kerbau), ternak kecil (kambing, domba, babi, dll), unggas (ayam, itik, dll), hasil-hasil ternak (susu sapi, telur, dll)
5. Sub Sektor Perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.

Perkembangan Indeks Yang Diterima Petani dan Indeks Yang Dibayar
Petani Tahun 2019-2022

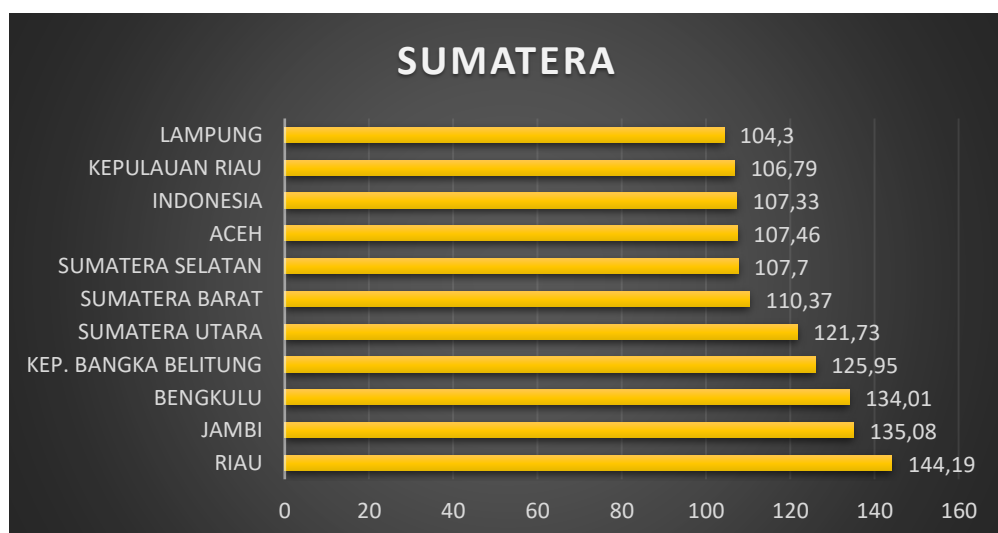


Kemudian secara sektoral, peningkatan NTP terbesar terjadi pada subsektor perkebunan sebesar 12,92% (yoy) dari 98,93 pada Tahun 2020 menjadi 111,71 pada Tahun 2021. Sedangkan subsektor yang mengalami penurunan terbesar adalah hortikultura yaitu sebesar -0,28% (yoy) sejalan dengan konsumsi masyarakat yang masih rendah diiringi dengan distribusi hasil panen yang kurang optimal sebagai dampak dari pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas, faktor cuaca serta harga produk hortikultura yang fluktuatif.



**Pertumbuhan NTP Provinsi Lampung Per Sub Sektor Tahun 2020-2022**

Secara spasial, bila dibandingkan dengan wilayah regional Sumatera, NTP Provinsi Lampung berada di posisi terendah kedua. NTP tertinggi dimiliki oleh Provinsi Riau dengan NTP sebesar 138,72 dan Provinsi Bengkulu (132,6) diikuti dengan Provinsi Jambi (126,89). Nilai Tukar Petani wilayah Sumatera ditampilkan pada Grafik II-.

Nilai Tukar Petani se-Sumatera Tahun 2022

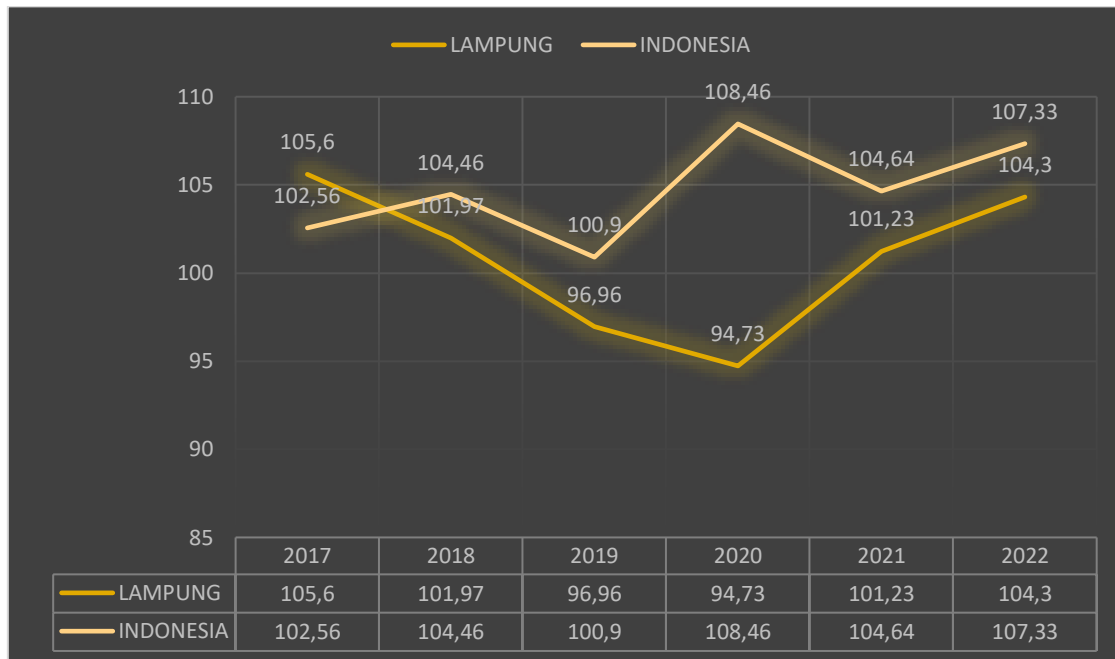
Bila dibandingkan secara Nasional, NTP Provinsi Lampung dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu berada diatas NTP Nasional, bahkan pada Tahun 2017, NTP Provinsi Lampung mencapai 107,35. Namun pada Tahun 2019 mengalami





penurunan dan berada dibawah Nasional sampai dengan Tahun 2021, dan mulai mengalami peningkatan dengan NTP senilai 101,23.

**Tren Nilai Tukar Petani Provinsi Lampung dan Indonesia
Tahun 2016-2022**







KARTU PETANI BERJAYA

Petani yang telah terdaftar dalam Program KPB sampai dengan 06 Desember 2021 sebanyak 212.224 orang

- pupuk bersubsidi melalui aplikasi KPB tercatat sebanyak 119.492 orang di 75 Kabupaten/Kota
- Realisasi penyaluran KUR Tani per tanggal 6 Desember 2021 sebesar Rp. 106.440.740.000,- untuk 8.180 debitur petani
- Petani anggota KPB yang telah memanfaatkan fasilitas program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) per tanggal 6 Desember 2021 seluas 15.940,53 Ha

KARTU PETANI BERJAYA

Kejasama antara Pemerintah Provinsi Lampung Dengan Perguruan Tinggi Negeri untuk memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi yang kurang mampu, antara lain:

1. POLUNILA
 - a. Beasiswa bagi mahasiswa Politeknik Pertanian sebanyak 100 mahasiswa pertanian
 - b. Beasiswa bagi mahasiswa Politeknik Perikanan sebanyak 100 mahasiswa perikanan
2. ITERA - Beasiswa untuk 100 mahasiswa pertanian Institut Teknologi Sumatera
3. UNILA - Diberikan kepada 100 mahasiswa pertanian UNILA

PEMBERANTASAN PEREDARAN PUPUK PALSU

Jumlah kerja nomor 22



Provinsi Lampung pada tahun 2020 mendapat alokasi pupuk subsidi dalam rangka pemberantasan pupuk palsu yaitu urea sebanyak 314.087 ton, 2a : 51.486 ton, NPK : 250.487 ton, SP-36 : 56.668 ton dan pupuk organik : 56.145 ton. Secara keseluruhan alokasi pupuk subsidi untuk Provinsi Lampung Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 49,83% dibandingkan Tahun 2019



NELAYAN BERJAYA

Jumlah kerja nomor 23



Provinsi Lampung menjadi daerah pertama yang melakukan kerjasama dengan BP Jamsostek untuk perlindungan kerjasama baik untuk nelayan kecil, Anak Buah Kapal <30 GT dan khusus untuk nelayan lanjut usia.

Jaminan pertanggungan yang diberikan yaitu kematian saat melaut, kematian yang berhubungan dengan pekerjaan nelayan, cacat total, cacat tetap, biaya rumah sakit dan beasiswa untuk 2 anak sampai sarjana.

REVITALISASI LADA

Jumlah kerja nomor 24



Intensifikasi, Rehabilitasi, Peremajaan dan Perluasan Tanaman Semusim dan Rempah:

1. Uji coba Lada Sambung Tahun Pithoptora di Kabupaten Way Kanan (Tahun ke 2)
2. Uji coba Lada Sambung Tahun Pithoptora di Kabupaten Lampung Utara (Tahun ke 1)
3. Uji coba Inter cropping kopi dengan dengan Lada Sambung di Kabupaten Tanggamus (Tahun ke 2)
4. Intensifikasi Tanaman Lada di Kabupaten Lampung Timur (Percobaan pengembangan lada di Provinsi Lampung ada di Desa Sukadana Baru, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur

PENYERAHAN PENGHARGAAN Bidang Pertanian 2021

Jakarta, 23 September 2021

Provinsi Lampung

Senas, 23 September 2021



PENGHARGAAN ABDI BAKTI TANI TAHUN 2021

Peringkat 1 Nasional

Dari Menteri Pertanian RI yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Kategori Provinsi dengan Peningkatan Produksi Padi Tertinggi Tahun 2020 sebesar 22,47 % dengan produksi padi sebanyak 2,7 Juta Ton

Senas, 23 September 2021

GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXII TAHUN 2021

Provinsi Lampung sebagai JUARA UMUM

- Juara 1 Kategori Inovasi Teknologi Tepat Guna dengan inovasi Sistem Pengolahan Diversifikasi Produk Berbasis Maggot
- Juara 3 Kategori Teknologi Tepat Guna (TTG) Unggulan, Lampung dengan inovasi Mesin Pengelola Serba Guna

Senas, 20 September 2021



PROVINSI LAMPUNG JUARA UMUM GELAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA NASIONAL XXII TAHUN 2021





Tabel 3.2.58 Pencapaian Sasaran 15 (2019-2022)

Sasaran 15											
Sasaran 15	Menjaga stabilitas harga										
IKU _(16/20)	Laju Inflasi										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	3,44	87,21	3-3,5	2	150	3±1	2,19	109,5	3±1	5,51	62,25

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya menjaga stabilitas harga memiliki 1 (satu) indikator **laju inflasi** dengan capaian 5,51% dari target 3±1% yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022. Sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 62,25%. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan Inflasi mulai terasa pada bulan Mei, yang di dorong oleh meningkatnya permintaan pada Hari Besar Agama, kemudian terjadi peningkatan pada bulan Juli sebagai dampak dari kenaikan Tarif Listrik, serta harga BBM pada Bulan September. Realisasi laju inflasi pada tahun 2019 sebesar 3,44% dan pada tahun 2020 sebesar 2%. Tahun 2021 sebesar 2,19% dan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,51% dengan faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Tabel 3.2.59 Pencapaian Sasaran 15 (2024-Nasional)

Sasaran 15		
Sasaran 15	Menjaga stabilitas harga	
IKU _(16/20)	Laju Inflasi	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	5,51
3±1	62,25	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 62,25%. Bila dibandingkan dengan realisasi nasional, realisasi Provinsi Lampung sama dengan realisasi nasional.





Trend inflasi Provinsi Lampung memiliki pola yang sama dengan nasional dan pada tahun 2022 angka inflasi Provinsi Lampung sama dengan nasional sebesar 5,51%. Desember 2021 terhadap Desember 2020 sebesar 2,19 persen, lebih tinggi bila dibandingkan inflasi tahun ke tahun Desember 2020 terhadap Desember 2019 yang sebesar 2,00 persen. Desember 2019 terhadap Desember 2018 sebesar 3,44 persen (tertinggi dalam tiga tahun terakhir).



Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara. Sedangkan Indeks Harga konsumen (IHK) adalah suatu indeks, yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK). Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang/jasa kebutuhan rumah tangga sehari-hari.

Capaian inflasi IHK tahun 2020 tercatat sebesar 2,00% (yoy) atau melambat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3,44% (yoy). Inflasi yang rendah tersebut dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19, pasokan yang memadai, dan sinergi kebijakan melalui Tim





Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga. Meski demikian, capaian tersebut tercatat lebih tinggi dibandingkan inflasi Nasional dan Sumatera yaitu sebesar 1,69% (yoy) dan 1,90% (yoy).

Rendahnya realisasi inflasi pada tahun 2020 didukung oleh capaian kelompok inflasi yang terkendali. Inflasi kelompok inti terpantau menurun pada tingkat yang rendah, sebesar 1,52% (yoy) dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 3,38% (yoy). Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan permintaan masyarakat akibat pandemi COVID-19 sejak Maret 2020. Sementara itu, inflasi kelompok volatile foods tercatat melambat sebesar 4,19% (yoy), atau lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yakni 5,59% (yoy). Melambatnya inflasi pangan disebabkan oleh penurunan permintaan dari sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) sebagai dampak merebaknya pandemi COVID-19. Efektivitas TPID dalam menjaga kecukupan pasokan bahan pangan strategis, semakin mendorong tercapainya inflasi volatile foods yang terkendali di tahun 2020. Di sisi lain, tekanan inflasi administered prices tahun 2020 relatif meningkat dari 0,76% (yoy) pada tahun 2019 menjadi 1,35% (yoy) seiring dengan kenaikan cukai rokok, tarif penyeberangan Merak-Bakauheni, dan bahan bakar rumah tangga.

Tabel 3.2.60 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1. Meningkatnya pasokan akibat panen beberapa komoditas seperti cabai merah, jeruk, telur ayam, cabai rawit, kangkong dan ikan mas 2. Masuknya masa panen di beberapa sentra produksi sehingga terjadi peningkatan pasokan 3. Penurunan harga pada beberapa komoditas seperti telur ayam ras, cabai rawit, minyak goreng, daging ayam ras dan sabun detergen bubuk	1. Penurunan permintaan masyarakat akibat pandemic covid-19 2. Peningkatan harga pada beberapa komoditas seperti; mobil, beras, rokok kretek filter, sepeda motor dan kue kering minyak	1. <i>High Level Meeting</i> Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2. Review kecukupan pasokan dan perkembangan harga-harga kebutuhan pokok di pasar, distributor, dan Gudang oleh TPID 3. Kerjasama antar Daerah 4. Kelancaran distribusi	1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan 2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 3. Program Pengembangan Ekspor 4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen 5. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri





Tabel 3.2.61 Pencapaian Sasaran 16 (2019-2022)

Sasaran 16											
Sasaran 16	Menurunnya kemiskinan										
IKU _(17/20)	Angka Kemiskinan										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
12	12,3	95,10	11,1	12,76	89,95	12,76-12,4	11,67	109,34	12,4-11,9	11,44	107,74

Sumber: BPS Lampung, Januari 2022

Sasaran menurunnya kemiskinan memiliki 1 (satu) indikator **angka kemiskinan** dengan capaian 11,44% dari target 12,4-11,9% yang direncanakan **dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022** sehingga persentase capaian kerjanya adalah 107,74%. Dilihat dari tabel di atas, realisasi tahun 2019 sebesar 12,3%, tahun 2020 sebesar 12,76%, tahun 2021 sebesar 11,67% dan tahun 2022 11,44% sehingga bila dibandingkan dari tahun 2019 sampai 2022 angka kemiskinan di Provinsi Lampung mengalami penurunan.

Tabel 3.2.62 Pencapaian Sasaran 16 (2024-Nasional)

Sasaran 16		
Sasaran 16	Menurunnya kemiskinan	
IKU _(17/20)	Angka Kemiskinan	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	9,57
11,4-10,9	99,65	

Sumber: BPS Lampung, Januari 2022

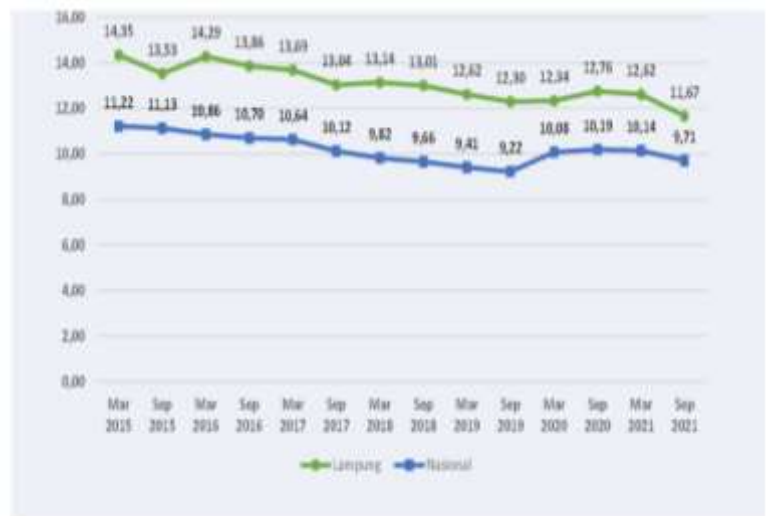
Berdasarkan tabel di atas apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 99,65% dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional maka lebih tinggi 1,87%.





Indeks Kemiskinan Lampung

Berdasarkan grafik di samping, indeks kemiskinan Provinsi Lampung cenderung mengalami penurunan. Jika dilihat dalam grafik, indeks kemiskinan Provinsi Lampung mengalami peningkatan pada rentang waktu 2020 sampai dengan 2021. Hal ini disebabkan karena pada tahun tersebut terjadi pandemic *covid-19* yang menyebabkan banyak sektor terdampak sehingga angka kemiskinan turut meningkat di tahun tersebut.



Sumber: Ditah dan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Pada bulan september 2021, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan) di lampung mencapai 1,01 juta orang (11,67 persen), turun sebesar 76,9 ribu orang di bandingkan dengan kondisi Maret 2021 yang sebesar 1,08 juta orang (12,62 persen).



Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan pada September 2021 tercatat sebesar 75,29 persen. Kondisi ini menurun dibandingkan dengan kondisi Maret 2021 yaitu sebesar 75,58 persen.





Gini Rasio pada September 2021 adalah sebesar 0,314. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan Maret 2021 yang sebesar 0,323. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Provinsi Lampung termasuk kategori ketimpangan rendah.

Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, September 2020–September 2021

Daerah/Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
III	III	III
Perkotaan		
September 2020	259,28	9,59
Maret 2021	254,60	9,29
September 2021	236,48	8,50
Perdesaan		
September 2020	831,86	14,22
Maret 2021	829,83	14,18
September 2021	770,34	13,18
Total		
September 2020	1.091,14	12,76
Maret 2021	1.084,43	12,62
September 2021	1.007,02	11,67

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susewas) September 2020, Maret 2021, dan September 2021

Tabel 3.2.63 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
1. Terbukanya pasar tenaga kerja global 2. Regulasi investasi yang dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	1. Kenaikan harga pada bahan makanan di tengah masyarakat; 2. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan 3. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan akibat pandemi <i>covid-19</i>	Mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru dengan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan dan dunia usaha sesuai dengan potensi daerah pada berbagai sektor melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat





Tabel 3.2.64 Pencapaian Sasaran 17 (2019-2022)

Sasaran 17											
Sasaran 17	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
IKU _(18/20)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)										
Satuan	Indeks										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
57,13	59,28	103,76	59,63	66,95	112,27	68,23	68,56	100,48	68,66	69,10	100,64

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Januari 2023

Sasaran peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)** dengan capaian 69,10 dari target 68,66 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,64%. Jika dilihat dari tabel di atas, realisasi IKLH setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tahun 2019 realisasi IKLH sebesar 59,28, tahun 2020 sebesar 66,95 dan tahun 2021 sebesar 68,56.

Tabel 3.2.65 Pencapaian Sasaran 17

Sasaran 17		
Sasaran 17	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
IKU _(18/20)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian	72,42
69,51	99,41	

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 99,41%. Namun apabila dibandingkan dengan standar nasional maka Lampung lebih rendah 3,32% poin dari standar nasional.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah salah satu cara untuk mereduksi banyaknya data dan informasi mengenai kualitas lingkungan hidup sehingga dapat dijadikan sebagai parameter untuk membandingkan kualitas lingkungan hidup dari suatu wilayah dengan wilayah lain. Indikator ini diukur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan menggunakan metode survey. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup idealnya mengindikasikan kondisi lingkungan secara garis besar dan secara cepat.





Kondisi ini memiliki makna bahwa lingkungan hidup di Provinsi Lampung masih belum memenuhi kriteria lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana yang tertuang dalam UUD 45 pasal 28 H ayat (1). Apabila dilihat per media, kualitas air, udara, lahan, dan air laut masih berada dibawah rata-rata Nasional sehingga perlu kerjakeras semua pemangku kepentingan di Provinsi Lampung untuk menaikkan nilai indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) .

Angka indikatif ini mungkin masih berada dalam ranah perdebatan namun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup ini dapat menjadi acuan yang memberikan gambaran kualitas lingkungan secara umum. Tentu diperlukan kajian yang lebih mendalam lagi untuk semakin mendekati kondisi senyatanya yang dapat dilihat dan dirasakan oleh publik. Namun, IKLH sudah dapat dijadikan alat yang membantu proses pembuatan keputusan atau kebijakan. Penyempurnaan IKLH merupakan upaya yang kontinu. Demi mencapai IKLH yang lebih baik, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam peningkatan IKLH, yaitu:

IKLH perlu dikembangkan sebagai salah satu alat pendukung pembuatan keputusan (*Decision making support*);

4. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan lingkungan hidup menjadi urusan

wajib sehingga penyusunan program dan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara sinergis, oleh karena itu diperlukan dukungan pemerintah pusat dan sinergisitas program lingkungan hidup antara Provinsi dengan Kabupaten dan Kota untuk menyelesaikan isu-isu strategis permasalahan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

5. Dalam pengelolaan lingkungan hidup juga diperlukan peran dan partisipasi aktif stakeholders (Perguruan Tinggi/Universitas, NGO, Perusahaan, masyarakat, dll), untuk itu setelah rapat koordinasi dipandang perlu untuk ditindaklanjuti segera dengan mengundang stakeholders tersebut agar bekerjasama dan terlibat dalam program/kegiatan penanganan permasalahan pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.





6. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung perlu mengadakan workshop tentang Inventarisasi dan Investasi Program-program Lingkungan Hidup Stakeholders di Provinsi Lampung (khususnya LSM lokal dan Internasional, Perusahaan, Universitas, dll), sehingga dapat menghasilkan peta (“mapping”) fokus program-program stakeholders yang dapat memberikan informasi bagi penentu kebijakan untuk mengambil keputusan dan membuat program penanganannya sesuai dengan permasalahan lingkungan hidup di wilayah masing-masing (Kabupaten/kota se Provinsi Lampung).
7. Pencapaian Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,56 provinsi berdasarkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) adalah tanggungjawab bersama, dan hanya dicapai melalui serangkaian tindak perbaikan terhadap teknis pelaksanaan program/kegiatan yang telah atau akan dilakukan. Dengan kata lain IKLH tidak akan meningkat apabila program/kegiatan yang akan dilakukan tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perubahan peningkatan kualitas lingkungan.
8. Secara umum permasalahan Lingkungan Hidup yang terjadi di Provinsi Lampung berkaitan dengan air, sampah, dan daya dukung lingkungan yang terus berkurang, oleh karena itu pada setiap PD Kabupaten/Kota yang terkait dengan lingkungan hidup harus mampu membuat program/kegiatan yang tepat dan terukur sehingga dapat meminimalisir dampak permasalahan tersebut.





Tabel 3.2.66 IKLH Provinsi Lampung 2019-2021

No	Tahun	IKA	Taget SE	IKU	Taget SE	IKL	Taget SE	IKAL	Taget SE	IKLH	Taget SE
1	2019	72,86		82,98		31,31		Belum menjadi parameter		59,28	
2	2020	55,11		86,86		33,93		59,07		66,27	
3	2021	57,77	58,34	85,46	84,24	33,54	38,67	79,56	72,71	68,56	68,23

Pada tahun 2019 perhitungan IKLH dengan komponen IKA, IKU, dan IKTL. Indeks Kualitas Air menggunakan pembobotan IKA, IKU dan IKTL dengan angka rentang sampai dengan 0-100.

IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, dan IKTL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{IKLH Provinsi IKLH} = (0,3 \times \text{IKA}) + (0,3 \times \text{IKU}) + (0,4 \times \text{IKTL})$$

Pada tahun 2020-2024 perhitungan IKLH dengan menggunakan komponen IKA, IKU, IKL, dan IKAL. Pada Indeks Kualitas Air (IKA) menggunakan pembobotan dengan angka rentang 0-70, serta IKU, IKL dan IKAL menggunakan pembobotan dengan angka rentang 0-100. IKLH dihitung dengan melakukan penjumlahan dari semua komponen indeks (IKA, IKU, IKL dan IKAL) yang dikalikan masing-masing bobot dengan menggunakan rumus perhitungan:

$$\text{IKLH Provinsi IKLH} = (0,340 \times \text{IKA}) + (0,428 \times \text{IKU}) + (0,133 \times \text{IKL}) + (0,099 \times \text{IKAL})$$

Dari hasil perhitungan sementara, IKLH Provinsi Lampung Tahun 2021 adalah sebesar 68,56 dengan kriteria **SEDANG**.





Tabel 3.2.67 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi, Program dan Kegiatan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program	Kegiatan Pendukung
1. Konsistensi rencana operasional kinerja kegiatan sesuai dengan prioritasnya; 2. Pengujian parameter kualitas lingkungan dilakukan UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan telah teregistrasi di KLHK	1. Keterbatasan dana baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pemantauan kualitas lingkungan; 2. Terbatasnya SDM Kabupaten/Kota yang memahami dan menguasai pemantauan kualitas lingkungan	Meningkatkan kapasitas SDM Kabupaten/Kota melalui Bimtek pemantauan kualitas lingkungan untuk mendukung capaian indeks kualitas lingkungan	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan hidup; 2. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;	1. Pemantauan Kualitas Lingkungan; 2. Pemberian Informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; 3. Pemulihan pencemaran dan penghentian sumber pencemaran; 4. Pemberian Penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi;





Tabel 3.2.68 Pencapaian Sasaran 18 (2019-2022)

Sasaran 18											
Sasaran 18	Meningkatnya Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca										
IKU ^(19/20)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca										
Satuan	Persentase										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
-	6,28	-	-	6,86	-	6,74	6,74	100	6,914	12,84	185,68

Sumber: BAPPENAS, Februari 2023

Sasaran meningkatnya menurunnya tingkat emisi gas rumah kaca memiliki 1 (satu) indikator **Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca** dengan capaian 12,84 dari target 6,914 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 185,68%. Pada tahun 2019 realisasi indikator ini sebesar 6,28%, tahun 2020 sebesar 6,86%, tahun 2021 sebesar 6,74% dan tahun 2022 sebesar 12,84%. Sehingga realisasi penurunan emisi gas rumah kaca mengalami peningkatan setiap tahunnya. Indikator ini merupakan indikator baru dalam Perubahan RPJMD Provinsi Lampung.

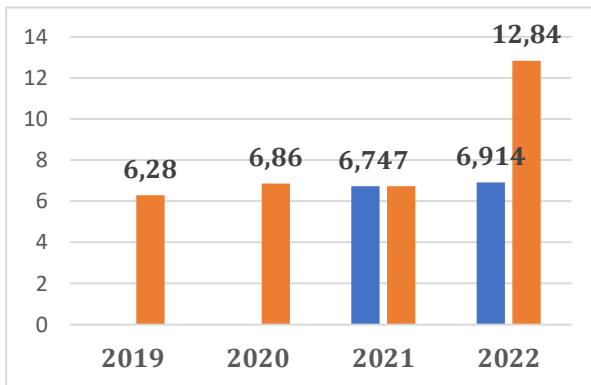
Tabel 3.2.69 Pencapaian Sasaran 18 (2024-Nasional)

Sasaran 18		
Sasaran 18	Meningkatnya Menurunnya Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca	
IKU _(19/20)	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	
Satuan	Persentase	
2024		Nasional
Target	Capaian	22,36
7,29	176,131	

Sumber: AKSARA BAPPENAS, 2023

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 176,131% dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional selisih 9,52 poin.





Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang sedang giat membangun, khususnya bidang ekonomi tentunya akan banyak menghasilkan sumber emisi GRK. Berbagai kegiatan seperti pertanian, kehutanan, peternakan, industri, transportasi, dan pengelolaan

limbah tentu saja akan mengemisikan GRK. Secara umum menurut IPCC *guidelines* kegiatan yang menghasilkan emisi GRK terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu emisi berbasis energi, emisi dari proses produksi dan penggunaan produk, emisi berbasis lahan, dan emisi dari limbah. Gas Rumah Kaca sendiri terdiri dari 6 (enam) jenis gas, yaitu: karbondioksida (CO_2), dinitro oksida (N_2O), metana (CH_4), sulfur-heksaflorida (SF_6), perflorokarbon (PFCs), dan hidroflorokarbon (HFCs).

Pemerintah telah menerbitkan Perppres No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Perppres No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi GRK, keduanya merupakan salah satu instrumen untuk mencapai target penurunan emisi GRK. Tindak lanjut dari Perppres tersebut, Pemprov Lampung menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 32 A tahun 2021 tentang Rencana Aksi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Lampung.

Pada tahun 2022 ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan.

Untuk mengetahui tingkat emisi GRK di Provinsi Lampung sebelum adanya kegiatan penurunan emisi dan proyeksinya di masa datang, maka perlu dilakukan penghitungan emisi *baseline*. Secara agregat berdasarkan hasil perhitungan seluruh pokja, emisi GRK BAU *Baseline* Provinsi Lampung di tahun dasar 2010 atau yang





lebih dikenal sebagai BAU Baseline adalah sebesar: 7.041.720,01 ton CO₂ equivalen.

Secara rinci emisi GRK per sektor adalah sebagai berikut:

- a. Sektor Pertanian sebesar 4,036,415.2 ton CO₂eq
- b. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut sequestrasi sebesar 580.550,69 ton CO₂eq
- c. Sektor Energi sebesar 597.798,30 ton CO₂eq
- d. Sektor Transportasi sebesar 1.630.468,0 ton CO₂eq
- e. Sektor Industri sebesar 323.442,66 ton CO₂eq
- f. Sektor Pengelolaan Limbah sebesar 781.931,17 ton CO₂eq

Khusus untuk sektor kehutanan dan lahan gambut tidak menjadi sektor penyumbang emisi. Hal ini terlihat dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka negatif. Ini bisa diartikan bahwa sektor kehutanan dan lahan gambut dengan program pembangunan yang saat ini dilaksanakan telah menghasilkan sequestrasi (penyerapan gas karbon). Namun demikian, mengingat pertumbuhan emisi yang tinggi dari sektor yang lain, maka perbaikan rencana pembangunan dengan melakukan beberapa rencana aksi (mitigasi) di sektor ini diharapkan akan meningkatkan kemampuannya dalam mensequestrasi emisi GRK yang dihasilkan oleh kelima sektor pembangunan lainnya.

Pertumbuhan emisi BAU *baseline* gas rumah kaca Provinsi Lampung dari tahun 2010 hingga tahun 2021 secara umum mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini ditandai dengan pertambahan jumlah emisi GRK hingga menjadi sebesar 33.742.451,62 ton CO₂eq di tahun 2021 atau sebesar 479% dari emisi tahun 2010 atau setara dengan emisi GRK sebanyak 30.581.747,75 ton CO₂eq.

Pertumbuhan emisi GRK Provinsi Lampung selama 5 tahun terakhir (2017-2021) adalah sebesar 30.581.746,12 ton CO₂eq. Sektor Kehutanan & Lahan Gambut dan sektor Transportasi menjadi penyumbang terbesar pelepasan emisi gas-gas rumah kaca, yaitu masing-masing sebesar 49,6 % dan 28,2 % dari total emisi dan menjadi penyumbang tertinggi diantara 6 sektor. Adapun emisi total yang dapat diturunkan di Provinsi Lampung selama kurun waktu 5 tahun (2017 s.d 2021) BAU *Baseline* adalah sebesar 15.598.629,96ton CO₂eq atau menurunkan sekitar 10,4 % dari total





emisi BAU *Baseline* Provinsi Lampung tahun 2017-2021 (150.252.439,53 ton CO₂eq).

Tabel 3.2.70 Penurunan Emisi GRK

Bidang	Sektor	Emisi GRK (ton CO ₂ eq)		Penurunan emisi pada 2020 (ton CO ₂ eq)	Persentase
		BAU 2021	Mitigasi 2021		
Landbased	1. Pertanian	6584309,20	6579090,41	5218,79	0,08%
	2. Kehutanan & Lahan Gambut	16953402,20	13930814,08	3022588,12	17,83%
Energi	3. Energi	1869561,13	1860374,13	9187,00	0,49%
	4. Transportasi	6917043,05	6806367,55	110675,50	1,60%
Limbah	6. Pengelolaan Limbah	1418136,04	1405099,95	13036,09	0,92%
Total		33.742.451,62	30.581.746,12	3.160.705,50	9,37%

Sumber: Data Kalkulasi Dashboard AKSARA Provinsi Lampung, 2022

Pada tahun 2021, Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Kaji Ulang Rencana Aksi Penurunan Emisi GRK Provinsi Lampung dengan beberapa output antara lain BAU (*Business as Usual*) Baseline emisi GRK Provinsi Lampung tahun 2020-2030. Berdasarkan perhitungan Business as Usual (BAU) dapat diketahui bahwa besar emisi pada Provinsi Lampung tanpa aksi mitigasi pada tahun 2030 dari aktivitas di Provinsi Lampung diproyeksikan sebesar 27.629.786,24 ton CO₂ eq. Penghasil emisi gas 8 rumah kaca terbesar secara berurutan berasal dari sektor energi dan transportasi (93,06%), sektor pengelolaan limbah (6,39%), sektor pertanian (0,53%), sektor kehutanan dan lahan gambut (0,02%). Adapun hasil kompilasi dan perhitungan oleh Pokja RAD GRK Provinsi Lampung, estimasi penurunan emisi GRK pada tahun 2030 adalah sebesar 8,40% dari BAU *baseline* tahun 2030. Berikut ini adalah nilai *baseline* dan perkiraan penurunan emisi pada tahun 2021 berdasarkan hasil kaji ulang yang akan menjadi dasar perhitungan capaian target penurunan emisi GRK tahun 2021 dan dilaporkan pada tahun 2022:

Dari sektor pengelolaan limbah didukung beberapa kegiatan:

- Pembangunan MCK Plus TPI Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi sebanyak 18.396 ton CO₂ eq;





- Pembangunan MCK Plus Makam Pahlawan Radin Inten II Desa Harta Kecamatan Penengahan Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan MCK Plus Yayasan Al Bidayah Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan MCK Plus Yayasan Pondok Pesantren Amin Jabal Qubba Kampung Bumi Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan MCK Plus Terminal Simpang Propau Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan MCK Plus Ponpes Anwarul Maghfiroh 2 Desa Kedondong, Kec. Kedondong, Kab. Pesawaran sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan Bantuan MCK Plus SPN Kemiling Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq;
- Pembangunan MCK Plus Panti Asuhan Yatim Piyatu Darussalam Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung sebanyak 1 unit Septik Tank menghasilkan pengurangan emisi 18.396 ton CO₂ eq.

Pada sektor Pengelolaan Limbah didalamnya termasuk pengelolaan persampahan. Dimana dari hasil kegiatan Persampahan Tahun 2021, di dapatkan penurunan emisi GRK sebesar 31,028 ton CO₂ eq, yang berasal dari kegiatan Pembinaan terhadap beberapa Bank Sampah pada menjadi Desa *Smart Village* yang Desa TPS 3R yang telah melaksanakan pembinaan TPS 3R. Pembinaan tersebut dilaksanakan dengan maksud mengedukasi Desa *Smart Village* agar cerdas dalam pengelolaan sampah desa dalam hal penanganan dan pengurangan sampah sehingga Desa *Smart Village* dan Desa TPS 3R agar lebih baik lagi dalam pengelolaan sampah. Dengan hal tersebut diharapkan akan mampu mendukung program Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah 2025 dengan target 30% sampah





dikurangi dan 70% sampah tertangani. Beberapa desa Smart Village dan Desa TPS 3R di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Desa Podomoro, Kec. Pringsewu
2. Desa Sukanegara /Talang Padang, Kab. Tanggamus
3. Desa Sumber Arum, Kec. Kota Bumi, Kab. Lampung Utara
4. Desa Wates Way Ratai, Kab. Pesawaran
5. Desa Tegal Yoso, Kec. Purbolinggo, Kab. Lampung Timur
6. Desa Wates, Kec. Bumi Ratu Nuban, Kab. Lampung Tengah
7. Desa TPS 3R Jejama Secancaan, Kab. Pringsewu

Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 147,17 ton CO₂ equivalen yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO₂ equivalen.

Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Hal ini disebabkan karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 400 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO₂, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO₂, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya. Secara keseluruhan, aksi-aksi mitigasi yang telah dilaksanakan berbagai sektor terkait di Provinsi Lampung pada tahun 2021 tidak dapat mencapai rencana target mitigasi yaitu sebesar 1.331.618 ton CO₂ equivalen, dan total penurunan emisi yang dicapai adalah sebesar 440.530 ton CO₂ equivalen. Pada tahun 2020 ini, sektor Energi menyumbang penurunan emisi paling besar di Provinsi Lampung. Namun, pencapaian penurunan emisi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 26.997 ton CO₂ equivalen.





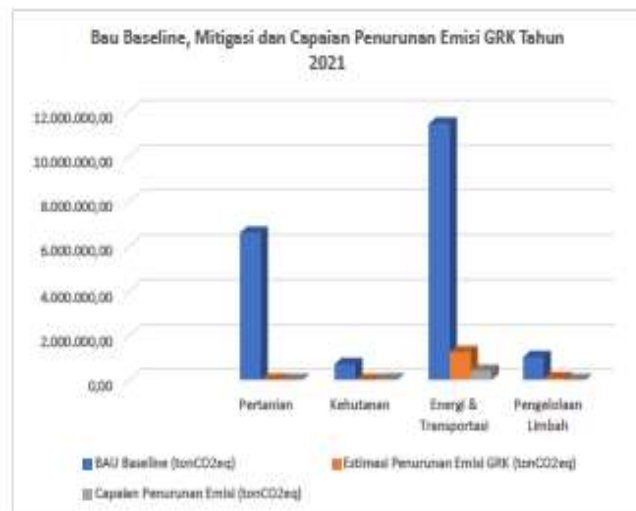
Gambar 3.1 Target Mitigasi 2021 vs PEP 2021

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung, 2022

Tabel 3.2 Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) RAD-GRK Tahun 2021

Bidang Mitigasi	BAU Baseline (tonCO2eq)	Estimasi Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	Capaian Penurunan Emisi (tonCO2eq)
Pertanian	6.584.309,20	12.366,70	2066
Kehutanan	702.561,75	359,74	26684
Energi & Transportasi	11.450.000,00	1.240.000,00	411633
Pengelolaan Limbah	1.023.819,22	78.891,39	147
Total	19.760.690,17	1.331.617,83	440530

Sumber: Hasil Perhitungan Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung, 2022



Pokja RAD-GRK Provinsi Lampung yang terdiri dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya telah melakukan inventarisasi sumber emisi GRK dan menghitung tingkat emisi GRK untuk seluruh sektor yang potensial menghasilkan emisi GRK serta pelaporan PEP RAD-GRK secara online.

Berdasarkan Peraturan Presiden No 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi GRK yang dibagi atas 6 (enam) sektor sebagai berikut:

1. Sektor Pertanian
2. Sektor Kehutanan dan Lahan Gambut
3. Sektor Energi
4. Sektor Transportasi
5. Sektor Industri
6. Sektor Pengelolaan Limbah.

Selain itu Pemerintah Provinsi Lampung juga berupaya agar kegiatan Penurunan Emisi GRK ini menjadi prioritas dalam RKPD Pemerintah Daerah baik Provinsi





maupun Kabupaten/Kota setiap tahunnya. Selanjutnya setelah menjadi kegiatan (DPA) OPD, secara periodik, Pemerintah Provinsi Lampung melalui Pokja RAD GRK akan melakukan identifikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap capaian pelaksanaan RAD GRK di Provinsi Lampung sehingga bisa dilihat capaian tiap sektor penurunan emisi GRK dan bisa juga dilakukan penilaian terhadap capaian penurunan emisi apakah sesuai dengan target ataupun perlu dilakukan upaya-upaya optimasi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan RAD-GRK Provinsi Lampung ditangani oleh Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi, Kelompok Kerja, dan Kesekretariatan Tim untuk Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (POKJA RAD-GRK) Provinsi Lampung melalui Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/56/VI.01/HK/2020.

Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya menurunkan emisi GRK telah melaksanakan kolaborasi kinerja antar perangkat daerah. Salah satu upaya dalam mencapai target penurunan emisi GRK yaitu:

1. Pada sektor energi dan transportasi mengarah pada penerapan/penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dan bersumber dari energi baru terbarukan, dan mengendalikan transportasi publik, bukan hanya rencana untuk menggunakan energi baru terbarukan.
2. Pada sektor pengelolaan limbah dengan pembangunan TPA dan pengelolaan sampah terpadu 3R serta mengfungsikan kembali kondisi TPA yang memprihatinkan.
3. Melaksanakan inventaris kembali cakupan lahan hutan lindung yang bisa dimaksimalkan dalam pembangunan rendah karbon.
4. Mengkaji ulang reviu kebijakan terkait penggunaan pupuk kimia dengan tujuan menurunkan emisi GRK.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Lampung Tahun 2021 menunjukkan penurunan emisi sebesar (Kegiatan Tahun 2021) ditambah 391.829 ton CO₂ equivalen (dari Kegiatan konvert pemakaian Minyak ke LPG yg dicanangkan Tahun 2010 yg Masih di hitung pada Tahun 2021) hal ini juga sama seperti pencapaian Tahun 2020 sebesar 391.829 ton CO₂ equivalen. Maka penurunan emisi gas rumah kaca sektor Energi pada Kegiatan Dinas ESDM tahun





2021 dihitung kovertasi Minyak ke LPG sejak 2010 (total ton CO₂e yg dikurang) termasuk menyumbang 43,058 % dari target Tahun 2021 total sektor Energi (Industri, Transportasi, ESDM). Dimana target pengurangan emisi total pokja Energi tersebut 0,91 Juta Ton CO₂e sedang capaian dari Kegiatan ESDM mengurangi sebesar 0,3918 Juta Ton CO₂e.

Pencapaian Penurunan Emisi di tahun 2021, sama dari pencapaian penurunan emisi di tahun 2020 senilai 0,3918 juta ton CO₂ equivalen Atau 391.829,00 Ton CO₂ e. Faktor yang menghambat naiknya nilai Mitigasi Atau pengurangan emisi, karena baik Kegiatan Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun Anggaran 2021 masih berupa survey dan penelitian serta pengkoleksian data serta pengawasan dalam kaitan perencanaan pembangunan Energi Baru Terbarukan (baik Biogas, Tenaga Surya ataupun Mikro Hidro), sehingga Kegiatan tersebut belum taraf pelaksanaan pembangunan unit pembangkit EBT, sehingga belum bisa dihitung pengurangannya terhadap emisi CO₂ sebelum pembangunan Unit terealisasi di Tahun Tahun berikutnya (diperkirakan/direncanakan pembangunan fisik mulai 2023). Faktor penghambat dalam hal tidak terealisasi pembangunan sampai ke fisik unit pembangkit EBT, terutama yaitu Pandemi COVID 19 yang muncul di Indonesia sekitar bulan Maret Tahun 2020. Faktor yg menjaga kestabilan berkurangnya CO₂e, yaitu keberhasilan Kegiatan secara menerus pengkonversian pemakaian Minyak tanah ke LPG, yang di mulai dari Tahun 2010.

Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan salah satu Perangkat Daerah yang memberikan Kontribusi terhadap Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari sektor Limbah dan Persampahan, dengan kegiatan berupa Gerakan Bank Sampah. Di tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan berupa pemanfaatan kembali sampah anorganik/rongsokan berupa Bank Sampah di Desa Gisting Bawah Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus dimana total sampah yang masuk sebesar 0,1 ton/hari dengan total methane 0,33 Ton CO₂. Kegiatan ini merupakan inisiatif masyarakat sendiri yang dimotori kepala desa setempat. Kegiatan ini telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat berupa tambahan penghasilan dari penjualan sampah bernilai ekonomis. Selain itu adanya pemanfaatan kembali , otomatis mengurangi beban sampah yang masuk ke TPA Kali Miring, Tanggamus. Data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor





pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 66,560 ton CO₂ equivalen yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2019 sebesar 310,80 ton CO₂ equivalen. Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2019 tidak mampu melebihi target mitigasi. Pencapaian Penurunan Emisi di tahun 2019, juga tidak melebihi dari pencapaian penurunan emisi di tahun 2018 senilai 326,350 ton CO₂ equivalen.

Untuk tahun 2021, data hasil input pemantauan, evaluasi dan pelaporan RAD GRK pada sektor pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Pengelolaan Sumber daya Air Provinsi Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan penurunan emisi sebesar 51.52 ton CO₂ equivalen dengan persentase penurunan 15,23 % yang tidak mampu melebihi angka target mitigasi tahun 2020 sebesar 338 ton CO₂ equivalen.

Dengan demikian, penurunan emisi gas rumah kaca sektor limbah tahun 2020 tidak mampu melebihi target mitigasi. Faktor Penghambat, karena Pembangunan MCK dengan kapasitas 140 KK tidak mampu secara signifikan memberikan dampak pengurangan terhadap emisi CO₂, terlebih lagi tidak adanya kegiatan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa bank sampah yang tidak lagi memberikan dampak terhadap penurunan emisi CO₂, karena sudah berubah nya pola pikir masyarakat Bank Sampah untuk lebih memilih pengumpulan kardus daripada sampah lainnya.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti salah satu nya adalah melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan peng-input-an data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RAD-GRK bukan suatu program yang berdiri sendiri dalam RPJMD, melainkan kompilasi program secara implisit atas kegiatan aksi mitigasi yang dilaksanakan oleh beberapa OPD. Di dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, RAD-GRK termasuk di dalam Misi ke-6 yaitu





Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, dengan sasaran berupa Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana. Agenda Kerja Utama dari Misi ke-6 ini adalah Mengelola Lingkungan Hidup untuk kesejahteraan rakyat dan Lampung sebagai Pusat Inkubasi Tanaman Nusantara. Adapun peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan bagian dari sasaran pembangunan berupa peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Namun terkait pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan melalui forum evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota dan pembahasan validasi dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten/Kota. Dan Di Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024, Indikator Kinerja Utama (IKD) dari Lingkungan Hidup salah satunya adalah Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah dan Persampahan.





Tabel 3.2.71 Faktor Pendukung, Penghambat, Program, Solusi dan Kegiatan

Faktor Penghambat	Faktor Pendukung	Program	Solusi	Kegiatan Pendukung
1. Kurangnya komitmen Kabupaten/Kota baik dalam melaksanakan aksi mitigasi RAD GRK maupun dalam melakukan PEP RAD GRK mengingat banyak aksi mitigasi emisi GRK yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta banyak inisiatif yang telah dilaksanakan namun belum tercakup dalam dokumen RAD-GRK terdahulu. (Arahan peraturan perundang-undangan/Pemerintah Pusat, Pembentukan Pokja RAD GRK Kabupaten/Kota). 2. Kelompok Kerja (Pokja) RAD GRK Provinsi Lampung harus memiliki sistem manajemen data/ informasi yang mempermudah penginputan/ transfer data dari kabupaten/kota (dasar hukum/ peraturan gubernur, surat edaran, MoU, dan surat biasa dan sistem aplikasi online).	1. Untuk Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, pada tahun 2021 hingga saat ini telah melaksanakan kegiatan yang mendukung penurunan emisi GRK khususnya pada sektor persampahan berupa kegiatan bank Sampah dan TPS 3R yang pada tahun sebelumnya tidak dilaksanakan. Diharapkan hal tersebut akan berkelanjutan dan semakin ditingkatkan.	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Melakukan internalisasi RAD GRK ke dalam dokumen perencanaan untuk tingkat Kabupaten/Kota agar terjalin keterpaduan program/kegiatan antara Pemerintah Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota. Hal ini akan memudahkan penginputan data valid serta kemudahan akses data. Salah satunya melalui pengarusutamaan RAD-GRK ke dalam RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 2. Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Teknis Penanganan Sampah di TPA Regional 3. Pengawasan dan penerapan sanksi upaya dan rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) 4. Pemeriksaan uji kualitas parameter lingkungan pada usaha/kegiatan di Provinsi Lampung 5. Koordinasi, Sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim dengan pembentukan desa program kampung iklim (Proklm)





Tabel 3.2.72 Pencapaian Sasaran 19 (2019-2022)

Sasaran 18											
Sasaran 19	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana										
IKU _(20/20)	Indeks Resiko Bencana										
Satuan	Indeks										
2019			2020			2021			2022		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
144,9	146,78	100	144,7	146,78	98,58	142,9	145,22	98,41	141	142,55	101,1

Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Sasaran meningkatnya ketangguhan terhadap bencana memiliki 1 (satu) indikator **Indeks Resiko Bencana** dengan capaian 145,22 dari target 141 yang direncanakan dalam perubahan perjanjian kinerja tahun 2022 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 96,87%. Dilihat dari table realisasi tahun 2019 sebesar 146,78%, tahun 2020 sebesar 146,78%, tahun 2021 sebesar 145,22% dan tahun 2022 sebesar 142,55%. Bila dibandingkan dengan capaian tahun lalu maka kinerja tahun ini menurun.

Tabel 3.2.73 Pencapaian Sasaran 19 (2024-Nasional)

Sasaran 19		
Sasaran 19	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	
IKU _(20/20)	Indeks Resiko Bencana	
Satuan	Indeks	
2024		Nasional
Target	Capaian	134,16
137,2	103,90	

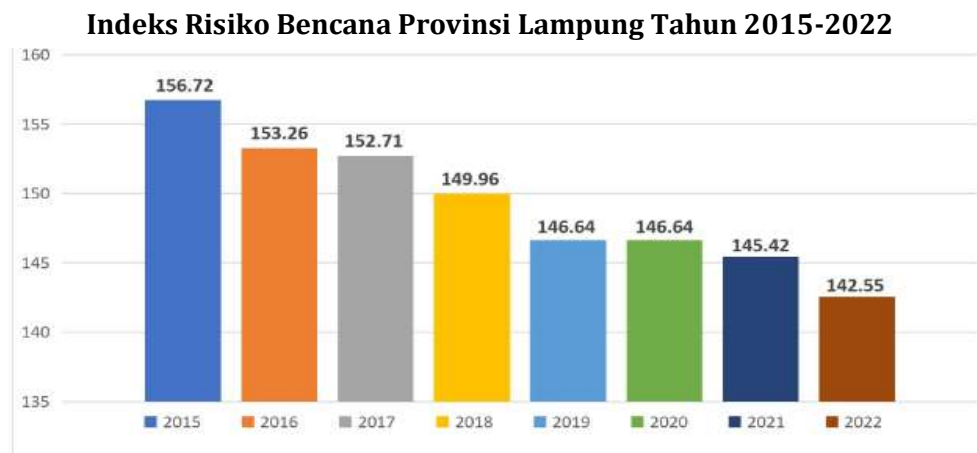
Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung, Februari 2022

Apabila dibandingkan dengan target akhir Perubahan RPJMD Provinsi Lampung maka capaian kinerja mencapai 103,90% dan jika dibandingkan dengan realisasi nasional selisih 8,39 poin.





Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021, Provinsi Lampung memiliki Indeks Risiko sebesar **142,55 (Tinggi)**, Indeks Risiko Bencana ini sesuai dengan grafik dibawah ini :



Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2022, BNPB 2022.

Pada Diagram diatas Indeks Risiko Bencana tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 2020 dan 2021 yang Indeks Risikonya Konstan, dengan besaran penurunan sebesar 1,22, hal ini disebabkan dengan adanya kenaikan Nilai Kapasitas Daerah sebesar 0.11.

Tabel 3.2.74 Faktor Pendukung, Penghambat, Solusi dan Program

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	Program
- Seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung sudah melaksanakan penyusunan Indeks Kapasitas Daerah (IKD) - BNPD selaku pengampu memberikan dukungan baik dalam hal asistensi penyusunan IKD bagi Kab/Kota, juga melaksanakan gladi kesiapsiagaan bencana wilayah Provinsi Lampung - Dunia usaha dan swasta cukup berperan aktif untuk dilibatkan dalam upaya penanggulangan bencana	- Belum pulihnya kondisi anggaran khususnya di Kabupaten/Kota pasca covid-19 khususnya pada program/kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. - Belum memadainya dukungan anggaran yang berkontribusi kepada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebencanaan di Kabupaten/Kota. - Dalam penyusunan IKD, masing-masing kabupaten/kota menemui kendala sulitnya mendapatkan dokumen yang terverifikasi dengan baik yang berasal dari OPD terkait. Hal ini berpengaruh kepada nilai indeks kapasitas daerah dan berpengaruh kepada besaran Indeks Risiko Bencana Provinsi Lampung - Terjadi kesenjangan yang lebar antara kebutuhan dengan ketersediaan logistic bencana	- Pengumpulan dan verifikasi data kepada OPD terkait untuk penilaian Indeks Kapasitas Daerah dilakukan secara terpisah dengan dikawal langsung oleh personel BPBD - Penyediaan logistik didorong untuk melibatkan dunia usaha seperti Forum BUMN Lampung. Sedangkan potensi relawan terus dikembangkan	Program Penanggulangan Bencana





3.3 Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Provinsi Lampung dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp 7.106.758.595.503,07** dan realisasi anggaran mencapai **Rp 6.582.756.660.562,94** sehingga capaian kinerja anggaran mencapai **92,63%**. Sedangkan anggaran Prioritas Provinsi Lampung memiliki pagu sebesar **Rp 4.876.799.821.839 (68,62% dari total P-APBD 2022)** dan realisasi anggaran **Rp 4.521.793.553.891** dengan capaian sebesar 93%.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran pada tahun 2022 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.3.1 Pagu dan Realisasi Anggaran 2022

NO	Prioritas Nasional Tahun 2022	Prioritas Provinsi Tahun 2022	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	%
1	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Kehidupan yang Religius, Aman, Berbudaya dan Inovatif	Rp 55.959.163.452	Rp 53.048.395.901	95%
2	Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum dan Transformasi Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi	Rp 714.419.128.932	Rp 683.396.871.383	96%
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pembangunan SDM dengan pengarusutamaan gender, pemberdayaan kaum difabel dan perlindungan anak	Rp 1.325.691.528.086	Rp 1.134.260.764.390	86%
4	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Infrastruktur Untuk Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Rp 1.123.578.022.086	Rp 1.040.681.925.994	93%
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar				
6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan Investasi dan Nilai Tambah Produk Unggulan untuk Mengurangi Kemiskinan dan Ketimpangan	Rp 1.653.756.784.384	Rp 1.607.139.833.222	97%
7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	Pembangunan Berkelanjutan Dan Mitigasi Bencana	Rp 3.395.194.900	Rp 3.265.763.001	96%
JUMLAH PRIORITAS			Rp 4.876.799.821.839		93%
JUMLAH P-APBD Tahun 2022			Rp 7.106.758.595.503	Rp 4.521.793.553.891	64%
Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran P-APBD BPKAD Provinsi Lampung 2022					





3.4 Efisiensi dan Efektivitas

Perincian penggunaan anggaran pada setiap misi dan indikator kinerja utama PD berdasarkan dokumen realisasi anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung per Februari 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4.1 Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran 2022

No.	IKU Provinsi Lampung	Satuan	Kinerja 2022			Anggaran			Persentase Kinerja
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
Misi 1: Menciptakan Kehidupan Yang Religius (Agamis), Berbudaya, Aman, Dan Damai									
1	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	73,5	72,44*	99%	Rp 95.045.201.685	Rp 90.329.686.993	95%	1
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	74	80,18	108%	Rp 20.481.768.777	Rp 18.318.694.913	89%	1
3	Indeks Pembangunan kebudayaan	Angka	55,3	53,19	97%	Rp 8.151.435.100	Rp 7.932.017.143	97%	1
Misi 2: Mewujudkan “Good Governance” Untuk Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan									
4	Nilai Reformasi Birokrasi	Angka	B	CC	98%	Rp 2.517.494.888.818	Rp 2.432.359.250.079	97%	1
Misi 3: Meningkatkan Kualitas SDM, Mengembangkan Upaya Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, dan Penyandang Disabilitas									
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	70,95	70,99	100%	Rp 1.045.015.634.411	Rp 960.416.127.680	92%	1
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,67	12,74	101%	Rp 1.747.609.613.831	Rp 1.506.444.060.179	86%	1
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,2	8,18	100%				1
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Angka	4,3-4,4	4,52	98%	Rp 33.344.635.769	Rp 32.756.314.595	98%	1
9	Indeks Perlindungan Anak	Angka	69,57	65,07	96%	Rp 53.392.159.843	Rp 51.504.963.757	96%	1
10	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	69,14	67,96*	98%	Rp 15.624.593.882	Rp 15.286.216.052	98%	1
Misi 4: Mengembangkan Infrastruktur Guna Meningkatkan Efisiensi Produksi dan Konektivitas Wilayah									
11	Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	76	76,85	101%	Rp 714.373.361.755	Rp 658.249.405.486	92%	1
12	Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah	Persen	92,31	96,5	105%	Rp 407.562.765.597	Rp 382.723.741.500	94%	1
13	Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga	Persen	97	99,99	103%	Rp 20.713.848.382	Rp 20.423.481.301	99%	1
Misi 5: Membangun Kekuatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian dan Wilayah Pedesaan yang Seimbang dengan Wilayah Perkotaan									
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	03-Apr	4,28	143%	Rp 255.604.141.999	Rp 244.956.215.209	96%	1
15	Nilai Tukar Petani	Indeks	102-103	104,3	102%	Rp 3.363.000.000	Rp 3.210.720.641	95%	1
16	Laju Inflasi	Persen	3±1	5,51	62%	Rp 29.000.855.441	Rp 27.556.725.988	95%	1
17	Angka Kemiskinan	Persen	12,4-11,9	11,44	108%	Rp 7.510.850.450	Rp 7.430.508.002	99%	1
Misi 6: Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Bersama									
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,66	69,1	101%	Rp 96.834.851.554	Rp 90.223.336.209	93%	1
19	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen	6,915	12,84	186%	Rp 1.986.863.900	Rp 1.955.564.226	98%	2
20	Indeks Resiko Bencana	Indeks	141	145,42	97%	Rp 33.648.124.310	Rp 30.679.630.608	91%	1
Total						Rp 7.106.758.595.503	Rp 6.582.756.660.563	93%	

Sumber: Dokumen Realisasi Anggaran P-APBD BPKAD Provinsi Lampung 2023

Tabel 3.4.1 menunjukkan sudah tercapainya efisiensi dan efektivitas capaian kinerja terhadap capaian anggaran dengan rata-rata 20 (dua puluh) IKU capaiannya sebesar 104,9% sedangkan kinerja anggaran yang dihasilkan mendorong efisiensi sumber daya sebesar 7% atau setara **Rp 524.001.934.940** dengan melihat perbandingan capaian kinerja terhadap capaian anggaran sebagai berikut:





- 1) Misi 1 (satu) , terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). IKU pertama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian kinerja 99% dan capaian anggaran 95% sehingga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap penggunaan anggaran. IKU kedua yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan capaian kinerja 108% dan capaian anggaran 89% juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran. IKU ketiga adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan capaian kinerja 97% dan capaian anggaran 97%;
- 2) Misi 2 (dua), dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 98% dan capaian anggaran 97%. Hal tersebut juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
- 3) Pada misi 3 (tiga) memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. IKU yang pertama pada misi 4 (empat) adalah Angka Harapan Hidup dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 92%. Selanjutnya Harapan Lama Sekolah dengan capaian 101% dan Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian 100%. Karena 2 (dua) IKU tersebut saling berkaitan sehingga terdapat penggabungan anggaran dalam 2 (dua) IKU tersebut. Capaian anggaran dalam IKU tersebut sebesar 86%. IKU selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian kinerja dan capaian anggaran sebesar 98% dimana angka tersebut sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Selanjutnya Indeks Perlindungan Anak dengan capaian kinerja dan capaian anggaran 96% dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian kinerja dan capaian anggaran 98%. Kedua IKU ini juga sudah mencapai efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran;
- 4) Misi 4 (empat), terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 92%. Dengan hasil capaian dengan capaian anggaran kondisi kemantapan jalan provinsi sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selanjutnya Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah dengan capaian kinerja 105% dan capaian anggaran 94%. Seperti IKU sebelumnya, dengan perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. IKU terakhir dalam misi ini adalah Rasio





Elektrifikasi Rumah Tangga dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 99%. Hal tersebut juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam IKU Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga;

- 5) Misi 5 (lima) memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja 143% dan capaian anggaran 96%. Selanjutnya Nilai Tukar Petani dengan capaian kinerja 102% dan capaian anggaran 95%. IKU selanjutnya dalam misi ini adalah Laju Inflasi dengan capaian kinerja 62% dan capaian anggaran 95%. Terakhir dalam misi ini adalah IKU Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 108% dan capaian anggaran 99%. Tiga dari empat indikator dalam IKU ini sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari capaian kinerja dan capaian anggaran. Namun pada IKU Laju Inflasi, capaian kinerja masih jauh dari target dikarenakan kondisi ekonomi yang belum pulih. Selain itu, laju inflasi Provinsi Lampung masih sama dengan rata-rata nasional sebesar 5,51%;
- 6) Misi 6 (enam) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 93%. Selanjutnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian kinerja 185,68% dan capaian anggaran 98%. Terakhir adalah Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja 97% dan capaian anggaran 91%. Pada misi ini seluruh IKU telah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari capaian kinerja dan capaian anggaran.





3.5 Tindak Lanjut LHE SAKIP 2022

Berdasarkan Surat Kemenpan RB tanggal 6 Desember 2022 Nomor: B/802/11.05/2022 Hal: Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 Provinsi Lampung telah menindaklanjuti terkait beberapa rekomendasi guna lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

- 1) Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan pada level Perangkat Daerah khususnya sasaran indikator dari program sampai kegiatan agar berorientasi pada hasil dan sesuai dengan tingkatnya untuk memecahkan isu/permasalahan yang dihadapi;
- 2) Memperbaiki pohon kinerja berdasarkan Permenpan 89 tahun 2021 tingkat Pemprov maupun Perangkat Daerah, sehingga dapat optimal dimanfaatkan untuk menyusun *crosscutting* dan *cascading* dengan baik;
- 3) Mengintegrasikan *e-sakip* dan *e-monev* untuk manajemen kolektif data kinerja;
- 4) Memformalkan IKU Pemprov setelah Perubahan RPJMD dan melengkapi IKU dengan kolom definisi operasional;
- 5) Menerapkan *reward* atas capaian kinerja Perangkat Daerah melalui pelaksanaan SAKIP Awards;
- 6) Memanfaatkan rencana aksi sebagai alat pengendali kegiatan;
- 7) Memanfaatkan sistem pengukuran kinerja secara elektronik untuk pembayaran TPP melalui e-Kinerja Pemprov Lampung;
- 8) Telah disusun Laporan Kinerja berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 9) Laporan Kinerja telah menyajikan data perbandingan antara capaian kinerja dengan realisasi/penggunaan anggaran yang digunakan persasaran dan per-Indikator Kinerja Utama (IKU);
- 10) Laporan Kinerja telah menyajikan analisis faktor pendukung dan penghambat didukung dengan *evidence based*.





3.6 PRESTASI

PENGHARGAAN		TAHUN 2022	
PENGHARGAAN DARI MENTERI HUKUM DAN HAM Selasa, 11 Januari 2022 Dukungan Vaksinasi 65 Kementerian dan HAM, Gubernur Arinal Saripin Plagem Penghargaan dari Menteri		PENGHARGAAN KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2021 Sabtu, 10 Februari 2022 Satuan Kerja Terbaik I dalam kategori Penguat OkeUP dengan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (KPA) 98,96	
PENGHARGAAN INISIATOR OLAH RAGA INDONESIA 2022 Kamis, 17 Februari 2022 Penghargaan Inisiator Olahraga Indonesia 2022 dari Sekeloa Wartawan Olahraga (SWO) PWI Pusat		PENGHARGAAN KARYA BHAKTI PEDULI SATPOL PP Senin, 21 Maret 2022 (Direktur Polisi Pemangku Proje (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Limas) Kementantri RI Bernhard E. Rombomunu menyerahkan penghargaan ke Gubernur Lampung	
PERINGKAT 3 NASIONAL Kamis, 24 Maret 2022 Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri, Peringkat III (Negeri Nasional) Capaian Kinerja Pelaporan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial		PENGHARGAAN PENYALURAN DAK FISIK TERCEPAT 2021 Jumat, 8 April 2022 Penyaluran DAK Fisik Tercepat Tahun 2021 dengan Predikat Terbaik ke III Tingkat Provinsi dari Kementerian Keuangan	
LAMPUNG 10 BESAR PPD TAHUN 2022 Kamis, 28 April 2022 Provinsi Lampung menjadi salah satu daerah terbaik dalam pencapaian dan pencapaian PPD tahun 2022		PENGHARGAAN OPINI WTP Kamis, 12 Mei 2022 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Perwakilan Lampung tahun 8 kali berturut-turut meraih WTP	
PENGHARGAAN REALISASI APBD TERTINGGI Kamis, 2 Juni 2022 Menampikan Penghargaan 5 besar Provinsi Terbaik dalam Pengelolaan Realisasi Belanja Terbaik APBD Tahun 2021 pada Bulan Juni 2022		PERINGKAT 5 SERTIFIKAT KOMPETENSI PEMERINTAH JUMLAH PESERTA TERBANYAK Rabu, 29 Juni 2022 Sertifikat Kompetensi Pemerintah merupakan proses pemberian Sertifikat Kompetensi Pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui 10 Kompetensi	
MANGGALA KARYA KENCANA (MKK) 2022 Rabu, 06 Juli 2022 Gubernur dan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung meraih Penghargaan MKK 2022 dari BKKBN		PENGHARGAAN UBL AWARD LEADER SUSTAINABLE DEVELOPMENT Kamis, 21 Juli 2022 Gubernur Arinal Djunaidi terima Penghargaan UBL Award Leader For Sustainable Development Kategori Ketahanan Pangan Pada Dies Natalis Emas UBL	



PENGHARGAAN

TAHUN 2022

PEREMPUAN INSPIRATIF BIDANG SOSIAL DARI IKWI
Sabtu, 16 Juli 2022
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung Ibu Niana Sari Arinal menerima penghargaan Perempuan Inspiratif Bidang Sosial dari Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia.

Peringkat 1 Penghargaan BKN Award 2022
Selasa, 26 Juli 2022
Lampung meraih Peringkat 1 Penghargaan BKN Award 2022 Kategori Pengisian Rancangan Data, Sistem Informasi dan CAT pada Pemerintah Provinsi Tipe Besar.

Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA)
Sabtu, 23 Juli 2022
Lampung memperoleh Penghargaan Provinsi Layak Anak (PROVILA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI pada kegiatan Penghargaan Kabupaten/Kota.

PENGHARGAAN PEMENANG LOMBA DAN APRESIASI TELADAN WANA LESTARI TAHUN 2022 DARI KLHK
Selasa, 16 Agustus 2022
IPH Way Kalam, Pengelola Nuklir Pengelolaan Hutan Desa (IPHHD), Desa Way Kalam, mendapatkan Penghargaan dari Kementerian LHK dalam lomba dan apresiasi Apresiasi Wana Lestari Tingkat Nasional Tahun 2022.

PENGHARGAAN PENDUKUNG PELAKSANAAN PROGRAM ASURANSI PERTANIAN
Rabu, 17 Agustus 2022
Gubernur Lampung dinobatkan Berprestasi di Sektor Pertanian menerima penghargaan dari Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo karena telah mendukung pelaksanaan program Asuransi Pertanian.

PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN KEUANGAN RI
Kamis, 22 September 2022
Menteri Keuangan RI kepada Pemprov Lampung atas Capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) TA 2021 dan Ralihan Opini WTP & kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemprov Lampung.

PENGHARGAAN BPJS KESEHATAN ATAS CAPAIAN UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) TAHUN 2022
Rabu, 12 Oktober 2022
Penghargaan tersebut diberikan kepada Gubernur Lampung atas keberhasilan cakupan kesehatan BPJS di Provinsi Lampung dari Kabupaten/Kota per Oktober 2022 yang mencapai 96,08 persen dengan peserta 20.786.277 jiwa dari 8.837.968 jiwa penduduk.

PEMROV LAMPUNG TERIMA TIGA PENGHARGAAN PADA TTC NUSANTARA XXIII TAHUN 2022
Rabu, 19 Oktober 2022
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, mengapresiasi terobosan inovasi e-voting yang dilakukan Pemerintah Provinsi Lampung.

ANUGERAH DESA WISATA INDONESIA 2022
Minggu, 30 Oktober 2022
DESA WISATA PULAU PAHAWANG MENJADI JUARA HARAPAN II KATEGORI DESA WISATA MAJU

PROVINSI DALAM KATEGORI OPTIMISME ENERGI TERBARUKAN DALAM SAURAN ENERGI RUED 2025
Rabu, 09 November 2022
Gubernur Lampung Arinal Gunawan menerima Penghargaan sebagai Provinsi dalam Kategori Optimisme Energi Terbarukan dalam Sauren Energi RUED 2025 pada kegiatan KOPERT 2022.

PENGHARGAAN PROVINSI TERCEPAT MENYELESAIKAN BATAS DAERAH & KODE DESA
Kamis, 10 November 2022
Peran aktif Gubernur untuk memfasilitasi dan menyinkronkan batas daerah antar Kabupaten/Kota di wilayahnya sehingga memperoleh peran dalam penyelesaian permasalahan batas daerah.

PENGHARGAAN NUGRA SASA (SHARMA PUSTALOKA) 2022
Senin, 14 November 2022
Bunda Literasi Provinsi Lampung menerima penghargaan Nugra Sasa (Sharma Pustaloka) 2022 dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.





PENGHARGAAN

TAHUN 2022

PENGHARGAAN INDUSTRI HAJAU

SATYALANCANA DHARMA ADITYA KARYA MAHATVA YODHA (AKMY) AWARDS 2022

Jumat, 25 November 2022

Rabu, 30 November 2022

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Satyalancana Dharma Aditya Karya Mahatva Yodha (AKMY) Awards 2022 dari Pengurus Nasional Katang Taruna.

PENGHARGAAN ADIWYATA MANDIRI DAN ADIWYATA NASIONAL TAHUN 2022

ANUCERAH REKSA BANDHA

Jumat, 2 Desember 2022

Senin, 5 Desember 2022

Pemerintah Provinsi Lampung menerima Penghargaan Anugerah Reksa Bandha 4 kategori dari Gubernur yang diberikan secara langsung oleh Jendral Anif Lubis, Kepala Pengadik Optimalisasi Kebijakan Regulasi Provinsi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kebijakan Regulasi (DKNR).

PENGHARGAAN ANUCERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

PENGHARGAAN DARI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (KLHK) RI

Rabu, 14 Desember 2022

Jumat, 16 Desember 2022

Gubernur Lampung meraih Penghargaan oleh Kementerian Kominfo sebagai Proklamasi Publik Informatif dengan nilai 95,26.

Gubernur Arinal Djunaidi menerima penghargaan dari Kementerian LHK RI karena telah berhasil sebagai Pemimpin Pengadik Kebijakan, Wawasan, dan Perencanaan Wilayah dari Pembangunan Rusan Provinsi Lampung Tahun 2022.

ANUCERAH PERKEBUNAN INDONESIA 2022 DARI KEMENTERIAN PERTANIAN RI

PENCANUCERAHAN INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD 2022 OLEH MENTERI DALAM NEGERI

Rabu, 21 Desember 2022

Jumat, 23 Desember 2022

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menerima Anugerah Perkebunan Indonesia 2022 dalam Pengawasan dan Pendampingan Kebijakan, Pembangunan Perkebunan dari Kementerian Pertanian RI.

Pemprov Lampung mendapatkan penghargaan dengan kategori Proklamasi Inovatif dalam Akad Pengawasan dan Inovative Government Awards (IGA).

PENGHARGAAN ANUCERAH PRAKARSA INKLUSI DARI KOMISI NASIONAL DISABILITAS

ANUCERAH MERITOKRASI DARI MENTERI PAN DAN RB

Kamis, 8 Desember 2022

Kamis, 8 Desember 2022

Penghargaan diberikan kepada Pemerintah Provinsi Lampung atas dukungan pada Gerakan Indonesia Inklusif dan Ramah Disabilitas.

Provinsi Lampung atas prestasi penanganan sistem Merit dalam manajemen ASN sebagai instansi pemerintahan dengan Kategori Baik dengan nilai 258,5 dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

PENGHARGAAN PEMBINAAN KABUPATEN/KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA

ANUGRAH BANGGA BUATAN INDONESIA

Senin, 12 Desember 2022

Selasa, 13 Desember 2022

Gubernur Arinal Djunaidi menerima Penghargaan Pembinaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia 2022 dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Dengan mengedipkan tagline #KampungSiBumata, Lampung berhasil memperoleh penghargaan sebagai KM inovatif di bidang kerajinan. Berhasil pada acara pengempukerahan bangga buatan Indonesia 2022.

PENGHARGAAN REKOR MURI SEBAGAI PEMERAKASA SAJIAN RAJUNGAN TERBANYAK

PAGAM PENGHARGAAN NASIONAL DARI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

Jumat, 18 November 2022

Senin, 21 November 2022

Memperingati Hari Ikan Nasional (HARIKANAS) ke-9 tahun 2022, Provinsi Lampung melalui kegiatan Pemecahan Rekor Muri Makan Rajungan terbanyak, 1 ton rajungan secara bersama-sama.

Gubernur Lampung menerima Penghargaan Atas Upaya Penghormatan, Perlindungan, dan Pemertanian Ikan Pengadik Disabilitas di Dunia Kerja melalui dari Kementerian Ketenagakerjaan RI.

Lampung Juara Umum Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Nasional

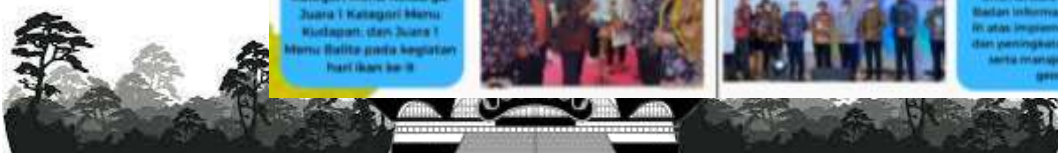
PENGHARGAAN BHUMANDALA AWARD 2022

Senin, 21 November 2022

Jumat, 25 November 2022

Mendapat Juara 1 pada Kategori Menu Keluarga, Juara 1 Kategori Menu Kustodian, dan Juara 1 Menu Balita pada kegiatan hari ikan ke-9.

Pemerintah Provinsi Lampung menerima penghargaan Bhumandala Award 2022 dari Badan Informasi Geospasial (BIG) RI atas implementasi pemetaan dan peningkatan tingkat jaringan serta manajemen informasi geospasial.





BAB IV

PENUTUP

Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Lampung selama tahun 2022 telah dimuat pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022 merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2022. Penyusunan LKj ini merupakan langkah pemenuhan harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya penyelenggaraan pemerintah yang baik. Berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024. Provinsi Lampung dalam menjalankan Visi **“Rakyat Lampung Berjaya”** yang tertuang dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 telah menetapkan 6 (enam) misi yaitu: Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman dan damai; Mewujudkan Good Governance untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik; Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan kaum difabel; Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah; Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan; Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama. Perubahan RPJMD 2019-2024, Provinsi Lampung memiliki 8 (delapan) Tujuan dengan 15 (lima belas) Indikator Tujuan dan 19 (Sembilan belas) Sasaran Strategis dengan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menopang 6 (enam) Misi Provinsi Lampung. Dengan capaian kinerja dan anggaran sebagai berikut:

1. Misi 1 (satu), terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama (IKU). IKU pertama adalah Indeks Kerukunan Umat Beragama dengan capaian kinerja 99% dan capaian anggaran 95% sehingga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas kinerja terhadap penggunaan anggaran. IKU kedua yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan capaian kinerja 108% dan capaian anggaran 89% juga sudah





menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran. IKU ketiga adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan capaian kinerja 97% dan capaian anggaran 97%;

2. Misi 2 (dua), dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama yaitu Nilai Reformasi Birokrasi dengan capaian kinerja 98% dan capaian anggaran 97%. Hal tersebut juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran;
3. Misi 3 (tiga) memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Utama. IKU yang pertama pada misi 3 (tiga) adalah Angka Harapan Hidup dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 92%. Selanjutnya Harapan Lama Sekolah dengan capaian 101% dan Rata-rata Lama Sekolah dengan capaian 100%. Karena 2 (dua) IKU tersebut saling berkaitan sehingga terdapat penggabungan anggaran dalam 2 (dua) IKU tersebut. Capaian anggaran dalam IKU tersebut sebesar 86%. IKU selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka dengan capaian kinerja dan capaian anggaran sebesar 98% dimana angka tersebut sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran. Selanjutnya Indeks Perlindungan Anak dengan capaian kinerja dan capaian anggaran 96% dan Indeks Pemberdayaan Gender dengan capaian kinerja dan capaian anggaran 98%. Kedua IKU ini juga sudah mencapai efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian anggaran;
4. Misi 4 (empat), terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama yaitu Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 92%. Dengan hasil capaian dengan capaian anggaran kondisi kemantapan jalan provinsi sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. Selanjutnya Tingkat Infrastruktur Dasar Wilayah dengan capaian kinerja 105% dan capaian anggaran 94%. Seperti IKU sebelumnya, dengan perbandingan capaian kinerja dan capaian anggaran sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran. IKU terakhir dalam misi ini adalah Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 99%. Hal tersebut juga sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dalam IKU Rasio Elektrifikasi Rumah Tangga;
5. Misi 5 (lima) memiliki 4 (empat) Indikator Kinerja Utama, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi dengan capaian kinerja 143% dan capaian anggaran





96%. Selanjutnya Nilai Tukar Petani dengan capaian kinerja 102% dan capaian anggaran 95%. IKU selanjutnya dalam misi ini adalah Laju Inflasi dengan capaian kinerja 62% dan capaian anggaran 95%. Terakhir dalam misi ini adalah IKU Angka Kemiskinan dengan capaian kinerja 108% dan capaian anggaran 99%. Tiga dari empat indikator dalam IKU ini sudah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari capaian kinerja dan capaian anggaran. Namun pada IKU Laju Inflasi, capaian kinerja masih jauh dari target dikarenakan kondisi ekonomi yang belum pulih. Selain itu, laju inflasi Provinsi Lampung masih sama dengan rata-rata nasional sebesar 5,51%;

6. Misi 6 (enam) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dengan capaian kinerja 101% dan capaian anggaran 93%. Selanjutnya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dengan capaian kinerja 185,68% dan capaian anggaran 98%. Terakhir adalah Indeks Resiko Bencana dengan capaian kinerja 97% dan capaian anggaran 91%. Pada misi ini seluruh IKU telah menunjukkan efisiensi dan efektifitas anggaran dilihat dari capaian kinerja dan capaian anggaran.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Provinsi Lampung Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran/potret kinerja Kepala Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Provinsi Lampung tercinta.

Telukbetung, Maret 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI





LAMPIRAN

